

**AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM**

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

497-0357

2. Contract/Grant Number

497-C-00-98-00045-00

3. Publication Date

April 2003

4. Document Title/Translated Title

Deskripsi Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Sektor Pertanian (Description of Infrastructure Development and Agriculture Sector Expansion) (In Indonesian)

5. Author (s)

1. Centre for Regional Development Assistances (Cerda)
2. Centre for Agricultural and Development Studies (CADS)
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yasa Anggana - Garut

6. Contributing Organization (s)

Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

7. Pagination

108

8. Report Number

PEG 150

9. Sponsoring A.I.D. Office

ECG, USAID/Jakarta

10. Abstract (optional - 250 word limit)

11. Subject Keywords (optional)

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1. Indonesia | 4. |
| 2. Infrastructure Development | 5. |
| 3. Agriculture Sector | 6. |

12. Supplementary Notes

13. Submitting Official

Maria Syamsudin, Exec. Sec'y
e-mail: maria@pegasus.or.id

14. Telephone Number

011-62-21-391-1971

15. Today's Date

January 21, 2004

.....DO NOT write below this line.....

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD [] INV [] DUPLICATE []

Deskripsi Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Sektor Pertanian

Studi Kasus : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut
Propinsi Jawa Barat

Laporan Akhir

April 2003

Disusun oleh :

**Centre for Regional Development Assisstances (Cerda)
Centre for Agricultural and Development Studies (CADS)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yasa Anggana - Garut**

Didukung oleh :

Partnership in Economic Growth - USAID



PEG



Centre for Regional Development





Ketua Tim

Yadi S.A.Suriadinata - (CERDA)

Anggota

Dr. Ir. Dedi Natawijaya - (CADS, Tasikmalaya)
Arif Rahman Hidayat S.E. Ak. - (STIE Yasa Anggana, Garut)
Mochamad Fatwadi - (CERDA)
Wahyu Aris Darmono - (CERDA)

Sekretaris

Neneng Fujiastuti - (CERDA)



PENGANTAR

Masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian khususnya yang dihadapi oleh petani sepertinya tidak pernah dapat diselesaikan oleh kita di Indonesia. Di lain pihak sektor pertanian ini pula yang selalu ramai didiskusikan dan diberitakan dalam berbagai media, namun berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah nampaknya masih belum cukup untuk dapat menyelesaikan masalah di sektor pertanian.

Meskipun kita sadari bersama bahwa inti dari permasalahan sektor pertanian bukan hanya dari lahan, permintaan dan penawaran, harga, ekspor dan impor serta kebijakan sektor pertanian, namun masih jarang sekali upaya untuk melaksanakan kajian yang lebih mendalam mengenai keterkaitan sektor lainnya yang justru sangat menunjang bagi pengembangan pertanian di Indonesia.

Pada kesempatan ini CERDA mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada PEG – USAID yang telah memberikan kesempatan bagi CERDA untuk melaksanakan kajian mengenai “Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Pertanian”, sebagai salah satu jawaban untuk menjawab permasalahan pembangunan sektor pertanian dan lebih mengerti persoalan yang di hadapi oleh sektor pertanian yang berkaitan dengan infrastruktur, khususnya di kabupaten Garut dan Tasikmalaya.

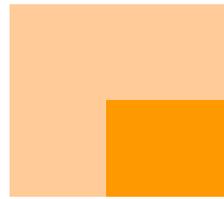
CERDA mengucapkan terimakasih kepada, Bapak David J.Ray dan Ibu Shinta Manurung dari PEG dan Bapak Firman Aji dari USAID yang telah banyak memberikan dukungan atas terlaksananya kajian ini. Demikian pula CERDA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Natawijaya dari Center for Agriculture Development Studies (CADS) Tasikmalaya dan Bapak Arif Rahman Hidayat dari STIE Setia Anggana, Garut beserta seluruh mitranya yang telah sangat berjasa dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

Meski di sadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini baik dari segi data dan analisisnya namun mudah – mudahan dapat bermanfaat bagi pembangunan serta pertanian di Indonesia.

Jakarta, Mei 2003

Yadi S.A.Suriadinata

Note : Penelitian ini dibiayai oleh Partnership for Economic Growth (PEG). PEG adalah sebuah proyek dengan dana United States Agency for International Development (USAID). Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv

PENDAHULUAN

- Latar Belakang **1**
- Rumusan Persoalan **3**
- Tujuan dan Sasaran **3**
- Lingkup Penelitian **4**
 - Lingkup Subtansial **4**
 - Lingkup Wilayah **4**
- Metodologi Penelitian **5**
- Pemilihan Variabel **6**
- Tingkat Analisis **7**
- Teknik Pengumpulan Data **8**
- Sistematika Laporan **8**

TINJAUAN PUSTAKA : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

- Analisis Makro **12**
- Analisis Mikro **12**

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH STUDI

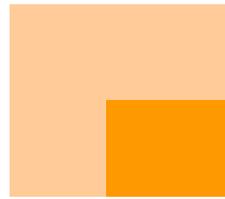
- Kabupaten Tasikmalaya **15**
 - Gambaran Fisik Dasar **15**
 - Gambaran Kependudukan **17**
 - Gambaran Perekonomian **18**
 - Gambaran Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian **19**
 - Gambaran Perkembangan Sektor Pertanian **21**
- Kabupaten Garut **22**

- Gambaran Fisik Dasar **22**
- Gambaran Kependudukan **23**
- Gambaran Perekonomian **24**
- Gambaran Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian **26**
- Gambaran Perkembangan Sektor Pertanian **29**

ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN TERHADAP PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

- Analisis Makro **34**
- Analisis Mikro **41**

KESIMPULAN 49



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

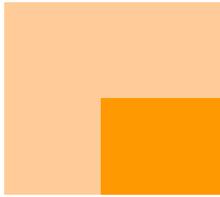
**STUDI DESKRIPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN CISAYONG DAN
KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA**

Centre For Agricultural Development Studies (CADS) – Tasikmalaya

LAMPIRAN 2

**STUDI DESKRIPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN BAYONGBONG
DAN KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yasa Anggana - Garut



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor pertanian ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Sektor ini dijadikan sebagai sektor utama yang berfungsi sebagai penjaga ketahanan pangan nasional dalam bentuk penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Selain itu, sektor inipun difungsikan sebagai sektor yang dapat menghasilkan devisa dan menyediakan bahan baku untuk mendukung pengembangan sektor industri.

Sampai saat ini, sektor pertanian merupakan sektor di mana sebagian besar rakyat Indonesia (lebih dari 50%) menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama penduduk yang hidup di daerah pedesaan. Dengan demikian, sektor pertanian ini juga berfungsi penting sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Mengingat beberapa hal di atas, pembangunan sektor pertanian merupakan hal yang memegang peranan sangat penting dalam menggapai cita-cita pembangunan Indonesia. Dalam konteks sejarah pembangunan nasional dan kecenderungan global, tantangan pembangunan sektor pertanian berupa tuntutan untuk penguatan sektor pertanian melalui model-model baru. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa model pembangunan pertanian dengan paradigma modernisasi yang secara praktis terlihat melalui revolusi hijau ternyata hanya mampu mendongkrak tingkat produksi, sementara kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan masih tampak besar. Oleh karenanya, paradigma pertanian industrial yang dikembangkan secara jeli dan mempertimbangkan aspek budaya dan struktur sosial dapat menjadi alternatif bagi model pertanian masa depan.

Memasuki abad 21 ini kondisi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik baik secara eksternal maupun internal. Secara internal adalah pengaruh dari proses desentralisasi yang sudah dimulai sejak tahun 2000, sedangkan untuk pengaruh eksternal adalah proses globalisasi yang akan diawali dengan diberlakukannya kesepakatan AFTA pada tahun 2003. Kedua fenomena tersebut akan membuka peluang dan sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia, karena di satu pihak peluang pasar makin terbuka lebar, namun di lain pihak persaingan akan semakin ketat dengan masuknya pemain asing yang memiliki pengalaman dan teknologi yang lebih baik dibanding pemain lokal.

Seperti dijelaskan sebelumnya, maka tantangan terberat yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama yang berada di daerah adalah masuknya pesaing dari luar yang memiliki pengalaman dan teknologi canggih yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai di negara asalnya. Pesaing dari luar tersebut akan mencoba untuk memasuki semua sektor ekonomi dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Jika dikaitkan dengan sektor pertanian, hambatan utama yang dihadapi sektor ini adalah :

1. Kecilnya luasan pemilikan lahan, sebagai akibat dari besarnya penduduk yang bergantung dari sektor ini (lebih dari 50% penduduk).
2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana (*basic infrastruktur and utilities*) sehingga menghambat proses peningkatan nilai tambah dari produk pertanian.

Kedua hambatan utama di atas, mengakibatkan terhambatnya transformasi keunggulan komparatif komoditi pertanian yang dimiliki Indonesia yang beriklim tropis ini menjadi keunggulan kompetitif. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana. Selain itu, kekurangan sarana dan prasarana ini juga menghambat transformasi struktural dari sektor dengan nilai tambah rendah menuju sektor dengan nilai tambah tinggi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hambatan transformasi struktural di sektor pertanian adalah tidak terjadinya peralihan yang signifikan dari proses produksi pertanian tradisional menjadi pertanian yang berbasis agroindustri dan agribisnis, sehingga bukan saja menghambat perkembangan sektor pertanian, juga tidak adanya nilai tambah yang dinikmati oleh para petani dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian ini. Di samping itu, hambatan yang terjadi pada proses transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor lainnya (industri/manufaktur, perdagangan dan jasa) tersebut telah mengakibatkan tekanan yang lebih berat pada sektor pertanian.

Kedua hal ini terutama disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dibangun di daerah pada era pembangunan terdahulu, karena pembangunan sektor pertanian akan berjalan dengan lancar apabila terjadi proses transformasi struktural yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerah atau dengan kata lain pembangunan pertanian hanya akan terjadi apabila hambatan proses transformasi struktural dapat dikurangi dengan pembangunan sarana dan prasarana secara tepat dan terencana.

Disadari bahwa bukan hanya faktor penyediaan infrastruktur yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor tersebut, analisis parsial peran penyediaan infrastruktur terhadap perkembangan sektor pertanian masih merupakan analisis yang sangat berguna dalam rangka mencari cara dan mekanisme penyediaan yang lebih baik.

Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk menggali lebih jauh mengenai dampak pembangunan infrastruktur pertanian terhadap perkembangan sektor pertanian ke arah agribisnis terutama di daerah di mana sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang merupakan dua wilayah kabupaten di mana sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama.

Rumusan Persoalan

Penyediaan infrastruktur pertanian dalam mendukung perkembangan sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penyediaan infrastruktur ini merupakan pra-kondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Penyediaan infrastruktur yang baik akan memberikan ruang yang lebih besar bagi perkembangan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kapasitas ekonomi dan kontribusi yang tinggi dalam menunjang pertumbuhan dan pemerataan perekonomian secara keseluruhan, yaitu dalam mendukung perkembangan sektor pertanian dari pertanian subsisten ke arah pertanian industri/komersial.

Persoalan utama dari studi ini adalah :

1. Bagaimana intervensi penyediaan infrastruktur pertanian mempengaruhi perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya?
2. Sejauhmana intervensi penyediaan infrastruktur pertanian mempengaruhi perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya?

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan persoalan di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah menganalisis dampak penyediaan infrastruktur pertanian terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah studi.

Adapun sasaran dari studi ini adalah :

1. Mengidentifikasi kondisi penyediaan infrastruktur pertanian yang ada di wilayah studi.
2. Mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pertanian di wilayah studi.
3. Mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian di wilayah studi.
4. Mengidentifikasi kondisi perkembangan sektor pertanian di wilayah studi.
5. Mengetahui gambaran mengenai persepsi petani terhadap pembangunan infrastruktur dan hubungannya dengan kegiatan usaha tani.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa, sejauhmana dan bagaimana pengaruh/dampak penyediaan infrastruktur pertanian terhadap perkembangan sektor pertanian. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat hasil studi ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan positif dalam membuat kebijakan penyediaan infrastruktur pertanian bagi pengembangan sektor pertanian.

Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini terdiri dari dua lingkup, yaitu lingkup substansial dan lingkup wilayah.

Lingkup Substansial

Substansi penelitian ini ditekankan pada analisis mengenai dampak pembangunan infrastruktur pertanian terhadap perkembangan sektor pertanian ke arah agribisnis di wilayah studi. Secara umum, infrastruktur yang terkait dengan pembangunan pertanian sebagian besar merupakan infrastruktur pedesaan, karena seperti diketahui bahwa sektor pertanian lebih banyak berkembang di wilayah pedesaan.

Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap sektor pertanian secara makro dan umum jarang ditemukan, dalam artian menganalisis infrastruktur secara umum. Hal tersebut jarang dilakukan karena setiap jenis infrastruktur yang berbeda memiliki karakteristik layanan yang berbeda pula. Oleh karena itu, studi ini juga membahas analisis dampak secara terpisah sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang berbeda tersebut. Analisis infrastruktur dibatasi hanya pada infrastruktur ekonomi yang memiliki kaitan erat dengan aspek produksi serta distribusi input dan output sektor pertanian. Secara lebih jelas, infrastruktur tersebut adalah:

Infrastruktur produksi : Infrastruktur yang terkait erat dengan proses produksi, yaitu infrastruktur pengairan (irigasi), dan infrastruktur energi listrik.

Infrastruktur distribusi input dan output : Infrastruktur transportasi (jalan), komunikasi (telepon) serta infrastruktur pasar komoditas pertanian (input dan output).

Selain itu, analisis kebijakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian juga dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bagian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai lingkungan kebijakan di masing-masing lokasi studi.

Lingkup Wilayah

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa barat. Kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten di Propinsi Jawa Barat di mana sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama.

Metodologi Penelitian

Studi ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan. Tahap 1 merupakan tahap di mana akan dilakukan analisis literatur dan perkiraan dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan sektor pertanian, mengembangkan sasaran penelitian dan metodologi penelitian serta menyiapkan instrumen penelitian untuk pelaksanaan studi kasus di wilayah yang telah ditentukan. Dalam tahap 2, kajian lapangan dilakukan, kompilasi hasil survey, analisis data dan penyiapan laporan. Seluruh hasil studi akan disosialisasikan dan didesiminasikan pada tahap 3 melalui suatu acara seminar di masing-masing wilayah studi dengan sasaran audien pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan LSM. Dari tahapan studi yang direncanakan tersebut, diharapkan bahwasanya studi ini akan dapat memberikan suatu pengertian yang lebih baik mengenai peran infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah secara umum dan sektor pertanian secara khusus.

Satu dari sekian banyak tantangan dalam studi dampak/pengaruh adalah pengembangan konsep penemuan dampak/pengaruh tersebut. Satu hal yang pasti adalah sesuatu tidak ada yang statis, sesuatu selalu dinamis dan berkembang demikian pula dengan dampak. Kedinamisan tersebut terletak pada intervensi, respon dan dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk menangkap kedinamisan perkembangan dampak/pengaruh tersebut, studi ini sejauh mungkin menggunakan pendekatan perbedaan ganda (*double differences*), yaitu analisis dampak yang menggunakan pendekatan perbandingan sebelum dan sesudah (*before and after*) dan perbandingan dengan dan tanpa (*with and without*). Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang dipandang sangat lengkap dalam menangkap kedinamisan dampak/pengaruh dimaksud. Namun demikian, terdapat kendala yang cukup mendasar manakala pilihan penggunaan metode tersebut dilakukan, ketersediaan data seri yang lengkap merupakan salah satu masalah utama dalam melakukan analisis *before dan after*. Di lain pihak, penentuan obyek kontrol yang tepat juga merupakan suatu tantangan tersendiri dalam melakukan analisis dengan dan tanpa. Selain itu, tantangan lainnya adalah terkait dengan kategori dampak, yaitu pendefinisian dampak langsung (*direct impact*), dampak tak langsung (*indirect impact*) dan eksternalitas serta terkait dengan jenis ukuran dampak, yaitu dampak yang terukur (*tangible*) dan dampak yang tidak terukur (*intangible*).

Data seri yang dianalisis dalam studi ini meliputi data mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Pengambilan rentang data selama 10 (sepuluh) tahun ini terkait dengan keterbatasan sediaan data yang ada. Selanjutnya, akan pula dipilih dua kawasan untuk penelitian kasus dengan kriteria satu kawasan sebagai obyek/lokasi utama dan sisanya sebagai obyek/lokasi kontrol. Hal tersebut terkait dengan pendekatan analisis *dengan dan tanpa*.

Berdasarkan pada jenis data, studi ini dirancang untuk menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu kuantitatif dan kualitatif yang mana pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan data, baik itu sekunder maupun primer dengan cara survey partisipasi. Beberapa teknik analisis seperti indeks,

skala, pembobotan dan korelasi digunakan untuk mempermudah analisis. Selain itu, analisis kualitatif tetap digunakan untuk memperkuat dan memperkaya ilustrasi dan kedalaman analisis studi ini.

Analisis perubahan intervensi infrastruktur dilakukan dengan menggunakan perhitungan bobot sederhana terhadap kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur yang menghasilkan nilai indeks. Dengan penghitungan ini didapatkan suatu nilai indeks yang dapat diperbandingkan sehingga gambaran perubahan intervensi infrastruktur dapat dilihat dengan lebih jelas.

Pemilihan Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel utama dan 2 (dua) variabel pendukung. Tantangan yang wujud terkait dengan pemilihan variabel adalah penentuan cakupan dampak yang akan diukur. Seperti diketahui bahwa penyediaan infrastruktur pertanian akan memberikan dampak baik terkait dengan aspek ekonomi, sosial maupun aspek lainnya secara berantai.

Penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi dengan tidak melepaskan keterkaitan aspek lain dan tetap menggunakan penjelasan terhadap aspek lain tersebut dalam rangka memperjelas rangkaian pemikiran dan paparan aspek ekonomi.

Penjelasan mengenai kedua jenis variable tersebut adalah sebagai berikut :

Variabel Utama

Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas ini meliputi segala ukuran pembangunan infrastruktur baik itu bersifat fisik, nilai investasi maupun kebijakan pembangunan infrastruktur daerah. Variabel ini dapat dipandang sebagai variable pembangunan infrastruktur baru (*development of new infrastructure*), variable peningkatan standar LOS infrastruktur (*improvement of infrastructure LOS*), variable pemeliharaan infrastruktur (*infrastructure maintenance*) dan variable respon dalam bentuk penyediaan sarana dalam penggunaan infrastruktur tersebut. Semua analisis variable ini akan dikaitkan dalam bingkai aspek *availability* (ketersediaan, sebaran), *reliability* (kondisi), *accessibility* (akses penggunaan), *sustainability* (dikaitkan dengan kemampuan pemda ataupun pihak swasta lain dalam menyediakan infrastruktur baru atau mempertahankan *level of service* dari infrastruktur yang telah ada).

Variabel tak bebas (*dependent variable*)

Variabel tak bebas ini meliputi segala ukuran dan besaran pembangunan sektor pertanian baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Perubahan ukuran dan besaran inilah yang akan dijadikan ukuran dampak. Kajian dampak pada sektor pertanian dilakukan dengan menggunakan kriteria intensifikasi dalam penggunaan faktor produksi, perubahan keragaan produksi, perubahan cara produksi, perubahan dalam level produktifitas,

pegeseran kontribusi ekonomi, dan pegeseran struktur ekonomi daerah, sebaran sasaran pasar dan perubahan komposisi barang yang dijual.

Variabel Pendukung

Variabel pendukung ini digunakan sebagai variable untuk mendapatkan informasi pendukung yang dibutuhkan sehingga studi ini menjadi lebih dapat menjelaskan dampak yang terjadi. Variable pendukung tersebut adalah :

Variabel Konteks

Variabel ini merupakan variabel mengenai karakteristik wilayah. Variabel ini dipandang penting mengingat dampak yang akan diukur sangat dipengaruhi oleh karakteristik dasar wilayah, seperti karakteristik geomorfologi, ekonomi, penduduk, pola APBD dan karakteristik-karakteristik lainnya.

Variabel Situasional

Variabel ini merupakan variabel tentang kebijakan yang diambil pemerintah, baik dalam tingkatan pemerintah daerah maupun level pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini merupakan kebijakan pertanian. Variabel ini dipandang perlu untuk dimasukkan ke dalam analisis mengingat dampak yang akan diukur juga sangat dipengaruhi oleh situasional kebijakan pembangunan pertanian yang diterapkan di wilayah studi pada kurun waktu analisis yang diambil dalam studi ini.

Tingkatan Analisis

Untuk memperoleh gambaran yang cukup representatif mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan sektor pertanian, maka studi ini akan dilakukan dalam dua tingkatan analisis, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Analisis makro adalah analisis yang dilakukan dengan skala analisis kabupaten dan lebih banyak didasarkan pada sediaan seri data sekunder. Dalam analisis makro ini, pendekatan yang diambil adalah pendekatan analisis sebelum dan sesudah (*before and after*). Analisis makro ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan umum mengenai pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor pertanian.

Selanjutnya, analisis mikro dilakukan dengan skala kecamatan/desa. Analisis ini didasarkan pada data sekunder dan juga data primer. Pendekatan yang diambil dalam analisis mikro ini adalah pendekatan sebelum dan sesudah (*before and after*) dan pendekatan dengan dan tanpa (*with and without*). Dalam analisis mikro ini, akan diambil dua wilayah studi di masing-masing kabupaten untuk memenuhi persyaratan pendekatan dengan dan tanpa (*with and without*), di mana kecamatan yang dipilih merupakan kecamatan yang memiliki karakteristik intervensi infrastruktur dan intervensi kebijakan pertanian yang berbeda.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini digunakan dua cara pencarian data, yaitu :

1. Untuk mendapatkan data primer, pengumpulan data dilakukan melalui :
 - o Observasi Visual: Ini dilakukan untuk melihat kondisi umum wilayah studi berikut ketersediaan infrastrukturnya dan kondisi sektor pertaniannya.
 - o Wawancara bebas dan wawancara semi terstruktur: Ini dilakukan kepada responden, baik itu dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah yang terkait. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi responden mengenai ketersediaan dan peran infrastruktur dalam menunjang kegiatan pertanian di wilayah studi.
2. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi literatur terhadap laporan-laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, buku-buku serta data statistik yang menunjang penelitian ini.

Teknik survey primer yang diambil adalah teknik sampling dimana tidak seluruh populasi disurvei, melainkan hanya beberapa dari populasi yang diambil informasinya. Hal tersebut dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan dana sedangkan jumlah populasi sasaran cukup besar. Jumlah sampel yang diambil teletak dalam batas validitas minimum secara statistik.

Perhitungan jumlah sampel didasarkan pada ukuran sampel yang digunakan pada penelitian dengan metode statistik parametrik, di mana jumlah sampel sebanyak:

$N < 30$ dianggap layak untuk jumlah populasi kecil
 $N \geq 30$ dianggap layak untuk jumlah populasi besar

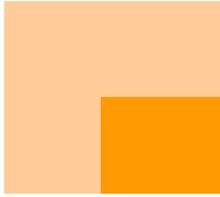
sehingga jumlah sampel yang diambil untuk setiap kecamatan yang dipilih adalah sebanyak 30 (tiga puluh) responden rumah tangga tani atau industri pertanian desa. Jumlah kecamatan yang dipilih sebanyak 4 (empat) kecamatan, sehingga total responden yang dipilih sebanyak 120 responden.

Sistematika Laporan

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan studi, yaitu :

- Bab 1** Bagian ini menguraikan latar belakang diangkatnya studi ini, rumusan persoalan yang akan dijawab dalam studi ini, maksud dan tujuan dilakukannya studi, batasan-batasan studi yang terangkum dalam lingkup pembahasan, metodologi studi dan sistematika laporan.

- Bab 2** Bagian ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka pembangunan infrastruktur dan dampaknya pada perkembangan sektor pertanian.
- Bab 3** Bagian ini menguraikan mengenai karakteristik umum wilayah studi beserta karakteristik penyediaan infrastruktur serta perkembangan sektor pertaniannya.
- Bab 4** Bagian ini menguraikan mengenai analisis dampak penyediaan infrastruktur terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah studi.
- Bab 5** Bagian ini menguraikan kesimpulan penelitian.



TINJAUAN PUSTAKA : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

Telah banyak penelitian tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan sektor pertanian dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang bersifat lokasional dan situasional serta sebagian besar diangkat dalam bingkai isu pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Telah banyak pula kesimpulan yang telah dibuat dari penelitian tersebut, baik yang sangat bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Kendati demikian, berangkat dari kenyataan tersebut, penelitian yang berbasis studi kasus masih sangat menarik dan menantang untuk dilakukan. Hal ini sangat terkait dengan masih adanya kemungkinan-kemungkinan ditemukannya hal-hal yang baru yang mungkin akan sangat berguna dalam memperkaya pengertian yang telah ada atau bahkan merekonstruksi pengertian yang didapat dari kesimpulan-kesimpulan umum yang telah dibuat sebelumnya.

Dari studi-studi yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia mengenai pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor pertanian, telah didapat suatu kesimpulan umum bahwa beragam jenis infrastruktur memberikan pengaruh yang berbeda dan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perkembangan sektor pertanian secara khusus serta perkembangan sosial dan perekonomian desa secara umum. Pengaruh dan peran penunjang tersebut seringkali diukur menggunakan besaran dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembangunan infrastruktur tersebut terhadap perubahan beberapa variabel tertentu di sektor pertanian, seperti kontribusi sektoral dalam PDRB, tingkat pendapatan petani, keragaan komoditas yang diproduksi dan diperdagangkan dan lain sebagainya.

Tingkatan analisis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Analisis makro dilakukan dalam konteks dan wilayah yang luas. Biasanya analisis ini dilakukan dengan lingkup wilayah suatu negara atau beberapa negara dengan penekanan substansi pada besaran ekonomi agregat. Sedangkan analisis mikro dilakukan dengan lingkup kajian desa atau beberapa desa dengan lingkup substansi yang lebih mendalam.

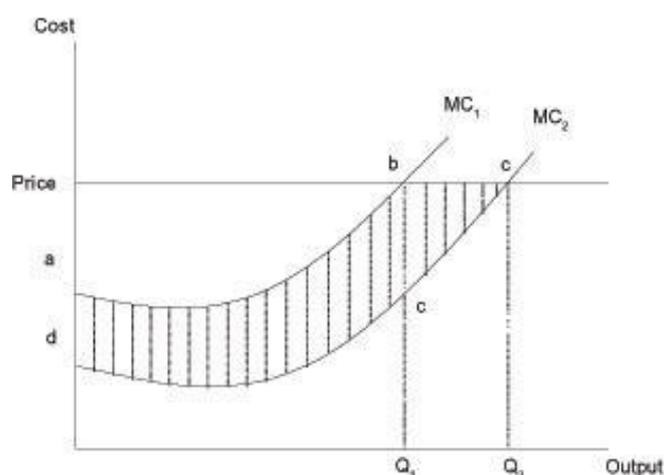
Secara umum, infrastruktur adalah physical and social overhead capital yang harus disediakan sebagai media layanan publik yang berfungsi memberikan lingkungan kondusif bagi berkembangnya kegiatan individu dan masyarakat. Berdasarkan pada jenisnya, infrastruktur didefinisikan dengan cukup beragam, mulai dari bentuk infrastruktur secara fisik sampai dengan bentuk infrastruktur secara non fisik. Namun demikian, dalam studi ini infrastruktur yang dibahas merupakan infrastruktur dalam bentuk fisik

sedang infrastruktur dalam bentuk non fisik didefinisikan bukan sebagai infrastruktur namun sebagai kondisi situasional dan kontekstual.

Berdasarkan aspek kegiatan, infrastruktur didefinisikan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang memberikan layanan secara langsung dalam bentuk fasilitasi bagi berjalannya kegiatan ekonomi dengan lebih baik dan meningkatkan produktifitas dari aset yang ada. Infrastruktur ekonomi ini antara lain infrastruktur transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, lembaga kredit desa, pasar untuk input dan output, fasilitas pergudangan dan penyimpanan. Sedangkan infrastruktur sosial adalah infrastruktur yang lebih berperan dalam menciptakan lingkungan berkegiatan manusia menjadi lebih baik dan memfasilitasi terjadinya pembentukan modal sumberdaya manusia yang lebih baik. Infrastruktur sosial ini antara lain: sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan pusat kegiatan budaya masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi, energi listrik, irigasi, pasar dan pergudangan, komunikasi dan informasi memberikan peran strategis namun tidak langsung pada proses pembangunan ekonomi. Tidak seperti pembangunan sektoral seperti pembangunan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur tidak secara langsung memberikan dampak berupa peningkatan output namun memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan output melalui peningkatan produktifitas dari faktor produksi yang digunakan, seperti lahan, tenaga kerja dan modal. Hal tersebut dapat dijelaskan secara sederhana melalui kurva pergeseran biaya marginal akibat pengaruh positif dari penghematan biaya berupa peningkatan kuantitas produksi dalam kondisi pasar yang kompetitif (lihat gambar 1). Dengan penyediaan infrastruktur, biaya marginal produk akan menurun. Hal ini terkait dengan penghematan yang terjadi. Tingkat produksi pada kurva MC_1 berada di titik Q_1 , kemudian dengan adanya intervensi infrastruktur kurva MC_2 bergeser sehingga pada tingkat harga yang tetap, tingkat produksi pada MC_2 berada di Q_2 , di mana $Q_2 > Q_1$. Secara langsung terlihat bahwa tingkat produksi meningkat pada tingkat harga pasar tetap (P). Kenyataan ini dapat diartikan sebagai meningkatnya produktifitas modal akibat dari adanya intervensi pembangunan infrastruktur. Perlu diketahui bahwa ilustrasi di atas sangat sederhana dan tidak memperhatikan aspek lain yang mungkin berpengaruh, seperti pola konsumsi masyarakat akan produk tersebut.

Gambar 1. Penyediaan Infrastruktur dan Efisiensi Produksi



Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan berkenaan dengan dampak pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan sektor pertanian akan dipaparkan dalam uraian berikut ini.

Analisis Makro

Banyak analisis makro yang telah dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan analisis sejarah mengenai peranan infrastruktur transportasi dalam proses pembangunan ekonomi. Kesimpulan umum yang didapat dari agregat analisis ini adalah bahwasannya pembangunan infrastruktur transportasi memberikan dampak positif yang nyata terhadap perkembangan ekonomi kendati dampak tersebut merupakan dampak tidak langsung dan secara relatif dalam jangka panjang. Analisis lain menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita penduduk (GNP) dengan volume barang dan penumpang. Kesimpulan yang didapat adalah bahwasannya pembangunan infrastruktur transportasi memberikan peran yang sangat penting dalam proses perkembangan ekonomi.

Dalam studi penelitian di 47 negara dunia ketiga tentang kaitan pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas didapatkan kesimpulan yang menyebutkan bahwasanya terdapat hubungan positif yang kuat antara pembangunan infrastruktur dan produktifitas pertanian agregat. Infrastruktur yang dibahas dalam studi tersebut adalah infrastruktur transportasi dan komunikasi.

Analisis agregat kedua adalah studi yang melibatkan data tahunan selama 10 tahun (1969-1978) dari 58 negara. Hasil penelitian ini mendapatkan korelasi positif dan nyata antara produksi agregat pertanian dan produksi agregat tanaman pangan dengan penyediaan infrastruktur jalan di masing-masing negara. Selain itu, disimpulkan pula bahwa elastisitas permintaan pupuk bagi sektor pertanian terhadap kepadatan jalan sangat tinggi, di mana infrastruktur jalan memberikan kontribusi langsung baik terhadap pertumbuhan output pertanian maupun penggunaan pupuk.

Analisis Mikro

Analisis mikro ini merupakan analisis yang dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil, berupa desa atau beberapa desa dengan lingkup substansi yang lebih mendalam, mulai dari indikator kualitatif hingga indikator kuantitatif.

Suatu penelitian menggunakan data di tingkat desa di Filipina dari tahun 1948 sampai dengan 1984 untuk memperkirakan efek dari investasi publik terhadap suplai output dan permintaan input di sektor pertanian. Investasi publik pada infrastruktur jalan disimpulkan memiliki efek positif terhadap output agregat dan penggunaan pupuk. Elastisitas produk pertanian terhadap penyediaan jalan positif sebesar 0,31, namun elastisitas produk pertanian memiliki elastisitas negatif terhadap penyediaan infrastruktur energi listrik.

Selanjutnya, salah satu penelitian lain memilih sampel sebanyak 130 desa dengan karakteristik agroklimat yang berbeda. Desa – desa ini dibagi

menjadi dua kelompok berdasarkan pada nilai indeks agregat aksesibilitas desa ke berbagai layanan infrastruktur, seperti pasar, sekolah, bank dan administrasi. Dari penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwasannya desa – desa dengan indeks aksesibilitas yang lebih baik ternyata memiliki produksi sektor pertanian, pendapatan rumah tangga, upah bagi buruh tani, tingkat kesehatan penduduk, dan tingkat partisipasi wanita lebih tinggi dari desa – desa dengan indeks aksesibilitas lebih rendah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan fakta bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dalam pemasaran produk – produk pertanian. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur memungkinkan petani mendapatkan harga yang agak tinggi untuk produk yang mereka hasilkan dan kemudahan untuk mendapatkan barang – barang konsumsi dan input dari pasar. Terkait dengan pasar lahan, kondisi pasar lahan di desa yang lebih terbangun infrastrukturnya lebih kompetitif, di mana nilai lahan mereka meningkat. Peningkatan nilai lahan ini bagi petani yang memiliki lahan sempit mendapatkan pilihan untuk menjualnya dan menggunakan hasil penjualan tersebut sebagai modal memulai kegiatan ekonomi di luar pertanian. Lain halnya dengan desa yang layanan infrastrukturnya lebih rendah. Para petani di desa tersebut lebih tidak memiliki pilihan untuk menjual lahannya dan berpindah ke sektor ekonomi lain, mereka tetap mengerjakan lahannya kendati jauh dari skala ekonomi yang optimal.

Di desa dengan tingkat pendapatan penduduknya rendah, pembangunan infrastruktur memberikan perbaikan akses ke lembaga kredit secara nyata, menggeser alokasi kredit dari kegiatan yang non produktif ke arah kegiatan yang produktif dan merangsang tumbuhnya lembaga keuangan non formal di desa. Selain itu, pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap penyebaran teknologi modern dan peningkatan tingkat tabungan sangat nyata terlihat akibat peningkatan pendapatan.

Sebuah penelitian dilakukan dengan menganalisis data dari 108 desa Indian selama rentang waktu 1966 – 1980 mengenai pengaruh listrik desa terhadap produktifitas pertanian dan penggunaan input. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa produktifitas pertanian meningkat dengan adanya penyediaan listrik desa melalui perbaikan sistem irigasi pompa. Selain itu, perbaikan dalam teknologi pemrosesan juga makin meningkat dengan adanya penyediaan listrik desa.

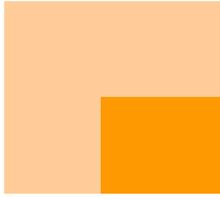
Penelitian lain juga dilakukan mengenai pengaruh penyediaan infrastruktur terhadap investasi di dan produksi di sektor pertanian. Kesimpulan yang didapat menyebutkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menambah output pertanian secara nyata. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur pendidikan dan permodalan (bank) memberikan pengaruh besar pada keputusan berinvestasi. Ketersediaan bank ini lebih memberikan pengaruh besar pada permintaan input dan produksi output daripada tingkat bunga. Selain itu, ketersediaan infrastruktur listrik disertai dengan peningkatan output pertanian merangsang pertumbuhan kegiatan pengolahan output di wilayah yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat pula interaksi antara infrastruktur dengan sektor pertanian yang ternyata memberikan efek yang simultan.

Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1986 menyebutkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur transportasi

memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pertanian dalam bentuk produksi yang lebih tinggi, transformasi jenis produk pertanian yang bernilai rendah ke produk pertanian yang bernilai tinggi, meningkatkan penggunaan input yang lebih modern, khususnya pupuk.

Pembangunan infrastruktur transportasi di pedesaan secara langsung memberikan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan wilayah desa, di mana peningkatan mobilitas dan produktifitas sumberdaya. Infrastruktur transportasi menghemat waktu dan menurunkan biaya transportasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur transport di pedesaan ini memperkuat hubungan dengan kawasan ekonomi lain. Dampak lebih jauhnya bersama infrastruktur irigasi adalah akan merangsang petania untuk mengadopsi teknologi dan bibit baru dengan tereduksinya biaya input dan biaya pemasaran output. Selain itu juga akan meningkatkan kemungkinan tumbuhnya kegiatan diluar sektor pertanian. Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi memberikan peran yang sangat penting dalam memperluas pasar bagi produk dan input, pengurangan biaya pemasaran dari produk pertanian. Hal ini pada giliran selanjutnya akan merangsang peningkatan keragaan komoditas.

Proyek pembangunan irigasi disamping memberikan dampak berupa pertambahan ouput pertanian juga menciptakan beberapa eksternalitas dalam bentuk teraturinya pola air dan perbaikan terhadap penurunan kualitas lingkungan.



Perspektif Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Perkembangan Sektor Pertanian di Wilayah Studi

Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintahan Kota Administratif Tasikmalaya terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975. Wilayah Kota Administratif tersebut meliputi wilayah Kecamatan Cipedes, Cihideung, dan Tawang, yang mana secara keseluruhan mencakup 15 kelurahan. Wilayah kota administratif ini masih berada di dalam otoritas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Setelah lebih dari 25 tahun Kotif Tasikmalaya berdiri, perkembangan yang ada mengarah pada makin intensif dan makin kompleksnya kegiatan perkotaan. Oleh karenanya, Pemerintah memberikan peningkatan status pada Kotif Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 2001. Wilayah Kota Tasikmalaya juga diperluas menjadi wilayah kota administratif lama ditambah dengan wilayah Kecamatan Indihiang, Kawalu, Mangkubumi, Cibeureum, dan Tamansari. Dengan dibentuknya Kota Tasikmalaya ini, maka pemerintahan kota telah terpisah sama sekali dengan pemerintahan kabupaten.

Gambaran Fisik Dasar

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Tasikmalaya termasuk Kawasan Andalan Priangan Timur. Posisi geografis wilayah Kabupaten Tasikmalaya terletak di bagian Tenggara wilayah Jawa Barat. Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab.Majalengka, Kabupaten Ciamis, dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 2.563,35 km². Jarak bentang terjauh dari utara ke selatan adalah 75 km, sementara jarak bentang terjauh arah barat ke timur 56,25 km. Posisi koordinat seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada di antara 07°10'00" - 07°49'00" Lintang Selatan dan 107°08'00" - 108°00'00" Bujur Timur.

Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson (1951) yang didasarkan atas pertimbangan banyaknya bulan basah (>200 mm) dan bulan kering (<100) tipe curah hujan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya digolongkan ke dalam tipe curah hujan C, yang memiliki 4 bulan kering dan 8 bulan basah. Sedangkan berdasarkan klasifikasi iklim

Mohr, wilayah Kabupaten Tasikmalaya termasuk ke dalam klasifikasi iklim II, sementara menurut klasifikasi Oldeman yang lebih spesifik pada gambaran untuk iklim pertanian termasuk ke dalam zone agroklimat I A. Kelembaban udara bervariasi antara 83% sampai 86%, dengan penyinaran sinar matahari terlama terjadi pada bulan Juni hingga mencapai 94%. Suhu udara terendah 18°C dan suhu udara tertinggi mencapai 34°C. Kisaran suhu pada dataran rendah berkisar 20° - 34°C dan suhu pada dataran tinggi 18° - 22°C. Kecepatan angin berkisar antara 2 – 6 knot. Curah hujan rata-rata mencapai 2.072 mm/tahun, dengan jumlah hujan rata-rata 82 hari per tahun.

Secara regional, geologi daerah Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh batuan vulkanik, batuan intrusi, serta batuan dasar lainnya, termasuk diantaranya adalah batuan sedimen. Proses pembentukan batuan wilayah Tasikmalaya merupakan bagian dari pembentukan batuan Pegunungan Selatan Jawa Barat yang membentang dari barat ke timur, mulai dari Teluk Pelabuhan Ratu hingga Pulau Nusakambangan. Erat dengan kondisi geologi daerahnya, batuan yang terbentuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam kategori batuan tua yaitu batuan tersier. Berkaitan dengan jenis batuan tersebut, jenis tanah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh mediteran, latosol, dan aluvial.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terletak pada ketinggian 0 – 3000 m dpl. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah berbukit dengan ketinggian antara 200 – 700 m dpl. Sebagai ilustrasi, wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 m dpl hanya menempati proporsi 13,05%. Wilayah ini terkonsentrasi di wilayah garis Pantai Cipatujah sampai ke wilayah Pantai Cikalong dan sebagian besar wilayah Tasikmalaya bagian tengah dan utara.

Sementara wilayah dengan ketinggian sedang (200 – 500 m dpl) berada di wilayah Tasikmalaya bagian tengah dan selatan dengan proporsi 53,64%. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 m dpl mencapai proporsi 33,31% terkonsentrasi di bagian tengah dan sedikit bagian utara.

Berdasarkan kondisi fisik dan topografi, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibagi ke dalam tiga zona, yaitu zona wilayah dengan topografi datar, zona wilayah dengan topografi berbukit, dan zona maritim.

Zona pertama merupakan wilayah dengan topografi datar. Wilayah ini terletak di bagian utara. Wilayah dataran merupakan dasar lekukan terendah dari punggung pegunungan Pulau Jawa. Wilayah ini berhadapan dengan wilayah tangkapan hujan di sebelah barat, yakni berupa "sepuluh ribu bukit" yang membentuk tapal kuda dengan puncaknya Gunung Galunggung. Dengan demikian wilayah ini memiliki cukup air, baik di permukaan maupun di bawah permukaan tanah yang mengalir ke wilayah dataran. Kondisi seperti ini menjadikan wilayah dataran Tasikmalaya, termasuk didalamnya wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, terdiri dari lahan-lahan yang relatif subur dan memiliki cukup sumber air, sehingga sangat ideal untuk budidaya pertanian dan perikanan darat.

Zona kedua adalah wilayah topografi berbukit dan pegunungan, terletak di bagian selatan. Wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan yang cukup tajam, yang visual terdiri dari lahan-lahan yang berlereng terjal dan curam, sehingga mudah terjadi pergeseran lahan dan longsor. Di beberapa tempat

zona ini merupakan wilayah yang labil yang dapat menimbulkan patahan dan longsor di permukaan. Konsekuensi dari lahan-lahan yang memiliki kemiringan cukup tajam adalah rawan erosi dan sangat rentan terhadap pembentukan lahan-lahan kritis. Berkaitan dengan hal tersebut zona kedua ini relatif kurang subur apabila dibandingkan dengan kondisi lahan yang berada di zona dataran banyak utara (zona pertama). Aktivitas pertanian di wilayah ini kurang cocok untuk pengembangan tanaman pangan semusim karena pasokan air tidak menentu. Zona kedua ini lebih tepat untuk pengembangan komoditas perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Konsekuensi lain dari kondisi wilayah topografi berbukit adalah investasi yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur dasar lebih mahal apabila dibandingkan dengan pengembangan infrastruktur di wilayah dataran.

Zona ketiga merupakan zona maritim yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Secara administratif wilayah maritim meliputi Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, dan Cikalong. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 wilayah perairan laut kabupaten dihitung 4 mil laut dari garis batas pantai, maka dengan perhitungan tersebut zona maritim Kabupaten Tasikmalaya meliputi area 325,79 km². Zona maritim Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari perairan laut Jawa Barat bagian Selatan yang merupakan daerah *fishing ground* dan daerah lintasan migrasi bagi *blue fin* tuna dan juga sebagai daerah *up welling* (pertemuan arus). Oleh karenanya, zona ini mengandung potensi ekonomi yang sangat besar berupa kekayaan laut berupa ikan yang dapat dimanfaatkan melalui aktivitas berupa penangkapan dan budidaya perikanan. Kegiatan penangkapan dapat dilakukan di sepanjang pantai (*in-shore*), laut lepas (*off-shore*), dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Gambaran Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya setelah terbagi menjadi dua daerah otonom pada tahun 2001 (Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya) adalah sebesar 1.565.906 jiwa, terdiri dari 778.553 jiwa laki-laki dan 787.373 jiwa perempuan, laju pertumbuhan mencapai 1,28 %, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 2.921.295. Dari 1,5 Juta jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya, Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 608.650 jiwa dan jumlah pengangguran terbuka sebesar 34.464 jiwa. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 41 % dari angkatan kerja di Tasikmalaya.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, Kabupaten Tasikmalaya setelah terbagi menjadi dua daerah otonom melorot tajam dari 66,80 menjadi hanya sekitar 57 – 58. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya dari sensus tahun 1971 ke sensus tahun 1980 sebesar 2,17%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk periode tahun 1980 – 1990 menjadi 1,31%. Berdasarkan perhitungan selama periode tahun 1990 – 1995 menurun menjadi 1,28% rata-rata per tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif terkendali apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional pada periode tahun 1990 – 1996 yang mencapai angka 1,98%. Jika dilihat dari umur, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh penduduk berumur produktif, yaitu antara 15

tahun – 64 tahun, yaitu 67,43% dari total penduduk yang ada. Struktur penduduk seperti ini memberikan potensi yang sangat baik bagi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah laju pertumbuhan penduduk alamiah, artinya dominan dipengaruhi oleh angka fertilitas dan mortalitas. Sementara faktor migrasi dapat diabaikan sehubungan dengan Tasikmalaya bukan termasuk kawasan industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, Kabupaten Tasikmalaya juga bukan daerah minus sehingga menjadi faktor pendorong (*push factor*) bagi penduduknya untuk beremigrasi keluar daerah.

Secara alamiah, penyebaran penduduk dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam yang secara langsung dapat menunjang kehidupan manusia. Lahan-lahan subur, daerah pantai yang landai, tepian sungai, dan sekitar sumber air cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, selain kondisi alamiah yang telah disebutkan, prasarana dan sarana yang bersifat artifisial seperti fasilitas pendidikan, perekonomian, sosial, pusat pemerintahan, dan lain sebagainya juga memberikan pengaruh yang nyata pada pola penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kondisi ini berlaku pula pada penyebaran penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang tidak merata ke seluruh wilayah. Beberapa kecamatan yang termasuk padat penduduknya (tahun 2001) antara lain: Kecamatan Singaparna (3019 jiwa/km²) dan Kecamatan Rajapolah (2583 jiwa/km²), Sedangkan kecamatan yang termasuk tidak padat penduduk (2001) antara lain Kecamatan Pancatengah (198 jiwa/km²) dan Kecamatan Cipatujah (244 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001 mencapai 611 jiwa/km².

Kepadatan penduduk wilayah Tasikmalaya bagian Selatan lebih kecil apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di wilayah Tasikmalaya bagian utara dan tengah. Hal ini disebabkan Tasikmalaya bagian utara memiliki lahan yang relatif lebih subur, serta menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi wilayah.

Gambaran Perekonomian

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil tahun 2000 yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan 1993 mengalami peningkatan sebesar 2.36% dari Rp. 1,937 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp. 1,982 triliun pada tahun 2000. Hal ini berarti terjadi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi riil sebesar 2.36% setelah mengeliminir pengaruh fluktuasi harga. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 8.76% dari Rp. 4,629 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp. 5,034 triliun pada tahun 2000. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak menggambarkan peningkatan produksi riil secara agregat karena angka tersebut sangat dipengaruhi oleh kumulatif inflasi sebesar 1,80% pada tahun 2000 yang masih jauh lebih rendah dari kumulatif inflasi pada tahun 1998 yang menembus angka 73,55%.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.621.885,27 atau setara dengan US\$ 349,58 (1 US\$ = Rp. 7500,-). Dengan pendapatan per kapita sebesar itu, maka Kabupaten Tasikmalaya

masih dikategorikan sebagai daerah yang belum makmur walaupun masih besar dari rata-rata pendapatan per kapita nasional yang hanya sebesar kurang lebih US\$ 275. Dengan asumsi besar rata-rata keluarga sebesar 4 jiwa, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan per keluarga sebesar Rp. 10.875.541 per tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga konstan 1993 pada periode sebelum krisis (1993-1996) mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,76%, kemudian berkurang pada tahun 1997 dan berkontraksi tajam pada tahun 1998 sebesar 17,12%. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan ekonomi mulai menampakkan kenaikan, yaitu sebesar 1,64% dan terus meningkat pada tahun 2000 hingga mencapai 2,36%.

Struktur perekonomian pada tahun 2000 didominasi oleh sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 27,41 % dari total pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, disusul oleh sektor perdagangan sebesar 27,26%. Pada puncak krisis ekonomi tahun 1998, sektor perdagangan merupakan sektor dominan di mana kontribusi sektoralnya mencapai 27,62% sedang sektor pertanian hanya memberikan kontribusi sebesar 27,49%. Bila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, saat krisis ekonomi terjadi, sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya berkontraksi sebesar 20,96%, sedangkan sektor perdagangan hanya berkontraksi sebesar 3,32%.

Sektor industri di Kabupaten Tasikmalaya tidak memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian daerah. Sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 8,74% pada tahun 2000. Dalam tatanan pengembangan industri Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya tidak termasuk kategori wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan industri manufaktur. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya adalah industri kecil dan menengah non migas.

Gambaran Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian

Penyediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh 3 (tiga) tingkatan kewenangan pemerintahan, yaitu tingkat pemerintah pusat, tingkat pemerintah propinsi dan tingkat pemerintah kabupaten.

Panjang jalan total yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan grafik yang fluktuatif, yang mana pada tahun 1990 panjang jalan telah mencapai 1.110,836 km dan pada tahun 2000 panjang jalan mencapai 1.318,248 km. Dari panjang jalan yang tersedia pada tahun 2000, 84,80%-nya merupakan jalan kabupaten.

Proporsi jalan kabupaten pada tahun 1990 hanya sebesar 75,16%. Dari data tersebut, terlihat bahwa jalan kabupaten cenderung bertambah kendati bila dilihat pertahun penyediaan tersebut cukup fluktuatif. Jalan propinsi merupakan proporsi kedua terbesar sepanjang 10 tahun tersebut, sedangkan jalan negara tercatat baru dibangun di Kabupaten Tasikmalaya ini mulai tahun 1996 yang hanya mencapai 1,67% dan cenderung tetap

cenderung turun hingga mencapai 1,58% pada tahun 2000. Kemungkinan yang ada mengenai penurunan proporsi panjang jalan negara adalah adanya perubahan status jalan dari jalan negara menjadi jalan kabupaten.

Sebaran jalan di Kabupaten Tasikmalaya belum merata, di mana di suatu lokasi telah tersedia infrastruktur jalan yang baik, sedang di lokasi lain belum tersedia secara mencukupi. Bila dikaitkan dengan kondisi geomorfologi Kabupaten Tasikmalaya ini, terlihat bahwa infrastruktur jalan ini tersedia banyak di daerah utara, di mana Kota Tasikmalaya berada (Zona 1). Sebaliknya, sebaran panjang jalan yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya masih dikatakan belum optimum akibat geomorfologi zona tersebut yang berbukit dan terjal. Wilayah selatan ini merupakan tempat di mana zona 2 dan zona 3 berada.

Bila dilihat dari jenis perkerasan, fisik jalan yang dibangun di daerah studi didominasi oleh jalan dengan perkerasan permukaan aspal dan dengan kondisi rusak. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik cenderung menurun dari 43,7% pada tahun 1990 menjadi hanya 23,5% pada tahun 2000. Seiring dengan itu, proporsi panjang jalan dengan kondisi rusak memperlihatkan kecenderungan meningkat dari 10,98% pada tahun 1990 menjadi 40,57% di tahun 2000.

Bila dikaitkan dengan besarnya anggaran untuk sektor transportasi yang dialokasikan oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya ternyata penurunan kondisi jalan tersebut salah satunya disebabkan oleh kecenderungan makin menurunnya pula alokasi anggaran untuk sektor transportasi, baik itu untuk penambahan baru, peningkatan layanan atau mempertahankan layanan yang telah ada.

Pengguna infrastruktur listrik masih didominasi oleh kegiatan rumah tangga, yang mana dari tahun ke tahun tetap mendominasi. Proporsi penggunaan listrik untuk kegiatan rumah tangga mencapai 93,7% pada tahun 1990 mencapai 94,7% pada tahun 2000. Penggunaan listrik untuk kegiatan lain rata-rata berada di bawah 5 %. Penggunaan untuk industri hanya mencapai 0,1% dari total penggunaan listrik.

Cakupan infastruktur irigasi dilihat berdasarkan luasan lahan yang dilayani. Di Kabupaten Tasikmalaya, total luas lahan berpengairan hingga tahun 2000 berjumlah sebesar 429.210 Ha. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan lahan dengan sistem pengairan sederhana/pengairan desa yang dibangun bukan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 65%, sedangkan untuk sistem pengairan yang dibangun oleh pemerintah hanya mencakup 20% untuk pengairan teknis, 9% setengah teknis dan 6% pengairan sederhana yang dibangun pemerintah.

Perkembangan luasan lahan dengan irigasi teknis dari tahun 1990 hingga tahun 2000 cenderung naik, namun dengan peningkatan yang sangat kecil. Hal tersebut terlihat dari luasan lahan irigasi yang sebesar 6.913 Ha pada tahun 1990 dan hanya meningkat menjadi 8.917 Ha pada tahun 2000. Sistem pengairan yang meningkat dengan cukup besar adalah sistem pengairan sederhana yang dibangun pemerintah, yaitu dari hanya 1.584 Ha pada tahun 1990 meningkat menjadi 3.761 Ha.

Gambaran Perkembangan Sektor Pertanian

Secara umum, dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Tasikmalaya masih merupakan sektor utama kendati kontribusi sektoral yang diberikan sektor ini dari tahun ke tahun relatif menurun. Kontribusi sektoral sebesar 30,14 % pada tahun 1990 menurun hingga 27,41% di tahun 2000 kendati secara relatif nilainya meningkat, yaitu dari Rp. 304.462,18 juta pada tahun 1990 menjadi 1.380.291 juta pada tahun 2000. Penurunan ini diikuti dengan kenaikan kontribusi sektoral sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pergeseran antar sektor ekonomi di dalam suatu wilayah merupakan hal yang memang seringkali terjadi. Pergeseran tersebut merupakan suatu respon dari perekonomian terhadap suatu perkembangan keadaan. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat, dan peningkatan tersebut terlihat makin kuat pada tahun 1998, tahun di mana saat itu perekonomian nasional sedang mengalami krisis. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Hal ini diperkuat dari kenyataan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 1998 tersebut hanya berkontraksi sebesar 3,32% dibanding dengan sektor pertanian yang berkontraksi sebesar 20,96%.

Kecenderungan yang ada kedepan terlihat bahwa sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, restoran akan menjadi dua sektor utama di Kabupaten Garut. Sektor industri yang didominasi oleh industri kecil dan menengah terlihat tidak mengalami kontraksi yang berarti selama krisis ekonomi pada tahun 1998.

Sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya meliputi sub sektor sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan (darat dan laut). Dalam sektor pertanian tersebut, kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan merupakan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 69,5% pada tahun 1990 dan 77,6% pada tahun 2000 (PDRB atas harga berlaku) dari total PDRB sektor pertanian. Sedangkan sub sektor kehutanan merupakan sub sektor yang paling kecil memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sektor pertanian, yang mana kontribusinya sejak tahun 1990 hingga tahun 2000 tetap kurang dari 2%. Dari grafik di bawah terlihat bahwa sub sektor tanaman pangan merupakan sub sektor dominan dalam dalam sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Sub sektor tanaman pangan ini meliputi kegiatan produksi padi (sawah dan ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan.

Luasan panen dan besar produksi aneka komoditi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh tanaman padi sawah. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan bertani lahan basah masih merupakan kegiatan bertani sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, selama rentang waktu pemelitan ini tidak terlihat adanya pergeseran komoditas pertanian yang nyata. Secara lokasi, luasan panen dan produksi padi sawah terbesar pada tahun 1990 berada di Kecamatan Ciawi dengan luas panen sebesar 6.804 Ha dan produksi sebesar 38.837 ton. Sedangkan pada tahun

2000, berada di Kecamatan Bantarkalong dengan luasan panen sebesar 5.860 dan produksi sebesar 43.033 ton.

Luasan panen komoditi selain padi sawah relatif tidak berfluktuatif, hanya luasan panen komoditas padi sawah saja yang fluktuatif. Begitu pula dengan besar produksi, jumlah produksi padi sawah sangat berfluktuatif dan fluktuasi tersebut terjadi seiring dengan fluktuasi luasan panen, sehingga dari dua data ini dapat dikatakan bahwa produktifitas pertanian padi sawah cenderung tetap. Hal ini pun terlihat dari data yang ada, yang mana produktifitas tertinggi komoditas padi sawah pada tahun 1990 sebesar 5,7 ton/Ha di Kecamatan Ciawi menjadi 5,9 ton/Ha pada tahun 2000 di Kecamatan Salawu.

Selain komoditas padi sawah, komoditas bahan pangan lain yang menunjukkan produksi dominan adalah komoditas ubi kayu dan sayuran yang mana peningkatan nyata terlihat pada komoditas sayuran saat memasuki tahun 2000.

Kebijakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis, dan agroindustri melalui diversifikasi produk dan usaha, pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan kompetensi ekonomi lokal. Selain itu, kebijakan lain yang diambil adalah pengembangan budidaya pertanian, pengelolaan lahan-lahan pertanian kurang produktif, dan perlindungan tanaman. (Strategi Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2000). Lebih jauh, strategi dasar pengembangan sektor agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya dimulai dengan pengembangan sektor pertanian yaitu: Pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan agribisnis, berbasiskan pada usaha tani lahan kering, yang berwawasan lingkungan.

Kabupaten Garut

Kabupaten Garut lahir pada tanggal 17 Maret 1813 M berdasarkan beskit Gubernur Jenderal Maschalk Daendels tanggal 16 Februari 1813 dengan bupati pertama R.AA Adiwidjaya, awalnya kabupaten Garut bernama kabupaten Balubur Limbangan. Saat ini kabupaten Garut terdiri dari 40 kecamatan dan 410 desa dan kelurahan.

Gambaran Fisik Dasar

Secara geografis Kabupaten Garut terletak pada 07°00'00" - 07°46'36" LS dan 107°30'00" - 108°05'00" BT. Jarak dari pusat kota Garut ke ibukota negara 239 km dan jarak ke ibukota propinsi 63 km. Daerah Garut termasuk daerah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dengan ketinggian rata-rata 705 s.d 750 diatas permukaan laut, beriklim tropis agak basah (tipe C) dengan dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.589 mm dan bulan basah 9 bulan, bulan kering 3 bulan dan suhu udara rata-rata 29°C Derajat Celcius. Luas daerah Kabupaten Garut adalah 306.519 Ha atau 3.065,19 Km² atau sebesar 6,94 % dari wilayah Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Garut meliputi 31 kecamatan dan 403 desa yang dibatasi oleh:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang

- Sebelah Selatan dengan Pantai Samudra Indonesia
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung
- Dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya

Wilayah Garut Utara umumnya terdiri dari daratan tinggi di sertai pegunungan dan bukit-bukit yang keadaannya cukup kritis terutama sepanjang aliran sungai Cimanuk. Wilayah Garut Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan relatif curam dan dialiri 19 sungai ke arah selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Kondisi daerah wilayah Garut Selatan merupakan daerah labil. Kondisi seperti ini membuat Kabupaten Garut merupakan wilayah yang rawan bencana alam dan rentan terhadap gempa pergerakan tanah.

Pola curah hujan di wilayah Kabupaten DT II Garut sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi. Pada daerah sepanjang pantai selatan curah hujan rata-rata antara 2500 mm - 3000 mm/tahun. Daerah-daerah yang terletak disebelah utara dari daerah tersebut di atas rata-rata mendapat curah hujan yang jumlahnya masih meningkat menjadi lebih 4000 mm/tahun, sampai ke daerah di sekitar punggung yang menghubungkan puncak gunung papandayan dengan gunung mandalawangi. Sedangkan daerah dengan jumlah rata-rata curah hujan tertinggi adalah pamegatan di Kecamatan Cikajang (4.228 mm/tahun)

Kondisi Geologis di Wilayah Kabupaten Garut terdiri atas tanah Sedimen hasil letusan Gunung Berapi Papandayan dan Gunung Guntur dengan bahan induk batuan tuf dan batuan yang mengandung kwarsa. Di sepanjang aliran sungai pada umumnya banyak berbentuk jenis-jenis tanah alluvial yang merupakan hasil sedimentasi tanah akibat erosi tanah dibagian hulu atau sekitarnya oleh proses pengikisan dan pencucian permukaan tanah. Jenis tanah kompleks podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian yang paling luas terutama di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara didominasi tanah andosol yang memberikan peluang terhadap potensi usaha sayur-mayur.

Penggunaan lahan yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan mencapai 95,20% dari total luas wilayah, dengan perincian lahan sawah, tanaman pangan lahan kering (tegalan dan kebun campuran), lahan perkebunan dan lahan kehutanan. Sedangkan sisanya sebesar kurang lebih 4,80% digunakan untuk permukiman, industri dan lingkungan binaan lainnya

Gambaran Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2000 berjumlah 2.051.092 jiwa menurut sensus tahun 2000 terdiri dari 1.043.242 orang laki-laki dan 1.007.850 orang perempuan dengan tingkat kepadatan sebesar 686 orang/km² dan tingkat pertumbuhan 1,658% pertahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut adalah laju pertumbuhan penduduk alamiah, artinya dominan dipengaruhi oleh angka fertilitas dan mortalitas. Sementara faktor migrasi dapat diabaikan sehubungan dengan Kabupaten Garut bukan termasuk kawasan industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, Kabupaten Garut juga bukan daerah minus sehingga menjadi faktor pendorong (push factor) bagi penduduknya untuk bermigrasi keluar daerah.

Secara alamiah, penyebaran penduduk dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam yang secara langsung dapat menunjang kehidupan manusia. Lahan-lahan subur, daerah pantai yang landai, tepian sungai, dan sekitar sumber air cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, selain kondisi alamiah yang telah disebutkan, prasarana dan sarana yang bersifat artifisial seperti fasilitas pendidikan, perekonomian, sosial, pusat pemerintahan, dan lain sebagainya juga memberikan pengaruh yang nyata pada pola penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kondisi ini berlaku pula pada penyebaran penduduk Kabupaten Garut yang tidak merata ke seluruh wilayah yang mana penduduk kabupaten Garut yang tersebar di wilayah perkotaan sebanyak 579.773 orang (28,3%) dan sebanyak 1.471.319 orang (71,7%) tersebar di pedesaan.

Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat adalah kecamatan Garut Kota dengan 133.390 jiwa, Tarogong 131.805 jiwa dan Samarang 113.457 jiwa. Kecamatan ini pula yang mengalami penambahan penduduk terbanyak, yaitu masing-masing 445 jiwa, 331 jiwa dan 297 jiwa per tahun. Dapatlah dipahami bahwa di Kecamatan Garut Kota dan Tarogong sebagai pusat kota kabupaten Garut mengalami penambahan penduduk terbanyak karena daya tarik tempat tinggal yang berada tidak jauh dari pusat kota dengan segala fasilitas yang dimiliki.

Khusus untuk penduduk yang memutuskan untuk memilih bertempat tinggal di sekitar Kecamatan Garut kota, diperoleh data bahwa pada umumnya mereka memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, seperti para pegawai pemerintah, para pengusaha dan wiraswasta. Kaitannya dengan status sosial dan ekonomi, mereka relatif lebih mampu memiliki rumah tempat tinggal dekat pusat kota (yang rata-rata harga rumah/tempat tinggal relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang di pinggir kota). Karena status ekonomi pula, mereka cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan pusat belanja dan pusat hiburan, yang seperti diketahui lebih banyak berada di pusat kota dimana mereka tinggal.

Berdasarkan mata pencaharian tahun 2001, persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 42,56%. Jumlah ini merupakan proporsi terbesar. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri adalah sebesar 5,45% dan untuk sektor perdagangan dan jasa sebesar 33,38% serta 81,39 tidak termasuk ketiga sektor di atas. Dari informasi ini secara langsung dapat dilihat bahwa struktur lapangan kerja penduduk di Kabupaten ini masih didominasi dengan kegiatan ekonomi ekstraktif dan jasa. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 sebanyak 875.083 orang dimana yang telah bekerja berjumlah 823.875 orang dan pencari kerja sebanyak 51.208 orang.

Gambaran Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Garut pada tahun 2000 adalah sebesar 3,89% lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar

2,52%. Pendapatan per kapita riil penduduk Kabupaten Garut selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat dengan peningkatan yang sangat kecil. Selain itu, pendapatan perkapita riil ini sempat tumbuh negative selama krisis ekonomi tersebut. Krisis ekonomi ini pada tahun 1998 telah menyebabkan pertumbuhan negatif sebesar -15,63% terhadap total pendapatan per kapita penduduk. Namun demikian, pertumbuhan positif kendati kecil sebesar 0,37 % dan 1,69 terjadi masing-masing pada tahun 1999 dan tahun 2000.

Sektor pertanian senantiasa menjadi kontributor terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut yaitu sebesar 40,59%. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama kegiatan ekonomi. Sektor kedua dominan di Kabupaten Garut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor industri relatif tidak memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian secara keseluruhan.

Perkembangan yang menarik selama rentang waktu studi ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, restoran cenderung berkembang secara konvergen. Pada tahun 1990, sektor pertanian merupakan sektor utama dengan besar kontribusi hampir mendekati 50%, tepatnya 49,13%. Pada tahun yang sama, sektor perdagangan hanya memberikan kontribusi sebesar 20,03%. Seiring dengan perkembangan waktu, sektor pertanian cenderung terus menurun kontribusinya hingga awal tahun 1997 di mana merupakan awal terjadinya krisis ekonomi yang menerpa perekonomian nasional. Namun demikian, krisis yang terjadi malah memberikan dorongan bagi perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Garut ini, yang mana terlihat bahwa pada tahun 1998 terjadi semacam titik balik, sektor pertanian kembali meningkat kontribusinya secara signifikan hingga tahun 1999 dan cenderung tetap hingga tahun 2000.

Lain halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, kontribusi sektor ini terhadap PDRB cenderung terus meningkat hingga tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi tampaknya membuat pertumbuhan sektor ini menjadi stagnan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektoral yang cenderung tetap dari tahun 1997 hingga tahun 2000.

Sektor industri di Kabupaten Garut tidak memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian daerah. Sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 5,6% pada tahun 1990 menjadi 8,5% pada tahun 2000. Kendati demikian, kecenderungan yang ada memperlihatkan bahwa sektor industri di Kabupaten Garut terus mengalami perkembangan yang nyata, baik secara absolute maupun secara relatif.

Nilai ekspor kabupaten Garut antara tahun 1995 sampai dengan 2001 bersifat fluktuatif, akan tetapi jumlah negara tujuan cenderung bertambah. Dilihat dari jenis komoditi yang diekspor di antaranya adalah teh (hitam dan hijau), karet, jaket kulit, kulit olahan, kain sutera, bulu mata palsu, minyak akar wangi, dan minyak nilam. Adapun negara tujuan ekspor tahun 2000 sebanyak 21 Negara yaitu; Inggris, Belanda, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Kanada, Thailand, Malaysia, Hongkong, India, Swiss, Italia, Taiwan, dan Vietnam.

Gambaran Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian

Kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut diarahkan pada konsep :

1. Infrastruktur tidak hanya untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru
2. Pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik akan efektif apabila :
 - a. Mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha atau investasi baru yang dapat memacu perkembangan ekonomi wilayah
 - b. Mampu menunjang pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat banyak
 - c. Sesuai dengan kebutuhan/kepentingan publik
3. Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak pelaku agribisnis dan mampu merangsang para investor untuk melakukan usaha agribisnis, seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, pelabuhan, transportasi, dan telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik dan telepon di Kabupaten Garut relatif baik, namun penyebaran sarana tersebut belum merata, wilayah Kabupaten Garut bagian selatan relatif masih tertinggal dibanding pembangunan infrastruktur di wilayah

Kabupaten Garut bagian utara, padahal luas areal wilayah Garut bagian selatan merupakan 60% dari luas keseluruhan Kabupaten Garut dan merupakan basis pertanian utama.

Wilayah kabupaten Garut bagian Utara lahannya relatif stabil dibanding wilayah selatan, di samping itu memiliki akses terhadap jalan negara dan propinsi yang merupakan jalan penghubung antar kabupaten dan antar propinsi, sedangkan wilayah selatan akses tersebut masih sangat sulit.

Wilayah Kabupaten Garut sebagian besar merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam, karena kondisi geografis yang berbukit-bukit dan dikelilingi pegunungan sehingga pembangunan infrastruktur pertanian menjadi lebih sulit.

Berikut adalah uraian singkat mengenai gambaran infrastruktur pertanian di Kabupaten Garut.

Jaringan Jalan

Sampai dengan tahun 2001 panjang jalan di Kabupaten Garut adalah 1.139,59 km, terdiri dari jalan negara sepanjang 30,08 km, jalan propinsi 274,43 km dan jalan kabupaten sepanjang 835,08 km. Penulis belum mendapatkan data mengenai jalan desa termasuk jalan yang masuk dalam pelaksanaan jalan non status Lintas Jabar Selatan baik volumenya maupun kondisinya.

Jalan kabupaten tersebut terdiri dari jenis permukaan hotmix sepanjang 42,10 km (5,04%) diaspal (penetrasi) 539.83 (64.64%), kerikil 230,2 km (27,57%), dan jalan tanah sepanjang 22,95 km (2.75%). Kondisi jalan kabupaten di kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Kondisi baik sepanjang 209.39 km (25.07%), kondisi sedang 351.64 km (42.11%), kondisi rusak 199.1km (23.84%), dan kondisi sangat rusak sepanjang 74.95 km (8,98%). Adapun kelas Jalan Kabupaten tersebut adalah, kelas 3A sepanjang 626,31 km atau 75% sedangkan kelas 3B sepanjang 208,77 atau 25%.

Jaringan jalan tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti dari tahun ke tahun terutama beberapa tahun terakhir karena kondisi keuangan pemerintah yang semakin terbatas. Kemampuan pemerintah saat ini hanya untuk memelihara sebagian jalan yang ada, selebihnya diserahkan kepada swadaya masyarakat.

Jaringan irigasi

Daerah Aliran Sungai (DAS) irigasi terdiri dari dua jenis; daerah irigasi teknis dan daerah irigasi non teknis. Pada tahun 2001, jumlah daerah irigasi teknis sebanyak 23 buah dengan luas areal baku 13.744 Ha dan luas areal sawah fungsional 12.678 Ha. Sedangkan daerah irigasi non teknis sebanyak 1.027 buah dengan luas areal baku 60.766 Ha, dan luas areal sawah fungsional 41.580 Ha.

Sementara itu, pada tahun 2000 jumlah Daerah Irigasi teknis sebanyak 24 buah dengan luas areal baku 14.849 Ha, dan sawah fungsional 12.529 Ha. Untuk Daerah Irigasi Non Teknis jumlahnya hanya mencapai 993 buah dengan luas areal baku 61.355 Ha dan sawah fungsional 38.874 Ha. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan DAS irigasi terutama dari segi luas areal baku maupun luas areal sawah yang dapat dialiri oleh Daerah Irigasi Teknis maupun Non Teknis. Jumlah bangunan dan jaringan irigasi di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : Jumlah bangunan PU sebanyak 1.435 buah, jumlah bangunan ex Proyek Irigasi Kecil (PIK) sebanyak 550 buah dan jumlah bangunan Irigasi Desa (IRDES) sebanyak 11.707 buah sedangkan pada tahun 1999, Jumlah bangunan irigasi PU sebanyak 1.391 buah, Ex PIK 220 buah dan IRDES 753 buah. Sementara itu, pada tahun 2001 jaringan irigasi yang dibangun oleh PU sepanjang 198.448 KM, Ex PIK 104.150 Km, dan IRDES 266.666 Km. Dari data tersebut terlihat bahwa

kondisi jaringan irigasi tahun 2001 cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun 1999.

Jumlah dan panjang sungai di Kabupaten Garut pada tahun 2001 adalah 33 buah sungai dengan jumlah anak sungai 101 buah dan panjang sungai secara keseluruhan 1.403,33 km.

Kabupaten Garut sampai tahun 2001 memiliki 21 Daerah Irigasi (DI) dan memiliki 1.391 buah bangunan irigasi. Dari jumlah tersebut, 1.145 buah (82,31%) kondisinya termasuk dalam katagori baik, 195 buah (14,02%) tergolong rusak ringan, dan 51 buah (3,67) tergolong rusak berat. Sedangkan pada tahun 2000 jumlah jaringan irigasi yang tergolong baik berjumlah 1.032 (35%), rusak ringan berjumlah 166 buah (6%) dan rusak berat 193 buah (10%). Berdasarkan data tersebut kondisi jaringan irigasi milik PU tahun 2001 bertambah baik.

Sedangkan untuk bangunan irigasi yang bukan milik PU pada tahun 2001 terdapat 1.030 buah, dari jumlah tersebut yang tergolong masih baik 124 buah (12,04%), 174 buah (16,89) tergolong rusak ringan, dan 732 buah (71,07%) tergolong rusak berat. Pada tahun 2000 jumlah bangunan irigasi Non Pemerintah berjumlah 995 buah, dari jumlah tersebut yang tergolong baik sebanyak 457 buah (41%), rusak ringan 569 buah (55%) dan 28 buah (3%) rusak berat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi bangunan irigasi non pemerintah bertambah buruk.

Jaringan Listrik

Pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dari sebaran desa yang mendapat jaringan listrik. Jika pada tahun 1990 hanya 250 desa dari 403 desa yang mendapat jaringan listrik (62 %) , maka pada tahun 2001 sejumlah 403 desa telah mendapat jaringan listrik dari 405 desa yang ada (99 %). Demikian pula pada perkembangan jumlah pelanggan listrik. Jika pada tahun 1990 hanya 77.708 pelanggan listrik , maka pada tahun 2001 meningkat menjadi 236.372 pelanggan listrik. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar lebih dari 200 % (dalam jangka waktu 11 tahun). Demikian halnya dari penggunaan daya tersambung. Pada tahun 1990 hanya sebesar 36600 KVA sedangkan pada tahun 2001 menjadi 152.736 KVA. Hal ini berarti terjadi peningkatan sekitar 400 %.

Dilihat dari perkembangan ini, maka pemakaian listrik oleh masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk usaha berkembang cukup besar. Namun demikian, jumlah tersebut masih belum optimal jika dilihat dari jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Garut. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pelanggan pada tahun 2001 sebanyak 236.372 pelanggan, sedangkan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Garut sebanyak 508.968. Dengan demikian, jaringan listrik yang ada di Kabupaten Garut masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya (masih di bawah 50 %). Oleh karena itu, pembangunan jaringan listrik terutama di pedesaan perlu digalakkan di tahun-tahun mendatang untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pertanian terutama di pedesaan.

Jaringan Telepon

Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Jika pada tahun 1991, jumlah sambungan telepon hanya sebanyak 1934 SST, maka pada tahun 2001 jumlahnya menjadi 24.031 SST. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 11 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian juga pada pemakaian jasa telekomunikasi. Jika pada tahun 1992 pemakaian pulsa telepon hanya 12.950.180 pulsa baik untuk lokal maupun interlokal, maka pada tahun 2000 pemakaiannya menjadi 175.263.015 pulsa. Hal ini berarti terjadi peningkatan sekitar 13,5 kali lipat. Namun demikian, kondisi telekomunikasi di Kabupaten khususnya, umumnya di Jawa Barat mendapat kendala yang cukup besar, karena adanya konflik dalam pengelolaan telekomunikasi (KSO) akibat konflik antara PT Telkom dengan Perusahaan Ariawest sehingga sejak tahun 2000 sampai sekarang tidak ada penambahan satuan sambungan telepon. Di lain pihak, kondisi ini mendorong berkembangnya pemakaian telepon selular dan telepon umum yang dikelola oleh masyarakat seperti wartel, TUT dan kios pon yang jumlahnya tersebar cukup luas.

Jaringan telepon yang ada, meskipun perkembangannya cukup besar, namun sesungguhnya belum memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut. Karena di setiap Kantor Cabang Telekomunikasi terdapat daftar tunggu pelanggan yang cukup banyak.

Gambaran Perkembangan Sektor Pertanian

Kabupaten Garut merupakan kawasan yang dikelilingi pegunungan, sebagian diantaranya adalah gunung berapi yang aktif. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.519 Ha dimana 124.366 Ha (40%) merupakan kawasan hutan.

Dari kondisi Geografis di atas, menjadikan Kabupaten Garut wilayah pertanian yang sangat subur, di lain pihak kondisi ini menyulitkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Sebagian besar kawasan di kabupaten Garut juga merupakan kawasan rawan bencana alam karena tingkat kemiringan lahan yang cukup curam, ancaman banjir dan erosi akibat menebangan kayu illegal di hutan-hutan dan pembukaan lahan-lahan pertanian di sekitar hutan.

Dalam perspektif sejarah, Kabupaten Garut merupakan kawasan pertanian yang termaju di Jawa Barat pada zaman VOC, kebijakan pengelolaan pertanian pada masa kolonial yang bertumpu pada komoditas perkebunan terutama teh, karet, sawit dan akar wangi, telah mendorong meningkatnya volume ekspor dari kabupaten Garut ke berbagai negara. Pola perdagangan pertanian ditata sedemikian rupa sehingga betul-betul efisien.

Pada masa kolonial dibangun kereta api yang menghubungkan Cibatug-Garut-Cikajang. Pada masa itu jalur KA digunakan sebagai jalur distribusi komoditi. Dengan volume distribusi yang sangat besar maka jalur KA menjadi sangat efisien. Namun demikian pasca kemerdekaan justru pengelolaan perdagangan komoditas pertanian menjadi tidak tertata secara baik akibatnya volume perdagangan/distribusi barang menjadi sangat

minim sehingga penggunaan jalur KA menjadi minim dan pada akhirnya jalur tersebut ditutup.

Dewasa ini permasalahan-permasalahan sektor pertanian di kabupaten Garut adalah Secara spesifik sebagai berikut;

1. Pendapatan petani yang masih relatif kecil
2. Produktivitas tenaga kerja pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sector lain
3. Produktivitas dan mutu belum optimal
4. Pangsa pasar ekspor produk pertanian masih kecil
5. Lemahnya kelembagaan usaha dan kelembagaan petani
6. Perkembangan teknologi terfokus pada budidaya (terutama tanaman pangan dan perkebunan komersial)
7. Perkembangan sistem pelayanan bagi petani dan usaha off farm belum optimal (modal usaha/kredit, penyuluhan pertanian)
8. Rendahnya kualitas SDM yang bergerak di sector pertanian.

Sedangkan permasalahan dalam bidang infrastruktur penunjang pertanian secara rinci sebagai berikut :

1. Aspek Sarana Usaha
 - a. Terbatasnya dukungan sarana jalan pada areal pertanian, khususnya jalan dan bangunan pengembangan kawasan industri perkebunan dan pewayalahan komoditas perkebunan. Demikian juga jalan untuk usaha tani pada areal tanaman pangan.
 - b. Terbatasnya sarana usaha sub sector peternakan antara lain rumah potong hewan (RPH), padang penggembalaan, klinik hewan dan kandang higienis, inseminasi buatan (IB), industri pakan ternak, industri pengolahan susu yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi peternakan.
 - c. Kurang memadainya jumlah dan kualitas sarana pasca panen seperti lantai jemur.
 - d. Hilangnya budaya penyimpanan hasil panen pada lumbung pangan yang mengakibatkan besarnya fluktuasi harga komoditas pertanian pada saat panen raya dan pada saat paceklik.
 - e. Masih terbatasnya bangunan usaha tani konservasi lahan dan sarana lainnya.
 - f. Masih terbatasnya sarana distribusi pupuk dan pestisida (kios).
2. Aspek Sumber Daya Air dan Irigasi

Permasalahan dalam pemanfaatan air irigasi antara lain adalah:

- Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air akibat dari kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA) terutama DAS Cimanuk yang memiliki areal pengaliran yanr terlalu luas yang disebabkan terjadinya penjarahan hutan.
- Penggundulan hutan di Kabupaten Garut dalam kondisi yang sangat parah yaitu sekitar 80 persen, dengan kondisi hutan tersebut rawan terjadi erosi / longsor, bahaya banjir, pendangkalan sungai. Sebagaimana pernah terjadi di kaki Gunung Papandayan.

- Jaringan irigasi yang telah ada belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan banyak mengalami kerusakan akibat operasional dan pemeliharaan (OP) yang belum memadai.
- Terbatasnya pompa air dan sarana penampungan air hujan sehingga sumber air yang telah ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Kualitas air untuk pertanian semakin menurun akibat adanya pencemaran dari limbah industri terutama industri kulit sukaregang, akibat pencemaran ini areal pertanian yang tercemar menjadi tidak subur sehingga petani yang alih profesi di ke sector perdagangan
- Efisiensi pemanfaatan air irigasi baik di tingkat jaringan utama maupun di tingkat usaha tani masih rendah, dan dalam berusaha tani sarana air belum diperhitungkan sebagai biaya.

3. Aspek Pasar

Keberadaan pasar yang ada di kabupaten Garut fungsinya belum jelas apakah merupakan padas komoditi atas pasar eceran.

Mekanisme pemasaran secara umum di kabupaten Garut adalah dengan menggunakan para tenggulak. Para tenggulak membeli komoditi kepada petani dengan murah

4. Aspek Pembiayaan

Permasalahan dari aspek pembiayaan baik untuk peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil antara lain adalah:

- Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio budaya pedesaan sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya.
- Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan formal petani, disamping itu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani.
- Usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh pihak investor, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian.
- Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi, belum menyentuh kegiatan praproduksi, pasca produksi, dan pascapanen. Padahal kegiatan off farm ini memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan kegiatan on farm.
- Belum adanya lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian (Asuransi Pertanian) yang mengakibatkan lembaga keuangan maupun investor enggan untuk menyalurkan dananya pada kegiatan agribisnis, disamping itu petani juga belum merasakan pentingnya jaminan untuk berusaha.

- Belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian tidak berkembang sesuai tuntutan pembangunan nasional yang memprioritaskan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
- Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Pedesaan/Lembaga Kredit Mikro di pedesaan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan masyarakat untuk menabung dengan jumlah modal yang keluar pedesaan (capital outflow).

Dalam rangka memacu sektor pertanian di Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah mengambil kebijakan umum pembangunan pertanian, yaitu :

1. Menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis
2. Mengembangkan sector industri sebagai tulang punggung untuk memperkuat bagian hulu dan hilir sistem agribisnis
3. Mengefektifkan fungsi-fungsi perdagangan untuk memperlancar arus barang dan jasa
4. Mengembangkan lembaga keuangan
5. Mengembangkan fungsi penelitian dan pengembangan
6. Mengembangkan SDM
7. Mengembangkan organisasi ekonomi petani
8. Mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan
9. Meningkatkan ketahanan pangan
10. Mengembangkan infrastruktur

Sektor pertanian di Kabupaten Garut mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah, yang terlihat pada sumbangannya terhadap Produk Domestik regional Bruto. Kabupaten Garut memiliki potensi pertanian yang ditopang oleh luas lahan yang besar dan tingkat produktivitas lahan yang baik.

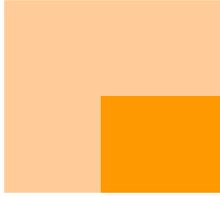
Secara umum, pembangunan di kabupaten Garut disesuaikan dengan visi, pola dasar, dan Propeda tahun 2001-2005. Prioritas pembangunan diarahkan pada 9 bidang yang salah satunya adalah bidang ekonomi.

Pada bidang ekonomi, pembangunan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan usaha skala kecil, mengengah dan koperasi, menyediakan sarana dan prasarana penunjang perekonomian, serta memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan sektor pariwisata daerah yang meliputi intensifikasi lahan dan diversifikasi tanaman, pengembangan komoditas unggulan, mengadakan promosi dan pemasaran produk andalan, menyediakan sarana dan prasarana penunjang di sentra-sentra produksi, penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.

Perkembangan produksi pertanian di Kabupaten Garut sampai saat ini masih didominasi oleh tanaman padi yang mencapai 33% dari total produksi tanaman pangan disusul oleh komoditi jagung. Hal ini dapat diartikan bahwa pola pertanian di kabupaten Garut masih bersifat subsisten.

Perkembangan sektor pertanian di kabupaten Garut tidak memiliki pola yang linier, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh belum adanya sistem agrobisnis yang terlembagakan dari segi pengadaan input produksi, sistem usaha tani, pengolahan pasca panen, pemasaran dan pengorganisasian kelompok tani.

Jumlah kelompok tani yang ada di kabupaten Garut pada tahun 2000 adalah sebanyak 2.143 kelompok, sedangkan pada tahun 2001 sebanyak 2.323 kelompok. Sementara itu jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada tahun 2000 tercatat sebanyak 243 orang dan tersebar di 31 BPP sedangkan pada tahun 2001 jumlah PPL sebanyak 250 orang dan tersebar di 37 Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Dengan demikian jumlah petugas PPL meningkat dari tahun ke tahun mengikuti peningkatan jumlah kelompok tani. Sektor pertanian di kabupaten Garut mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah, yang terlihat pada sumbangannya terhadap Produk Domestik regional Bruto.



Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pertanian terhadap Perkembangan Sektor Pertanian

Analisis Makro

Analisis makro ini didasarkan pada hasil pengolahan data sekunder dari sumber formal, yaitu dokumen kabupaten dalam angka. Untuk memudahkan pengidentifikasian pola pembangunan infrastruktur digunakan ukuran indeks.

Infrastruktur Jalan

Secara umum, indeks layanan infrastruktur jalan di kedua kabupaten (Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) memperlihatkan kecenderungan menurun. Indeks layanan ini merupakan ukuran gabungan dari keseluruhan kondisi layanan jalan yang ada. Tingkat layanan jalan baik diberikan skala nilai yang lebih tinggi sedangkan tingkat layanan jalan yang rusak diberi skala nilai rendah. Formula yang digunakan dalam menentukan indeks layanan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{(3 \times \text{Km. Baik}) + (2 \times \text{Km. Sedang}) + (1 \times \text{Km. Rusak})}{1000}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa kecenderungan menurun terlihat dalam 10 tahun sejak 1990. Kenaikan indeks layanan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya secara signifikan terjadi pada rentang waktu tahun 1993 – 1995, sedang untuk Kabupaten Garut terjadi pada rentang waktu tahun 1991 – 1992.

Secara rata-rata, penurunan indeks layanan ini sebesar –0,04 poin/tahun di Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian, jika dilihat ukuran panjang jalan ternyata jumlah panjang jalan di kabupaten ini justru meningkat sebesar 20,74 km/tahun yaitu dari 1.110,84 Km pada tahun 1990 hingga 1.318,25 Km pada tahun 2000.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi penyediaan infrastruktur telah dilakukan dan berhasil meningkatkan besaran fisik infrastruktur jalan, namun penambahan tingkat layanan tidak dilakukan, atau dengan kata lain telah terjadi penambahan panjang jalan yang kondisi perkerasannya tidak baik atau rusak.

Infrastruktur jalan yang dibangun di Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu 10 tahun (1990 – 2000) sebagian besar merupakan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten. Proporsi panjang jalan kabupaten dari total panjang jalan yang ada di kabupaten ini melebihi 70% (1990) dan terus bertambah hingga mencapai 80% di tahun 2000 diikuti

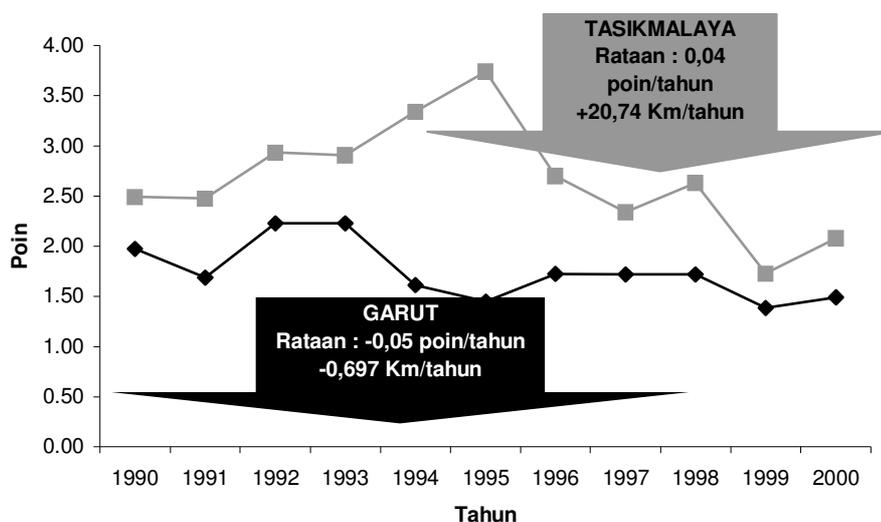
oleh jalan proporsi panjang jalan propinsi (lebih dari 10%) dan jalan negara yang hanya sebesar kurang dari 5%. Dari kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten memegang peran yang sangat penting dalam penyediaan infrastruktur jalan ini.

Perkembangan kondisi infrastruktur jalan memperlihatkan penurunan proporsi infrastruktur jalan dengan kondisi baik dan sedang. Di lain pihak, pertambahan jalan berkondisi rusak dan rusak berat makin meningkat. Hal ini memberikan semacam gambaran bahwa penyediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan Level of Service (LOS).

Kondisi infrastruktur jalan dengan kondisi baik pada tahun 1990 mencapai 43,7% dan kondisi rusak berat hanya mencapai 8,1%. Keadaan ini berbalik arah, di mana pada tahun 2000 kondisi jalan rusak berat mencapai 25% dan yang baik berkurang menjadi hanya 23,5%. Keadaan ini tentunya berpegaruh terhadap kegiatan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian, proposi jalan beraspal meningkat terus diiringi dengan penurunan jumlah panjang jalan dengan perkerasan tanah dan kerikil. Hal ini terjadi karena terjadinya peningkatan jenis perkerasan dari tanah dan kerikil ke jenis perkerasan aspal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak jalan dengan perkerasan aspal namun dalam kondisi yang rusak.

Jika dikaitkan dengan alokasi anggaran pembangunan sektoral, secara umum sektor transportasi merupakan sektor dengan alokasi terbesar. Namun demikian, selama kurun waktu 10 tahun dari 1990 – 2000 kecenderungan yang terjadi adalah penurunan. Peningkatan anggaran hanya terjadi secara signifikan selama kurun waktu 2 tahun dari 1990 – 1992 dan kurun waktu 1996 – 1997.

Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Layanan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut Kurun Waktu 1990 - 2000



Kondisi yang terjadi di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat layanan infrastruktur ini dalam kurun waktu 10 tahun tersebut. Penurunan lebih banyak diakibatkan makin menurunnya intervensi pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini terlihat dari rata-rata penurunan indeks sebesar $-0,05$ poin/tahun dan pengurangan panjang jalan sebesar $-0,697$ Km/tahun, di mana terdapat jalan sepanjang 842,05 Km pada tahun 1990 hingga hanya 835,08 Km pada tahun 2000.

Perkembangan kondisi infrastruktur jalan memperlihatkan penurunan proporsi infrastruktur jalan dengan kondisi baik dan sedang. Di lain pihak, penambahan jalan berkondisi rusak dan rusak berat makin meningkat. Hal ini memberikan semacam gambaran bahwa penyediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut mengalami penurunan Level of Service (LOS).

Kondisi infrastruktur jalan dengan kondisi baik pada tahun 1990 mencapai 55,0% dan kondisi rusak berat hanya mencapai 21,0%. Keadaan ini berbalik arah, di mana pada tahun 2000 kondisi jalan rusak dan rusak berat mencapai 38% dan yang baik berkurang menjadi hanya 17,0%. Keadaan ini tentunya berpengaruh terhadap kegiatan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, kondisi ini juga terus diiringi dengan penurunan jumlah panjang jalan dengan perkerasan aspal dan peningkatan panjang jalan dengan perkerasan kerikil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak jalan dengan perkerasan aspal namun dalam kondisi yang rusak.

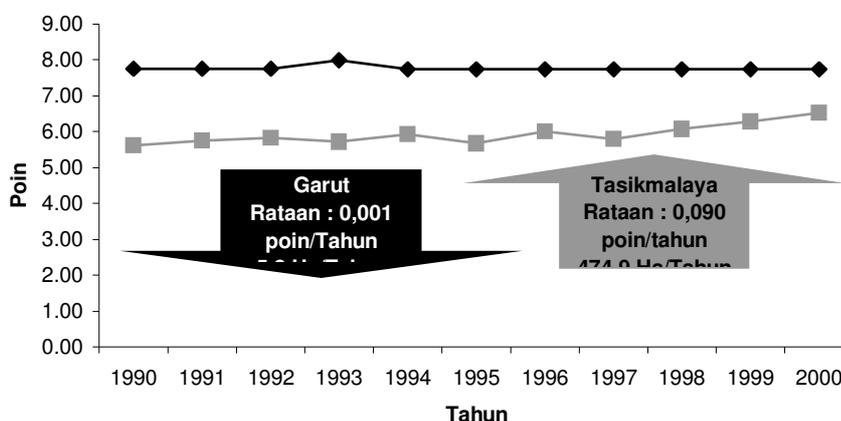
Infrastruktur Irigasi

Secara umum, indeks layanan infrastruktur irigasi di Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan kecenderungan meningkat sedang di Kabupaten Garut memperlihatkan kecenderungan menurun. Indeks layanan ini merupakan ukuran gabungan dari keseluruhan kondisi layanan irigasi yang ada. Tingkat layanan irigasi teknis diberikan skala nilai yang lebih tinggi sedangkan tingkat layanan irigasi sederhana diberi skala nilai rendah. Formula yang digunakan dalam menentukan indeks layanan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{((3 \times \text{Ha.Teknis}) + (2 \times \text{Ha.Semiteknis}) + (1 \times \text{Ha.Sederhana}))}{10000}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. Perkembangan Indeks Layanan Infrastruktur Irigasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut Kurun Waktu 1990 - 2000



Kenaikan indeks layanan yang terjadi Kabupaten Tasikmalaya rata-rata hanya sebesar 0.090 poin/tahun, yang jika dilihat secara nyata terjadi peningkatan layanan irigasi sebesar 474,9 Ha/tahun di mana terdapat 38.303 Ha pada tahun 1990 dan hanya mencapai 43.050 Ha pada tahun 2000. Peningkatan terlihat secara signifikan terjadi pada rentang waktu tahun 1997 – 2000. Di lain pihak, di Kabupaten Garut terjadi penurunan indeks layanan irigasi sebesar 0,001 poin/tahun atau penurunan luasan areal terlayani irigasi sebesar 5,8 Ha/tahun yang mana jumlah areal terlayani irigasi pada tahun 1990 mencapai 38.757 Ha menurun hingga 38.699 Ha pada tahun 2000.

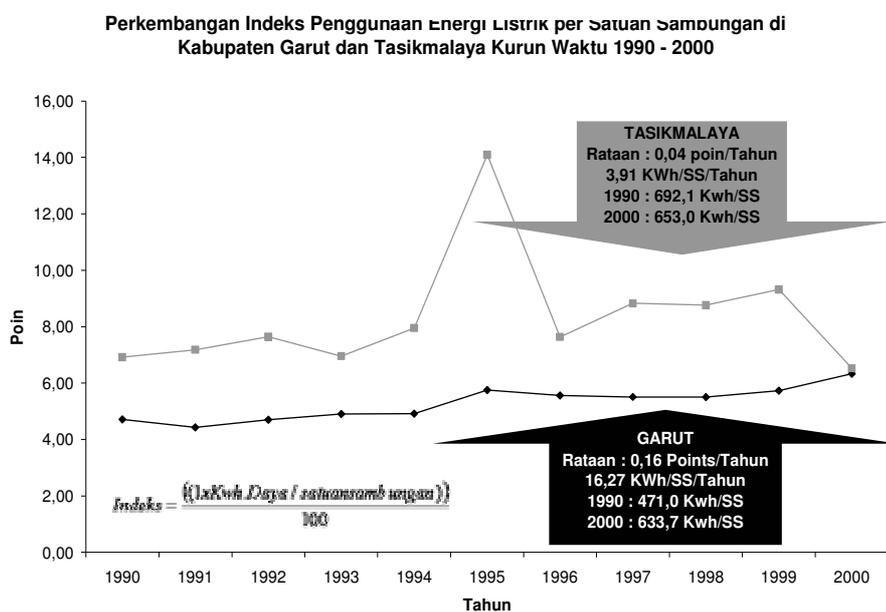
Di Kabupaten Tasikmalaya, dari luas total lahan berpengairan yang ada, jenis pengairan non PU atau pengairan yang dibangun sendiri oleh masyarakat mendominasi disusul dengan tipe pengairan teknis yang disediakan oleh pemerintah. Kecenderungan perkembangan selama kurun waktu 10 tahun tersebut memperlihatkan bahwa terjadi penambahan luas lahan beririgasi. Jenis irigasi yang memperlihatkan perkembangan yang paling pesat adalah irigasi teknis dan irigasi sederhana (non teknis) yang dibangun oleh pemerintah. Jika dilihat dari perkembangan proporsi luasan lahan berdasarkan tipe irigasi terlihat bahwa luasan lahan dengan irigasi teknis dan sederhana PU cenderung meningkat sedang luasan lahan beririgasi non PU dan ½ teknis makin berkurang. Kenyataan ini secara tidak langsung dapat menggambarkan bahwa terjadi peningkatan status dari irigasi ½ teknis menjadi irigasi teknis dan irigasi non PU menjadi irigasi sederhana PU. Jika dihubungkan dengan alokasi anggaran pembangunan sumberdaya air dan irigasi, pada kurun waktu tersebut terjadi kecenderungan peningkatan alokasi APBD dalam sektor pembangunan sumberdaya air dan irigasi.

Infrastruktur Listrik

Pengukuran indeks infrastruktur listrik dilakukan dengan melihat intensitas penggunaan energi per satuan sambungan. Penghitungan ini dilakukan

dengan dasar pemikiran bahwa layanan yang diberikan oleh infrastruktur listrik ini dapat dilihat sebagai intensitas penggunaannya. Dengan demikian, layanan infrastruktur listrik dapat dilihat dari seberapa besar infrastruktur tersebut terutilisasi.

Secara umum, indeks layanan infrastruktur listrik di Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan kecenderungan menurun sedangkan di Kabupaten Garut memperlihatkan kecenderungan meningkat. Indeks layanan ini merupakan ukuran besar penggunaan energi listrik persatuan sambungan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3



Secara keseluruhan, intensitas penggunaan listrik di Kabupaten Tasikmalaya terlihat mengalami penurunan sebesar -0,04 poin/tahun atau sebesar -3,91 Kwh/Satuan Sambungan/tahun. Penurunan ini terjadi dari 692,1 Kwh/SS pada tahun 1990 menjadi 653,0 Kwh/Satuan Sambungan pada tahun 2000. Penggunaan listrik yang meningkat secara tidak langsung dapat menggambarkan peningkatan pula di sektor kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan pada penggunaan energi listrik di Kabupaten Garut selama rentang waktu 10 tahun tersebut sebesar 0,16 poin/tahun atau sebesar 16,27 Kwh/Satuan Sambungan/Tahun. Peningkatan ini terjadi dari 471,0 Kwh/SS pada tahun 1990 menjadi 633 Kwh/SS pada tahun 2000.

Penggunaan listrik di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh kelas konsumen rumah tangga dengan proporsi lebih dari 90% total pengguna listrik secara keseluruhan. Penggunaan energi listrik untuk hal-hal yang produktif cenderung menurun. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa jumlah pelanggan dengan kategori usaha makin menurun. Jumlah pengguna listrik tersebut telah mencapai 91.095 sambungan pada tahun 1990 dan menjadi

280.186 pada tahun 2000. Jumlah pasokan energi listrik yang dipasok oleh PT PLN ke pengguna di Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 74.205.497 Kwh pada tahun 1990 menjadi 350.253.274 Kwh pada tahun 2000. Demikian pula dengan pemakaian yang sampai tahun 2000 masih lebih kecil dibanding pasokan. Terjadi lonjakan yang seiring antara pasokan dan pemakaian di tahun 1995 dan lonjakan yang tidak seiring di tahun 2000, di mana pasokan cenderung naik dalam kurun waktu 1999 – 2000, sedangkan penggunaan malah menurun.

Infrastruktur Telepon

Penentuan indeks layanan infrastruktur telepon dilakukan dengan melihat intensitas durasi penggunaan dan tempat tujuan penggunaan, yaitu lokal, interlokal dan internasional per satuan sambungan telepon (sst).

Penggunaan telepon internasional dinilai dengan bobot paling tinggi dan penggunaan lokal dinilai dengan bobot paling rendah, sedang penggunaan interlokal dinilai dengan besar diantara kedua nilai maksimal dan minimal tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa penggunaan telepon untuk hubungan yang lebih luas merupakan indikator dari makin intensif dan ekstensifnya hubungan kegiatan, baik ekonomi maupun sosial antar masyarakat. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

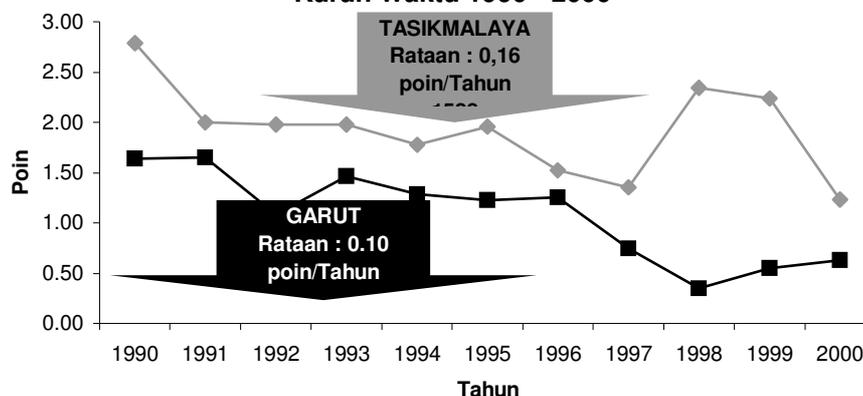
$$\text{Indeks} = \frac{((3 \times \text{Menit.SLI}) + (2 \times \text{Menit.SLJJ}) + (1 \times \text{Menit.Lokal}))}{10000}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4

Secara umum, terjadi penurunan dalam indeks penggunaan telepon di kedua kabupaten. Untuk Kabupaten Tasikmalaya terjadi penurunan sebesar -0,16 poin/tahun atau sebesar -1.528 menit/sst/tahun. Lama penggunaan keseluruhan telepon di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 27.597 menit/sst pada tahun 1990 dan menurun hingga hanya 12.317 menit/sst pada tahun 2000.

Demikian pula dengan penggunaan infrastruktur telepon di Kabupaten Garut. Indeks penggunaan telepon di kabupaten ini menurun sebesar -0,10 poin/tahun atau sebesar 990 menit/sst/tahun. Penggunaan pada tahun 1990 mencapai 16.174 menit/sst sedang pada tahun 2000 hanya tinggal 6.275 menit/sst.

**Gambar 4.4. Perkembangan Indeks Penggunaan
Telepon per Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten
Tasikmalaya dan Kabupaten Garut
Kurun Waktu 1990 - 2000**



Jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Tasikmalaya makin bertambah, yang mana jumlah satuan sambungan yang berhasil dijual oleh PT. Telkom hanya mencapai 3035 satuan sambungan pada tahun 1990 dan meningkat menjadi 66.212 SST. Kendati terjadi peningkatan jumlah SST di Kabupaten Tasikmalaya, perkembangan pemakaian telepon per SST cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa intensitas komunikasi antara masyarakat belum begitu banyak terjadi. Semua jenis panggilan menunjukkan kecenderungan menurun. Demikian halnya dengan kondisi di Kabupaten Garut, di mana jumlah satuan sambungan juga menunjukkan peningkatan dari 1.934 sst pada tahun 1991 hingga mencapai 24.031 sst pada tahun 2000.

Perkembangan ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa kontribusi sektoral sektor pertanian di kedua kabupaten mengalami penurunan. Di Kabupaten Tasikmalaya sektor pertanian mengalami penurunan sebesar $-0,27\%/tahun$ dan di Kabupaten Garut mengalami penurunan sebesar $-0,85\%/tahun$. Namun demikian peranan sub sektor tanaman pangan yang merupakan proposi terbesar di dalam sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar $0,64\%/tahun$ di Kabupaten Garut dan $0,36\%$ di Kabupaten Tasikmalaya. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan secara sederhana bahwa telah terjadi penurunan di sub sektor – sub sektor lain dalam sektor pertanian.

Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di sektor perdagangan, yang mana proporsinya mengalami kenaikan sebesar $0,74\%/tahun$ di Kabupaten Tasikmalaya dan sebesar $1,04\%/tahun$ di Kabupaten Garut. Sektor utama lain yaitu sektor industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam kontribusi terhadap PDRB. Penurunan terjadi sebesar $-0,64\%/tahun$. Kenyataan sebaliknya terjadi di Kabupaten Garut, dimana kontribusi sektoral sektor industri pengolahan memperlihatkan peningkatan sebesar $0,33\%/tahun$.

Secara teoretik, penurunan proporsi kontribusi sektoral sektor pertanian terhadap PDRB merupakan hal yang layak terjadi. Penurunan kontribusi

sektoral sektor pertanian tersebut biasanya diikuti dengan peningkatan kontribusi sektoral sektor selain pertanian. Transformasi sektoral ini merupakan hal yang biasanya terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat.

Peran infrastruktur dalam pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan wahana bagi peningkatan efisiensi sektoral dan juga sebagai katalisator dalam mendukung transformasi sektoral tersebut. Secara agregat, kendati perkembangan beberapa infrastruktur mengalami penurunan, namun secara sektoral kegiatan ekonomi telah menunjukkan pergeseran. Namun demikian, cukup sulit dalam analisis makro ini untuk melihat pergeseran cara dan metode produksi sektor pertanian ke arah yang lebih baik dalam kaitannya dengan penyediaan infrastruktur.

Analisis Mikro

Analisis mikro ini menggunakan data hasil survey di empat lokasi kecamatan, masing-masing dua kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Desa yang dipilih sebagai tempat lokasi adalah sebagai berikut :

Kabupaten Tasikmalaya : 1. Kecamatan Cisayong, 2. Kecamatan Manonjaya

Kabupaten Garut : 1. Kecamatan Bayongbong, 2. Kecamatan Cibalong

Analisis mikro dalam laporan ini dilakukan dalam kerangka mengetahui persepsi umum petani di kedua kabupaten lokasi studi.

Karakteristik Responden

Sebagaimana umumnya masyarakat petani di Jawa Barat dewasa ini, masyarakat petani di lokasi studi juga menunjukkan karakteristik berpendidikan rendah, berusia lanjut, dan menggarap lahan yang sempit.

Delapan puluh lima persen dari 120 orang responden berpendidikan Sekolah Dasar. Sementara yang berpendidikan Sekolah Menengah sebanyak 11,7% dan yang berpendidikan Tinggi hanya sebanyak 1,7%. Mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar dan Menengah dalam penelitian ini adalah para "petani tulen", yaitu responden yang memang sejak awal "memilih" berprofesi sebagai petani. Sementara yang berpendidikan Tinggi adalah mereka yang mulai terjun ke sektor pertanian karena PHK dari bank tempat mereka bekerja.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
PT	2	1,7
SD	102	85,0
SMP	6	5,0
SMU	8	6,7
Tidak sekolah	2	1,7
Total	120	100,0

Sumber : Hasil Analisis

Usia para responden juga tidak lagi muda. Sebanyak 30,8% responden memiliki pengalaman usahatani 11 hingga 20 tahun. Responden dengan pengalaman usahatani lebih dari 30 tahun sebanyak 19,2%. Bila para responden memulai usahatani pada umur 25 tahun, maka lapisan usia 45 hingga 55 tahunlah yang saat ini sedang berada dalam sektor pertanian.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Pengalaman Usaha Tani

Pengalaman Usahatani	Frekuensi	Persentase
< 5 th	16	13,3
6 – 10 th	14	11,7
11 - 20 th	37	30,8
21 - 30 th	30	25,0
> 30 th	23	19,2
Total	120	100,0

Sumber : Hasil Analisis

Keadaan ini juga mendapat perhatian yang serius dari para responden. Menurut mereka para pemuda di desa sama sekali tidak memiliki keinginan untuk terjun ke sektor pertanian. Kebanyakan dari mereka lebih suka berprofesi sebagai tukang ojeg daripada petani. Namun ada satu hal yang dapat menarik para pemuda tersebut untuk masuk ke dalam sektor pertanian, yaitu manakala mereka sudah menikah. Tuntutan untuk memberi makan anak istri akan mendorong mereka mengolah ladang/sawah dalam rangka menghasilkan pangan bagi keluarganya.

Namun demikian para responden tetap merasa khawatir. Dalam benak mereka tetap ada tanda tanya besar, "Siapa yang akan melanjutkan bertani dalam 10 atau 20 tahun ke depan bila para pemudanya memiliki sikap demikian?"

Terdapat 8,3% responden yang memiliki penghasilan utama di luar sektor pertanian. Penghasilan mereka dari sektor pertanian tetap ada, namun tidak dapat dijadikan sandaran hidup. Sementara 91,7% responden adalah benar-benar petani yang menyandarkan hidupnya pada sektor pertanian.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama

Sumber Penghasilan Utama	Frekuensi	Persentase
Non Pert	10	8,3
Pertanian	110	91,7
Total	120	100,0

Sumber: Hasil Analisis

Sebagian besar responden (58,4%) menggarap lahan usahatani yang luasnya kurang dari 0,5 ha. Proporsi terbesar ada pada luas lahan kurang dari 0,25 ha, yaitu sebanyak 31,7%. Sebagaimana besar petani di wilayah penelitian masih menggarap lahan milik sendiri. Sementara hanya 25% yang menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas dan Status yang Digarap

Luas Lahan yang Digarap	Frekuensi	Persentase
<0,25 ha	38	31,7
0,26 - 0,5 ha	32	26,7
0,51 - 1 ha	26	21,7
1 - 2 ha	11	9,2
>2 ha	13	10,8
Total	120	100,0
Status Lahan	Frekuensi	Persentase
bagi hasil	30	25
milik sendiri	90	75
Total	120	100

Sumber: Hasil Analisis

Persepsi Responden Terhadap Infrastruktur

Pada umumnya responden menganggap bahwa baik secara parsial maupun secara menyeluruh kondisi infrastruktur di wilayahnya memburuk dalam sepuluh tahun terakhir. Kondisi jalan dianggap bagus oleh 28% responden, sedang 43%, dan buruk 29%. Masih lebih banyak yang mengatakan buruk daripada bagus, meskipun selisihnya hanya 1%. Dengan kondisi jalan demikian sebanyak 45% responden menyatakan bahwa jalan di wilayah mereka belum memberi dukungan yang berarti terhadap perkembangan usaha mereka, sementara 55% menyatakan sudah memberi dukungan terhadap kelancaran usaha.

Tabel 4.5. Persepsi Responden Tentang Infrastruktur Jalan

Kondisi Jalan	Frekuensi	Persentase
Bagus	33	28
Buruk	35	29
Sedang	52	43
Total	120	100
Dukungan Jalan Terhadap Usaha	Frekuensi	Persentase
Belum	54	45
Sudah	66	55
Total	120	100

Sumber : Hasil Analisis

Prasarana jalan akan terasa manfaatnya bila secara simultan bekerja dengan sarana transportasi yang memadai. Jenis sarana transportasi yang paling banyak dimanfaatkan oleh responden untuk angkutan hasil pertanian adalah kendaraan bak terbuka atau truk (60%). Angkutan umum seperti angkot atau bis menempati urutan kedua (28%). Tujuh puluh tiga persen responden tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh angkutan untuk hasil pertaniannya, sementara 27 persen mengalami kesulitan yang cukup berarti. Dalam kondisi seperti tersebut di atas, 54% persen responden merasa bahwa pelayanan angkutan umum sudah memenuhi kebutuhan responden akan sarana transportasi. Sebanyak 46% responden menyatakan sebaliknya.

Tabel 4.6 Persepsi Responden tentang Sarana Angkutan

Jenis Angkutan untuk Hasil Pertanian	Frekuensi	Persentase
Ang. Umum	34	28
Bak terbuka	72	60
Gerobak	12	10
Kend.prib	2	2
Total	120	100
Kemudahan Memperoleh Angkutan	Frekuensi	Persentase
Mudah	88	73
Sulit	32	27
Total	120	100
Pemenuhan Kebutuhan oleh Angkutan Umum	Frekuensi	Persentase
Belum	55	46
Sudah	65	54
Total	120	100

Sumber : Hasil Analisis

Dua puluh tiga persen responden tinggal di wilayah yang jauh dari pasar. Tiga puluh persen responden tinggal dalam jarak kurang dari 1 km dari pasar, sementara 43% responden tinggal dalam jarak 1 – 5 km dari pasar.

Lima puluh delapan persen responden tidak mengetahui perbedaan harga produk pertanian yang dihasilkan dengan harga di pasar. Tiga puluh dua persen menyatakan bahwa selisih harga di pasar lebih tinggi dari 100 daripada harga yang mereka terima.

Koperasi tidak menjadi pilihan utama bagi responden untuk menjual hasil pertaniannya. Hanya 5% responden yang menjual hasil pertaniannya ke koperasi. Empat belas persen menjual langsung kepada kenalan mereka yang menjadi pedagang di pasar kecamatan. Tengkulak merupakan pilihan utama responden dalam menjual hasil pertanian. Delapan puluh persen responden memilih menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak.

Tabel 4.7 Persepsi Responden tentang Infrastruktur Pasar

Jarak dari Pasar Terdekat	Frekuensi	Persentase
< 1 km	36	30
1 - 5 km	52	43
5 - 10 km	5	4
> 10 km	27	23
Total	120	100
Penjualan Hasil Pertanian	Frekuensi	Persentase
Koperasi	6	5
Pasar kec.	17	14
tdk dijual	1	1
Tengkulak	96	80
Total	120	100
Beda Harga dengan Pasar	Frekuensi	Persentase
Tdk tahu	70	58
< 100%	3	3

= 100%	9	8
> 100%	38	32
Total	120	100

Sumber : Hasil Analisis

Penggunaan alat telekomunikasi merupakan hal yang mutlak dewasa ini, sehingga baik kepemilikan dan penggunaannya akan menjadi prioritas. Namun tidak demikian halnya dengan lapisan masyarakat petani. Sebagian besar responden (89%) tidak memiliki jaringan telepon. Bahkan 48% responden menyatakan tidak pernah menggunakan telepon sama sekali.

Memang tidak dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui telepon belum begitu mendesak untuk dilakukan, karena 43% menggunakan telepon 1 – 10 kali dalam satu bulan. Bahkan dalam penelitian ditemukan suatu hal yang menarik, yaitu 4% responden ternyata memiliki dan menggunakan telepon genggam.

Agaknya telepon dewasa ini juga sudah menjadi kebutuhan lapisan masyarakat petani, karena 84% responden menyatakan perlu ada penambahan jaringan telepon di wilayahnya.

Tabel 4.8 Gambaran Penggunaan Infrastruktur Telepon

Pemilikan Jaringan Telepon	Frekuensi	Persentase
Handphone	5	4
Rumah	8	7
Tidak	107	89
Total	120	100
Frekuensi Penggunaan Telepon Per Bulan	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	58	48
1 - 10 kali	52	43
10 – 30 kali	9	8
>30 kali	1	1
Total	120	100
Perlu Penambahan Jaringan Telepon	Frekuensi	Persentase
Tidak	19	16
Ya	101	84
Total	120	100

Sumber: Hasil Analisis

Tidak dapat dibayangkan bagaimana manusia hidup tanpa listrik, namun pada kenyataannya 19% responden hidup tanpa listrik di desanya. Tujuh puluh tiga persen responden menggunakan listrik dengan daya 450 watt untuk keperluan rumah tangganya, dan 8% yang menggunakan listrik 900 watt.

Peruntukan penggunaan listrik masih sebagian besar (62%) untuk penerangan saja di rumah. Sementara tak satupun yang menggunakan daya listrik untuk keperluan usahatannya.

Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa mereka memerlukan penambahan daya listrik. Tiga belas persen menyatakan tidak perlu,

sedangkan 17% responden tidak tahu apakah mereka akan memerlukan tambahan daya listrik atau tidak.

Tabel 4.9. Penggunaan Infrastruktur Listrik

Listrik

Daya Listrik	Frekuensi	Persentase
450 watt	88	73
900 watt	9	8
Tidak Pakai	23	19
Total	120	100

Peruntukan Penggunaan Listrik	Frekuensi	Persentase
Tidak Pakai	23	19
Industri	10	8
Lainnya	3	3
non tani	10	8
Rumah	74	62
Total	120	100

Perlu Penambahan Daya Listrik	Frekuensi	Persentase
Tidak Tahu	20	17
Tidak	16	13
Ya	84	70
Total	120	100

Budidaya tanaman amat tergantung dengan keberadaan air. Penyediaan air untuk tanaman padi sawah sangat ditentukan kecukupannya oleh keberadaan prasarana irigasi. Tujuh puluh dua persen responden menyatakan ada prasarana irigasi di desanya, sedangkan 28% responden menyatakan tidak ada jaringan irigasi di desanya.

Keberadaan jaringan irigasi tersebut ternyata belum dapat dikatakan menjamin ketersediaan air, karena setiap musim kemarau mengalami kekeringan menurut 40% responden. Tiga puluh lima persen responden menyatakan bahwa air dari jaringan irigasi selalu tersedia sepanjang tahun.

Tabel 4.10 Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Persepsi Petanian terhadap Infrastruktur Irigasi

Irigasi

Keberadaan Irigasi	Frekuensi	Persentase
Tidak tahu	1	1
Tidak	33	28
Ya	86	72
Total	120	100

Jenis Jaringan Irigasi	Frekuensi	Persentase
Tidak tahu	30	25

Primer	50	42
Sekunder	24	20
Tertier	16	13
Total	120	100

Pernah Kekeringan	Frekuensi	Persentase
Tidak tahu	30	25
Kemarau	48	40
Tidak	42	35
Total	120	100

Kenaikan Produktivitas Akibat Irigasi	Frekuensi	Persentase
< 30%	7	6
30% - 50%	19	16
> 50%	10	8
Tdk tahu	54	45
Total	90	75
Tidak ada irigasi	30	25
Total	120	100

Kondisi Irigasi	Frekuensi	Persentase
Tidak tahu	30	25
Baik	40	33
Buruk	17	14
Sedang	33	28
Total	120	100

Sumber : Hasil Analisis

Jaringan irigasi tentu bermanfaat bagi responden, tetapi tidak semua responden mengetahui besarnya manfaat tersebut. Empat puluh lima persen responden tidak mengetahui peningkatan produktivitas akibat adanya jaringan irigasi. Enam persen responden mengalami kenaikan produktivitas kurang dari 30%, 16% responden mengalami kenaikan produktivitas 30 – 50%, dan 8% responden mengalami kenaikan produktivitas lebih dari 50%.

Kondisi jaringan irigasi dewasa tidak sebaik sebelumnya, namun para responden tidak dapat menyebutkan proporsi kondisi jaringan irigasi sebelum penelitian. Saat penelitian 33% responden menyatakan jaringan irigasi masih dalam kondisi baik, 28%persen menyatakan sedang, dan 14% menyatakan bahwa kondisi irigasi dalam keadaan buruk.

Tabel 4.11. Sarana Pengolahan Hasil Pertanian

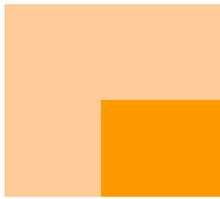
Jumlah Penggilingan Padi	Frekuensi	Persentase
Tidak tahu	61	51
1	32	27
2	8	7
3	19	16

Total	120	100
-------	-----	-----

Pemenuhan Kebutuhan Oleh Penggilingan yang Ada	Frekuensi	Persentase
Tidak	18	15
Ya	102	85
Total	120	100

Fasilitas Lain yang Diperlukan untuk Usahatani	Frekuensi	Persentase
alat pertanian	1	3%
Gudang	1	3%
Kerbau	1	3%
kupas singkong	1	3%
mesin olah	1	3%
mesin tepung	3	8%
Penumbuk	1	3%
perontok padi	16	41%
pompa air	2	5%
Traktor	12	31%
Total	39	100

Sumber : Hasil Analisis



Kesimpulan

1. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kondisi infrastruktur, terutama yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, yaitu irigasi dan sarana jalan cenderung menurun kualitas dan indeks layannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini bahkan terjadi sebelum adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1996 lalu. Khusus untuk indeks layanan irigasi kabupaten Tasikmalaya indeks layanan irigasinya sedikit meningkat (0.09 poin/tahun) dengan penambahan jaringan irigasi sebesar 474.9 ha pertahun (dari tahun 1990 sampai tahun 2000). Namun indeks layanan irigasi di kabupaten Garut justru menurun (-0.001 poin/tahun) dengan pengurangan jaringan irigasi sebesar -5.8 ha pertahun. Untuk indeks layanan jalan kabupaten Tasikmalaya terjadi penurunan sebanyak -0.04 point/tahun namun panjang jalannya bertambah sekitar 20.74 km/tahun. Sedangkan indeks layanan jalan di kabupaten Garut menurun sekitar -0.05 poin/tahun dan terjadi pengurangan panjang jalan sekitar -0.697 km/tahun.
2. Hal yang sama juga terjadi pada infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan sektor pertanian, yaitu telekomunikasi dan kelistrikan. Dalam kurun waktu 1990 sampai 2000, untuk kabupaten Garut terjadi pengurangan penggunaan telepon sebesar -990 menit/SST/tahun namun peningkatan penggunaan energi listrik sebesar 16.27 kwh/SS/tahun. Sedangkan di kabupaten Tasikmalaya terjadi pengurangan penggunaan telepon sebesar -1.528 menit/SST/tahun serta pengurangan penggunaan energi listrik sebesar -3.91 kwh/SS/tahun. Penurunan penggunaan energi listrik di kabupaten Tasikmalaya mungkin disebabkan oleh adanya penurunan kontribusi sektor industri pada PDRB sebesar -0.64% pertahun di kabupaten Tasikmalaya, sedangkan di kabupaten Garut kontribusi sektor industri pada PDRB justru meningkat sebesar 0.33% pertahun yang terjadi pada kurun waktu tahun 1990 sampai tahun 2000.
3. Sulit untuk membuktikan / mencari hubungan atau keterkaitan yang cukup signifikan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan di sektor pertanian, hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan data dan hanya dianalisa dalam jangka pendek (10 tahun). Dalam kenyataannya baik di kabupaten Garut maupun Tasikmalaya, baik luas tanam, luas panen, produksi pertanian dan produktifitas pertanian terlihat terus meningkat baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Dalam jangka pendek variabel yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor pertanian adalah variabel selain infrastruktur, seperti teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan lain – lain.
4. Namun pada kenyataannya dari hasil wawancara dengan para petani, diperoleh kesimpulan bahwa, tidak ada perubahan yang cukup nyata yang dialami oleh para petani baik dari segi teknologi budidaya maupun

peningkatan nilai tambah dari usaha tani yang dilakukannya selama 10 tahun terakhir. Pedesaan tetap menjadi penghasil bahan baku untuk sub-sektor pangan dan tidak ada kegiatan nilai tambah yang berarti, kecuali penambahan jumlah penggilingan padi yang justru sudah melampaui kapasitas (over capacity).

5. Penurunan kontribusi PDRB yang terjadi pada sektor pertanian dan industri yang seharusnya memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan dan meningkatnya sektor perdagangan dan jasa dikabupaten Garut dan Tasikmalaya dalam kurun waktu 1999 sampai 2000 pada kenyataannya hanya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara nyata di kedua kabupaten tersebut. Kenyataan yang ada, penurunan kontribusi sektoral justru terjadi pada sektor pertanian dan industri yang merupakan sektor penghasil nilai tambah seiring dengan penurunan tingkat layanan infrastuktur.
6. Sektor pertanian hanya dapat dibangun apabila terjadi perkembangan yang nyata di sektor lain atau dengan kata lain transformasi struktural sektor pertanian dan transformasi sektoral hanya dapat berjalan menuju ke arah yang positif bila infrastruktur dibangun dengan baik. Selanjutnya sektor pertanian hanya dapat dibangun apabila terjadi pembangunan sektor diluar pertanian untuk menyerap tenaga kerja yang telah padat di pedesaan.

lampiran



LAMPIRAN 1

STUDI DESKRIPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN CISAYONG DAN KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA

*Centre For Agricultural Development Studies (CADS) – Tasikmalaya
April 2003*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP-I), telah membawa berbagai perubahan dalam perekonomian nasional. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,2 persen per tahun selama PJP-I, telah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dari US \$ 70 tahun 1969 menjadi US \$ 919 pada tahun 1995. Peningkatan pendapatan tersebut telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 54 persen awal PJP-I menjadi 15 persen pada akhir PJP-I (Bungaran Saragih, 2001).

Selanjutnya pula dikemukakan bahwa pelaksanaan PJP-I yang lalu juga telah berhasil mengubah struktur perekonomian nasional. Bila pada tahun 1969 pangsa sektor pertanian primer (*on-farm*) dalam PDB masih sekitar 40 persen, maka pada tahun 1995 pangsaanya tinggal 16 persen. Penurunan pangsa sektor pertanian primer ini diikuti peningkatan pangsa sektor industri dalam PDB, dari sekitar 10 persen pada tahun 1969 meningkat menjadi sekitar 23 persen pada tahun 1995. Meningkatnya pangsa sektor industri dalam PDB sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian (agroindustri). Besarnya kontribusi agroindustri dalam PDB, dan ekspor non migas dan ditambah dengan kontribusi pertanian primer, menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih berbasis sektor pertanian dan industri yang berhubungan dengan pertanian (*agro-based industries*).

Kenyataan bahwa perekonomian nasional saat ini masih berbasis pada sektor pertanian, semakin beralasan apabila kita juga menelusuri struktur kesempatan kerja nasional dan struktur perekonomian wilayah. Sampai saat ini ternyata bahwa sebagian besar angkatan kerja nasional yang berjumlah lebih kurang 100 juta orang, masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi yang berbasis sektor pertanian.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 telah ditetapkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999, khusus dalam bidang pembangunan ekonomi, terdapat perubahan paradigma dan arah pembangunan ekonomi ke depan. Bila ditelusuri lebih mendalam, esensi dari arah kebijakan ini adalah perubahan strategi industrialisasi yang sebelumnya berbasis pada bahan baku yang harus diimpor (*import resource-based*) kepada strategi industrialisasi baru yaitu berbasis pada sumberdaya domestik (*domestic resource-based*) dan perubahan pengelolaan pembangunan ekonomi yang semula lebih menonjolkan peran

pemerintah kepada partisipasi dan kreatifitas rakyat banyak beserta organisasinya (baik usaha kecil, menengah, koperasi) (Bungaran Saragih, 2001).

Selanjutnya dengan diluncurkannya UUD No. 22 Tahun 1999, telah terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan pembangunan nasional termasuk pembangunan ekonomi. Bila sebelumnya pengelolaan pembangunan ekonomi bersifat sentralistis *-top down-* dan lebih mengandalkan industri-industri besar berbasis impor, dimasa kini dan dimasa yang akan datang pengelolaannya berubah menjadi desentralistis *-bottom up-* dan mengandalkan industri-industri berbasis sumberdaya lokal. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi nasional akan terjadi pada setiap daerah dan perekonomian daerah inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia Baru.

Pembangunan ekonomi daerah ini makin dipertegas dengan GBHN 1999-2000 yang khususnya dikaitkan dengan kerangka pemberhasilan otonomi daerah. Hal tersebut berarti keberhasilan pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu takaran bagi keberhasilan otonomi daerah yang sedang digulirkan pemerintah saat ini.

Dalam perekonomian Indonesia sampai saat ini, salah satu sektor ekonomi yang berbasis sumberdaya domestik (sumberdaya alam, tenaga kerja rakyat, keahlian/keterampilan rakyat, teknologi) dan dikuasai oleh sebagian besar rakyat serta jika kita berketetapan hati untuk membangun ekonomi daerah maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun sistem Agribisnis yang berbasis sumberdaya lokal.

Hal ini disebabkan karena sampai saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasis pada sistem agribisnis baik dilihat dari pembentukan *Produk Domestik Regional Brutto*, penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi maupun struktur ekspor.

Selain itu pembangunan sektor agribisnis didasarkan kepada beberapa pertimbangan diantaranya makin terbatasnya lahan pertanian, makin bertambahnya penduduk dan keunggulan komparatif bahan baku lokal yang terjamin ketersediaannya serta kemampuan agribisnis dalam mentransformasikan keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif. Hal lainnya bahwa produk agribisnis memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang sangat besar, serta memiliki keterkaitan ekonomi ke berbagai sektor lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu strategi pembangunan ekonomi daerah yang paling tepat dan efektif adalah melalui pembangunan sistem agribisnis.

Sistem agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait diantara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan bidang pertanian.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas, maka pembangunan sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam menggapai cita-cita pembangunan Indonesia. Apalagi apabila dilihat dari konteks tantangan

global dengan era liberalisasi perdagangan dan investasi yang harus dihadapi mulai tahun 2003 di wilayah Asia Tenggara (AFTA) dan kemudian meluas ke kawasan Asia Pasific (APEC) pada tahun 2010. Berlangsungnya liberalisasi perdagangan akan membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi Agribisnis nasional.

Di samping diandalkannya sektor Agribisnis sebagai penggerak ekonomi nasional, dalam kenyataannya sektor ini menghadapi berbagai kendala dan tantangan serius berupa rendahnya kemampuan teknologi menyangkut proses produksi, pengolahan, pemasaran, masih terbatasnya sumberdaya manusia profesional dan sinkronisasi program pembangunan, belum terciptanya iklim kondusif serta masih kurangnya dukungan infrastruktur baik di sisi produksi maupun distribusi input maupun output.

Dimasa lalu, perhatian dan kebijakan pemerintah pada pengembangan infrastruktur pembangunan sudah sangat besar, hal ini dilakukan karena pemerintah memandang bahwa penyediaan infrastruktur memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian ke arah pengembangan Agribisnis. Namun demikian pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan tersebut pada umumnya belum dapat mengakomodir kepentingan pembangunan sektor agribisnis.

Disadari bahwa bukan hanya faktor penyediaan infrastruktur saja yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor Agribisnis tersebut, namun analisis parsial peran penyediaan infrastruktur terhadap perkembangan sektor agrinbisnis masih merupakan analisis yang sangat berguna dalam rangka mencari cara dan mekanisme penyediaan yang lebih baik.

Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk menggali lebih jauh mengenai perspektif pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor pertanian, khususnya wilayah studi di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Identifikasi Masalah

Penyediaan infrastruktur pertanian dalam mendukung perkembangan sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penyediaan infrastruktur ini merupakan pra-kondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Penyediaan infrastruktur yang baik akan memberikan ruang yang lebih besar bagi perkembangan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kapasitas ekonomi dan kontribusi yang tinggi dalam menunjang pertumbuhan dan pemerataan perekonomian secara keseluruhan, yaitu dalam mendukung perkembangan sektor pertanian dari pertanian subsisten kearah pertanian komersial.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur pertanian dalam menunjang pembangunan sektor pertanian di wilayah studi ?
2. Bagaimana intervensi penyediaan infrastruktur yang telah dilakukan dan sejauhmana pengaruhnya terhadap perkembangan sektor

pertanian di wilayah studi, khususnya yang berhubungan dengan proses transformasi pertanian ?

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah menganalisis kondisi penyediaan infrastruktur pertanian dalam menunjang terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah studi.

Adapun sasaran kajian ini adalah sebagai berikut : a) mengidentifikasi kondisi penyediaan infrastruktur pertanian dalam menunjang pembangunan sektor pertanian yang ada di wilayah studi serta b) mengidentifikasi intervensi penyediaan infrastruktur yang telah dilakukan dan sejauhmana pengaruhnya terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya menyangkut proses transformasi produk pertanian.

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah bahwasanya kajian ini dapat memberikan gambaran sepintas mengenai apa, bagaimana dan sejauhmana pengaruh penyediaan infrastruktur pertanian terhadap perkembangan sektor pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan positif dalam membuat kebijakan penyediaan infrastruktur pertanian bagi pengembangan sektor pertanian.

1.4. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini meliputi beberapa yaitu : a) lingkup substansial dan b) lingkup wilayah.

Lingkup substansial kajian ini ditekankan pada analisis mengenai kondisi pembangunan infrastruktur pertanian dalam menunjang perkembangan sektor pertanian ke arah agribisnis di wilayah studi. Kajian ini membahas analisis secara terpisah sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang berbeda tersebut. Analisis infrastruktur dibatasi hanya pada infrastruktur yang memiliki kaitan erat dengan aspek produksi serta distribusi input dan output sektor pertanian. Lebih jelasnya infrastruktur tersebut yakni : *Infrastruktur produksi*, yaitu infrastruktur yang terkait erat dengan proses produksi meliputi infrastruktur pengairan (irigasi) dan infrastruktur energi listrik. *Infrastruktur distribusi* meliputi infrastruktur transportasi (jalan), komunikasi (telpon) serta infrastruktur pasar komoditas pertanian (input dan output).

Sedangkan lingkup wilayah studi dilakukan di Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Manonjaya dimana kedua wilayah ini memiliki struktur ekonomi utamanya dari sektor pertanian.

1.5. Metodologi Penelitian

Kajian ini dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan. Tahap *pertama* merupakan tahap dimana dilakukan analisis data sekunder dan studi literatur menyangkut kondisi pembangunan infrastruktur dalam menunjang perkembangan sektor pertanian, mengembangkan sasaran penelitian dan

metodologi penelitian serta menyiapkan instrumen penelitian untuk pelaksanaan studi kasus di wilayah yang telah ditentukan. Tahap *kedua* dilakukan survey lapangan, kompilasi hasil survey, analisis data dan pembuatan laporan. Tahap *ketiga* adalah sosialisasi hasil studi melalui Seminar dengan sasaran peserta pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan LSM.

Berdasarkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan bahwa kajian ini dapat memberikan suatu pengertian yang lebih baik mengenai peran infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah secara umum dan sektor pertanian secara khusus.

Data *time series* digunakan sebagai sumber penelaahan kajian ini, data dimaksud meliputi data mengenai perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang disesuaikan dengan ketersediaan data.

Selanjutnya sebagai contoh kasus dipilih dua wilayah studi yakni Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Manonjaya serta masing-masing dari tiap Kecamatan dipilih satu desa, desa tersebut yaitu Desa Kamulyan dan Desa Sukajadi.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi penunjang lainnya, dalam penelitian ini digunakan dua cara pencarian data, yaitu :

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan : wawancara dengan petani, kelompok tani dan pihak lainnya yang terkait dengan materi kajian dengan menggunakan kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Demikian pula observasi visual dilakukan untuk melihat kondisi umum wilayah studi menyangkut infrastruktur dan kondisi sektor pertaniannya.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan laporan-laporan penelitian, data statistik dan studi literatur yang berhubungan dengan kajian ini.

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika pelaporan yang dikembangkan untuk pembahasan studi tentang perspektif infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian ini, terdiri dari :

Bagian ini menguraikan latar belakang diangkatnya studi ini, identifikasi masalah yang akan dijawab, maksud, tujuan dan manfaat dilakukannya studi, lingkup dan metodologi penelitian serta sistematika laporan.

BAB 1 Bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan persoalan, tujuan penelitian, lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pelaporan.

BAB 2 Bagian ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menyangkut perspektif pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian.

- BAB 3** Bagian ini menguraikan karakteristik umum wilayah studi beserta karakteristik penyediaan infrastruktur serta kondisi sektor pertaniannya.
- BAB 4** Bagian ini menguraikan hasil telaah contoh kasus yang merupakan analisis mikro tentang perspektif penyediaan infrastruktur dan pengaruhnya terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah studi.
- BAB 5** Bagian ini menguraikan kesimpulan studi, kelemahan studi serta saran bagi studi lanjutan dan pihak terkait dengan penyediaan infrastruktur.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA :

INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pembangunan pertanian tidak dapat dilaksanakan hanya oleh petani sendiri. Pertanian tidak dapat berkembang melampaui tahap subsisten tanpa adanya perkembangan yang sesuai pada bidang kehidupan lainnya dari bangsa dimana pertanian itu dilaksanakan (A.T. Mosher, 1987).

Selanjutnya dikemukakan bahwa minimal lima macam fasilitas dan jasa (*services*) yang harus tersedia bagi para petani jika bidang pertanian hendak dimajukan. Masing-masing merupakan syarat pokok (*essential*). Tanpa salah satu dari padanya tidak akan ada pembangunan pertanian. Apabila semuanya lengkap, barulah pembangunan itu dapat terjadi, bahkan tanpa adanya satupun faktor pelancar (*accelerators*). Kelima syarat pokok yang dimaksud yakni : 1) Pasar untuk hasil usahatani, 2) Teknologi yang selalu berubah, 3) Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal, 4) Perangsang produksi bagi petani dan 5) Pengangkutan.

Penjelasan atas lima syarat pokok pembangunan pertanian yang dimaksud pada keterangan sebelumnya adalah sebagai berikut :

a. Pasar untuk hasil pertanian.

Pembangunan pertanian pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan produksi hasil usahatani. Untuk hasil-hasil produksi ini memerlukan pasar serta harga yang layak guna membayar/mengganti kembali biaya-biaya tunai dan usaha yang telah dikeluarkan petani pada saat melaksanakan produksinya.

b. Teknologi yang selalu berubah

Peningkatan produksi pertanian diantaranya adalah sebagai akibat penggunaan teknologi atau metode-metode dalam budidaya pertanian. Tidaklah mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan apabila hanya mengandalkan teknologi yang tradisional. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pembangunan pertanian dapat berjalan terus maka harus selalu terjadi perubahan. Apabila perubahan ini terhenti, maka pembangunan pertanian pun terhenti.

Namun harus disadari pula bahwa tidak selalu teknologi dapat diaplikasikan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pembatas yang dimiliki.

c. Tersedianya sarana produksi secara lokal

Kemajuan pembangunan pertanian juga memerlukan sarana produksi yang dapat diperoleh dengan murah, mudah dan tepat waktu.

d. Perangsang produksi bagi Petani

Perangsang yang dapat secara efektif dapat mendorong petani meningkatkan produksinya adalah terutama yang menyangkut : a)

perbandingan harga yang menguntungkan, b) Bagi hasil yang wajar dan c) tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya.

e. Pengangkutan

Syarat pokok kelima bagi pembangunan pertanian adalah sarana pengangkutan. Tanpa sarana pengangkutan yang efisien dan murah, keempat syarat pokok lainnya tidak dapat diadakan secara efektif. Pentingnya transportasi ini juga dihubungkan dengan karakteristik produk pertanian yang tersebar luas dan terpencar-pencar areal produksinya, sehingga untuk pengumpulan produk memerlukan jaringan transportasi yang juga tersebar untuk membawa sarana dan alat produksi ke tiap lokasi usahatani dan kemudian mengangkut produk usahatani untuk disampaikan kepada konsumen akhir.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan pertanian, diperlukan juga faktor-faktor lain yang merupakan faktor pelancar yang dapat mempercepat proses pembangunan pertanian. Faktor-faktor pelancar tersebut adalah sebagai berikut : a) Pendidikan pembangunan, b) Kredit produksi, c) Kegiatan bersama (kelompok tani), d) Perbaikan dan perluasan tanah pertanian dan e) Perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Sistem pertanian cenderung berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari pola pertanian subsisten dan berskala kecil ke pola pertanian keluarga yang lebih besar dan lebih terdiversifikasi, hingga akhirnya ke pola produksi massal yang dioperasikan dengan skala yang lebih besar. Beberapa karakteristik umum dari tahapan besar dalam transformasi pertanian atau proses evolusi pertanian (Michael P. Todaro, 1994) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap 1.

Pertanian Subsisten : Pencegahan Resiko, Ketidakpastian dan Upaya Mempertahankan Kelangsungan Hidup

Dalam pertanian subsisten klasik, sebagian besar output dikonsumsi sendiri (sebagian kecil sisanya dijual atau diperdagangkan di pasar-pasar lokal); produk andalannya adalah beberapa jenis sereal. Output dan produktivitasnya relatif rendah karena hanya peralatan tradisional yang sederhana yang digunakan; Investasi modal minimal, karena lahan dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama. Terbatasnya teknologi, kelembagaan sosial yang kaku, pasar yang terpisah jauh dan terbatasnya jaringan komunikasi cenderung mengurangi tingkat produksi.

Pertanian subsisten mempunyai resiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Pada wilayah-wilayah tertentu dimana lahan pertanian sangat sempit dan pengolahannya sangat tergantung pada curah hujan yang tidak dapat dipastikan kehadirannya, maka hasil rata-rata biasanya rendah. Dalam keadaan demikian, motivasi pokok dalam kehidupan petani mungkin bukan meningkatkan pendapatannya melainkan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Ini berarti bahwa apabila resiko dan ketidakpastian sangat tinggi maka petani kecil mungkin

segitu untuk beralih dari teknologi dan pertanian tradisional yang telah diketahuinya bertahun-tahun yang lalu kepada cara baru yang menjamin hasil lebih tinggi, karena menurut petani cara baru tersebut memungkinkan kegagalan yang lebih besar.

Tahap 2.

Transisi Menuju Usaha Tani Campuran dan Diversifikasi

Suatu hal yang musykil dan tidak realistis apabila kita berfikir bahwa sistem pertanian tradisional yang telah berlangsung beberapa generasi dapat diubah menjadi sistem pertanian komersial sangat terspesialisasi secara seketika.

Diversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang logis dalam transisi dari produksi subsisten menjadi produksi spesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pokok tidak mendominasi hasil pertanian karena sudah pula menanam tanaman yang lain secara terpadu, baik tanaman buah-buahan, hortikultura, tanaman tahunan bahkan peternakan dan perikanan. Kegiatan baru ini dapat memberikan kesempatan kerja selama beberapa waktu sewaktu terjadi "pengangguran terselubung". Usahatani diversifikasi juga dapat mengurangi dampak kegagalan panen tanaman pokok dan memberikan keamanan pendapatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Keberhasilan atau kegagalan usaha transformasi pertanian tradisional bukan hanya tergantung pada kemampuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya saja, tapi yang lebih penting tergantung pada kondisi sosial, komersial dan kelembagaan dimana ia harus berfungsi.

Tahap 3.

Dari Yang Beragam ke Spesialisasi : Usahatani Komersial Yang Modern

Usahatani berspesialisasi menggambarkan tahap akhir dan maju dalam perusahaan individu dalam ekonomi pasar campuran. Ini adalah tipe pertanian yang umumnya ada di negara-negara yang sudah maju. Hal ini berkembang sebagai tanggapan terhadap dan sejalan dengan pembangunan bidang-bidang perekonomian nasional lainnya.

Meningkatnya standar kehidupan secara umum, kemajuan biologi dan teknik serta perluasan pasar nasional dan internasional telah menghasilkan daya dorong utama untuk pemunculan dan pertumbuhannya.

Dalam pertanian terspesialisasi, pengadaan pangan untuk keperluan keluarga ditambah dengan sejumlah surplus yang dapat dijual (*marketable surplus*) tidak lagi merupakan tujuan pokok. "Keuntungan" komersial murni merupakan kriteria keberhasilan dan hasil per hektar yang maksimum dari upaya manusia (irigasi, pupuk, pestisida, bibit unggul dll) serta sumberdaya alam menjadi objek kegiatan pertanian. Secara singkat, produksi diorientasikan untuk keperluan pasar.

Gambaran umum semua usahatani yang terspesialisasi adalah terletak pada titik beratnya yang mengelola sejenis tanaman secara khusus; menggunakan modal secara intensif, banyak menggunakan teknik produksi yang hemat tenaga kerja, skala ekonomi yang dapat mengurangi biaya per satuan dan memaksimalkan keuntungan.

Menurut Michael P. Todaro (1994), bahwa apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan pedesaan di negara-negara berkembang adalah untuk memperbaiki tingkat kehidupan di pedesaan secara progresif dengan cara meningkatkan pendapatan, keluaran (output) dan produktivitas petani kecil, maka penting untuk melakukan identifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Diantaranya termasuk merumuskan tiga landasan pokok yang merupakan kondisi untuk merealisasikan strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang berorientasi pada rakyat. Tiga kondisi yang diperlukan untuk Pembangunan pedesaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Landasan 1

Struktur usahatani dan pola penggunaan lahan harus disesuaikan dengan tujuan ganda, yaitu peningkatan produksi pangan dan lebih pemerataan manfaat dari kemajuan keagrariaan.

Pembangunan Pertanian dan pedesaan bermanfaat bagi banyak orang dan akan dapat berhasil apabila ada usaha bersama-sama antara pemerintah dan semua komponen termasuk petani. Tahap pertama adalah kebijakan *land reform*, kebijakan ini sangat diperlukan karena keterikatan petani kecil atas lahannya sangat mendalam. Keterikatan tersebut lebih merupakan suatu ikatan bathin, yang menyangkut harga diri dan kebebasan. Apabila mereka melepas lahannya atau menjadi miskin, bukan hanya lahiriahnya saja yang rusak, tetapi juga lebih penting adalah hancurnya kepercayaan pada diri sendiri serta hilangnya semangat untuk berusaha memperbaiki diri dan keluarganya.

Landasan 2 : Kebijakan yang menunjang

Semua manfaat dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak akan dapat direalisasi kecuali kalau suatu sistem dukungan pemerintah diciptakan untuk memberikan rangsangan yang diperlukan, kesempatan-kesempatan ekonomi dan kemudahan untuk mendapatkan input yang diperlukan yang memungkinkan para petani kecil meningkatkan output dan produktivitas mereka.

Walaupun landasan pertama sangat penting, tetapi hal tersebut tidak akan efektif dan bahkan mungkin mengurangi produktivitas apabila tidak disertai dengan adanya perubahan kelembagaan yang mengendalikan produksi di pedesaan (misalnya : bank, pelepas uang, penyalur benih dan pupuk dll); jasa-jasa pelayanan pemerintah (misalnya penyuluh teknik dan pendidikan, agen kredit umum, fasilitas penyimpanan dan pemasaran, transportasi pedesaan, perbaikan jalan dll); dan dalam kebijakan harga pemerintah yang berkenaan dengan masukan (menghilangkan distorsi harga faktor produksi) dan output (membayar sesuai harga pasar kepada para petani). Kesimpulannya bahwa

dibeberapa daerah yang tidak memerlukan *land reform* pun, tetapi produktivitas dan pendapatannya rendah, jaringan-jaringan pelayanan pendukung yang luas disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang harga yang dikaitkan dengan kedua kebutuhan tadi (input dan output) adalah merupakan kondisi yang penting untuk kelangsungan kemajuan pertanian.

Landasan 3 : Tujuan Pembangunan Terpadu

Pembangunan pedesaan, masih sangat tergantung pada kemajuan-kemajuan petani kecil, bahkan lebih dari itu. Hal itu meliputi : (1) upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, dan pembenahan pendidikan, kesehatan, dan gizi perumahan, serta berbagai bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan lainnya; (2) mengurangi ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan pedesaan dan ketidakseimbangan pendapatan dan kesempatan-kesempatan ekonomi antara pedesaan dengan perkotaan; dan (3) kapasitas sektor pedesaan untuk menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu.

BAB 3

KARAKTERISTIK UMUM WILAYAH KECAMATAN CISAYONG DAN KECAMATAN MANONJAYA

3.1. Gambaran Wilayah Studi

Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Manonjaya yang dipilih sebagai dua wilayah studi adalah dua diantara sejumlah 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sejak Kabupaten Tasikmalaya terbagi menjadi Kabupaten dan Pemerintahan Kota pada tanggal 17 Oktober 2001. Dari 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terdapat sejumlah 345 Desa, termasuk Kecamatan baru hasil pemekaran wilayah dengan dasar hukum Perda Nomor 25 dan 41 pada tahun 2000.

3.2. Tanah

Menurut data BPS Kabupaten Tasikmalaya dan BAPEDA Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001, bahwa luas daerah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemisahan dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 268.090 hektar yang sebagian besarnya yaitu seluas 218.428 hektar merupakan tanah darat/tanah bukan sawah dan selebihnya yaitu sebanyak 49.662 hektar merupakan tanah sawah.

Dua wilayah studi masing-masing Kecamatan Manonjaya memiliki luas wilayah 4.290 hektar yang terbagi menjadi tanah sawah seluas 1.011 hektar dan tanah bukan sawah seluas 3.279 ha, sedangkan Kecamatan Cisayong memiliki luas 4.610 ha yang terbagi seluas 1.757 ha berupa tanah sawah dan 2.853 adalah tanah bukan sawah.

3.3. Iklim

Hasil pengukuran rata-rata curah hujan/bulan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 278,55 mm/bulan dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 37. Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong yang merupakan dua wilayah studi tidak memiliki data curah hujan. Hal ini disebabkan karena dalam pengukuran curah hujan ini ditemukan beberapa kendala data kosong yang disebabkan oleh rusaknya alat penakar hujan yang dimiliki, sehingga data curah hujan di beberapa wilayah tidak ada.

3.4. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Tasikmalaya setelah terpisah dengan kota Tasikmalaya adalah sebanyak 1.535.859 orang dengan luas wilayah seluas 2.563,35 Km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk per Kilometer persegiannya adalah 599 penduduk. Dua wilayah studi masing-masing Kecamatan Manonjaya memiliki jumlah penduduk 54.484 orang dengan luas wilayah 42,15 m² dan rata-rata kepadatan penduduknya 1.293 orang/km². Sementara Kecamatan Cisayong memiliki jumlah penduduk 48.970 orang, luas wilayah 48,33 km² dengan rata-rata kepadatan 1.013 orang per km².

Dari jumlah penduduk sebanyak 1.535.859 orang terdiri dari 765.193 orang penduduk perempuan dengan sex rasionya sebesar 99. Sex ratio sebesar ini

tidak berubah sejak tahun 1988. Angka rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,65 persen. Sedangkan sex ratio Kecamatan Manonjaya adalah 105 dan Kecamatan Cisayong adalah 97.

3.5. Pertanian

Secara umum produktivitas padi sawah di Kabupaten Tasikmalaya fluktuatif dengan kecenderungan penurunan tiap tahunnya seperti ditunjukkan pada tahun 1997 dengan produktivitas sebesar 58,29 kuintal per hektar turun menjadi 49,09 kuintal per hektar pada tahun 2001. Demikian juga tingkat produksinya, pada tahun 2000 sebesar 567.006 ton, pada tahun 2001 turun menjadi 526.942. Hal ini diantaranya terkait dengan luas panen yang semakin menyusut dimana pada tahun 2000 luas panen sebesar 110.801 hektar turun menjadi 107.335 hektar pada tahun 2001 (Dinas Pertanian Tan.Pangan dan Hortikultura Kab.Tasikmalaya, 2001).

Untuk padi gogo, baik produktivitas, produksi maupun luas panennya juga mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun sebelumnya, produktivitas adalah 25,24 kuintal perhektar, namun tahun berikutnya menurun menjadi 21,35 kuintal perhektar. Produksinya turun dari 23.916 ton turun menjadi 17.602 ton dan juga luas panennya menurun dari 9.474 hektar menjadi 8.246 hektar.

Demikian pula untuk beberapa komoditas palawija, mengalami hal yang sama. Fluktuasi dan kecenderungan penurunan ini diantaranya disebabkan oleh berkurangnya areal tanam komoditas yang bersangkutan. Walaupun pada beberapa komoditas terjadi peningkatan produktivitas seperti pada kedelai, ubi kayu, ubi jalar.

Untuk tanaman sayuran, pada beberapa tahun belakangan ini didominasi oleh komoditas Cabe dengan produksinya sebesar 5.575 ton bila dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan untuk komoditas buah-buahan, buah Salak menunjukkan dominasinya dengan menghasilkan produksi sebesar 452.209 kuintal diikuti oleh tanaman pisang yang produksinya sebesar 303.341 kuintal.

3.6. Perkebunan

Produksi perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berbentuk hasil olahan pada beberapa tahun belakangan ini didominasi oleh hasil olahan buah kelapa sebanyak 27.500 ton, kemudian diikuti oleh hasil olahan daun teh sebanyak 6.746,14 ton dan kemudian daun mendong sebagai bahan untuk anyam-anyaman sebanyak 1.020,93 ton.

Sedangkan produksi yang merupakan hasil/produk langsung dari perkebunan didominasi oleh buah kelapa segar yaitu sebanyak 27.600 ton, diikuti oleh produk teh, kopi dan karet dengan produksi sebesar 8.984,25 ton, 3.396,03 ton dan 1.378,25 ton.

3.7. Peternakan

Komoditas peternakan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya cukup beragam, tidak hanya ternak besar saja seperti sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda, tetapi juga terdiri dari ternak kecil seperti kambing, domba, ayam Ras baik petelur maupun pedaging, ayam Buras, Itik.

Produksi telur per hari menurut data tahun terakhir adalah sebanyak 76.491 butir telur atau seberat 4.499 kg atau senilai Rp. 31.271.206.-. Sedangkan produksi ayam ras pedaging per minggu pada tahun terakhir adalah mencapai 460.001,40 kg yang kontribusi terbesarnya adalah dari Kecamatan Pagerageung sebesar 65.875,44 kg.

3.8. Kehutanan

Produksi kayu rimba, masih merupakan hasil terbesar jika dibandingkan dengan jenis kayu lainnya dengan produksi sebesar 13.629.120 M3 dengan nilai ditaksir sebesar Rp. 1.033.085.491 atau sekitar 57 persen dari total nilai produksi seluruh jenis kayu di Kabupaten Tasikmalaya.

3.9. Perikanan

Produksi ikan dari budidaya ikan air tawar di Tasikmalaya pada umumnya berfluktuasi. Pada tahun terakhir dihasilkan sebanyak 20.833 ton dengan nilai diperkirakan sebesar Rp. 160.035.500.000.-. Ikan mas merupakan jenis ikan yang dibudidayakan paling besar dibandingkan dengan jenis ikan lainnya, yaitu sebesar 5.904 ton atau senilai Rp. 67.344.500.000.-

Sedangkan produksi ikan laut pada tahun terakhir hanya menghasilkan produksi 259,7 ton atau setara nilai Rp. 1.166.450.000.- Hal yang masih rendah ini masih sangat terkait dengan kemampuan nelayan untuk melaut yang masih terbatas dan hanya mengandalkan kapal-kapal tradisional.

3.10. Listrik

Banyaknya tenaga listrik yang disalurkan oleh PT PLN Distribusi Jawa Barat ke PLN Cabang Tasikmalaya menunjukkan peningkatan tiap tahun. Mulai tahun 2001, jatah mulai dipisahkan antara wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan pemerintahan kota. Pelanggan listrik secara umum dibedakan menjadi 7 kategori yaitu : a) Rumahtangga dan sosial, b) usaha, c) Instansi pemerintah, d) Peribadatan/sekolah, e) Industri, f) Hotel dan g) Penerangan jalan umum.

3.11. Perhubungan

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tasikmalaya tiap tahun menunjukkan peningkatan, baik kendaraan bermotor baru maupun mutasi dari daerah lain. Kendaraan bermotor dikategorikan menjadi : a) Bus, b) Non bus, c) Beban, d) Sepeda motor.

Kereta api merupakan sarana angkutan yang banyak dimanfaatkan oleh para pengguna alat transportasi karena praktis dan ekonomis. Tidak ada

perubahan yang berarti dari sarana dan prasarana perhubungan dengan kereta api ini.

Jasa telekomunikasi yang ada sampai saat ini menunjukkan peningkatan, baik dari sarana dan prasarana yang dibangun maupun pengguna jasa telekomunikasi.

3.12. Keuangan Daerah

Realisasi penerimaan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan peningkatan, pada tahun ini tercatat sebesar Rp. 461,96 Milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp. 226,03 Milyar. Prosentase kenaikan penerimaan daerah adalah sekitar 2,04 % dari sebelumnya.

BAB 4

PERSPEKTIF PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN MANONJAYA DAN KECAMATAN CISAYONG

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka lingkup substansial kajian ini diprioritaskan pada analisis mengenai kondisi penyediaan infrastruktur pertanian dalam menunjang perkembangan sektor pertanian ke arah agribisnis di wilayah studi. Kajian ini merupakan contoh kasus dan membahas secara terpisah sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang berbeda tersebut. Analisis infrastruktur dibatasi hanya pada infrastruktur yang memiliki kaitan erat dengan aspek produksi serta distribusi input dan output sektor pertanian. Lebih jelasnya infrastruktur tersebut yakni : (1) *Infrastruktur produksi* yaitu infrastruktur yang terkait erat dengan proses produksi meliputi infrastruktur pengairan (irigasi) dan infrastruktur energi listrik; (2) *Infrastruktur distribusi* meliputi infrastruktur transportasi (jalan), komunikasi (telpon) serta infrastruktur pasar komoditas pertanian (input dan output) dan (3) Kelembagaan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani.

Guna pembahasan secara mikro, pada bagian ini pula akan diinventarisir identitas petani sebagai Responden di wilayah studi menyangkut umur, pendidikan, pengalaman berusaha, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan serta kepemilikan lahan beserta luasan lahan yang dikelolanya.

4.1. Identitas Petani Responden di Wilayah Studi

A. Umur Petani Responden

Keadaan umur petani responden di wilayah studi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar umur petani responden berkisar antara 30 – 64 tahun yaitu sebanyak 48 orang (80 persen), sisanya berumur lebih dari 64 tahun yaitu sebanyak 12 orang (20 orang). Dengan data ini dapat dilihat bahwa sebagian besar petani responden berada pada usia produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Said Rusli (1984) bahwa penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk berumur 15-64 tahun. Diharapkan bahwa dengan usia yang masih produktif ini memungkinkan untuk menerima inovasi baru di bidang pertanian khususnya guna membawa kemajuan pada usahataniya sekaligus meningkatkan pendapatan keluarganya.

Namun demikian masih ditemukan petani responden yang berumur lebih dari 64 tahun namun dalam kenyataannya masih berusahatani. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa berusahatani adalah merupakan *way of life* sehingga seluruh usianya digunakan untuk berusahatani.

Data juga memberikan kenyataan lain bahwa usahatani sekarang ini merupakan bidang usaha yang kurang diminati generasi muda, sebagai bukti bahwa umur terendah yang menjadi petani di wilayah studi adalah 30 tahun. Generasi muda yang berumur dibawah 30 tahun lebih memilih mencari pekerjaan di sektor industri dan jasa atau perdagangan di perkotaan yang dapat memberikan harapan penghasilan lebih besar dengan beban resiko usaha yang relatif kecil. Pada akhirnya kondisi seperti ini

bertendensi mengarahkan usahatani hanya dikerjakan oleh orang-orang yang telah berusia lanjut.

B. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menunjukkan tingkat pengetahuan dan perilaku seseorang serta akan mempengaruhi cara berfikir petani untuk menerima sesuatu inovasi yang baru dan meningkatkan kemampuan petani dalam menyikapi situasi dan menangkap peluang yang dapat diraih untuk keberhasilan pengelolaan usahatannya. Tingkat pendidikan petani responden selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagian besar petani responden yaitu 44 orang (73,33 persen) adalah tamatan SD atau sederajat, 6 orang (10 persen) tamat SMP, 8 orang (13,34 persen) tamatan SMU dan terdapat 2 orang petani lulusan PT (3,33 persen). Masih banyaknya petani responden yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD kemungkinan terkait dengan umur yang rata-rata sudah tua, faktor lingkungan serta faktor ekonomi keluarga petani sendiri. Petani yang menamatkan pendidikannya sampai perguruan tinggi diharapkan dapat membawa rekan-rekan petani yang lain untuk merubah pola berusahatannya kearah yang lebih baik.

Namun demikian, tingkat pendidikan sebagian besar petani responden yang relatif rendah terkompensasi dengan pengalaman usaha yang cukup lama. Sehingga petani masih dapat diharapkan mengambil keputusan-keputusan usaha yang tepat berdasarkan pada rasionalisasi pengalaman mereka.

C. Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusaha petani responden cukup beragam, terdapat sebanyak 22 orang (36,67 persen) yang berpengalaman dalam usahatannya selama lebih dari 20 tahun, sisanya berpengalaman antara 1 – 10 tahun sebanyak 27 orang (45 persen) dan berpengalaman antara 11-20 tahun sebanyak 11 orang (18,33 persen).

Adanya petani responden yang berpengalaman lebih dari 20 tahun menunjukkan bahwa kegiatan usahatani adalah merupakan kegiatan turun temurun dari nenek moyangnya dan merupakan jalan hidupnya.

Pengalaman petani responden yang cukup lama dalam pengelolaan usahatani ini dapat menutupi kelemahan tingkat pendidikan, sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan usahatannya dengan lebih baik lagi.

D. Jumlah tanggungan Keluarga

Keluarga tani biasanya terdiri dari istri dan anak serta tidak menutup kemungkinan ada anggota keluarga lain yang menjadi beban tanggungan petani sebagai kepala keluarga. Semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin besar pula beban ekonomi yang harus dipikul.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, diketahui bahwa keluarga tani yang memiliki tanggungan antara 1-2 orang adalah sebanyak 22 orang (36,67 persen), antara 3-4 orang sebanyak 21 responden (35 persen) dan tanggungan lebih dari 4 orang sebanyak 28,33 persen (17 responden).

Petani yang terlalu banyak memiliki tanggungan keluarga memiliki kecenderungan yang kecil untuk melakukan investasi dalam usahataniannya sehingga pada umumnya produktivitas menjadi rendah dan pendapatan keluarga taninya juga rendah.

Tabel 1
Identitas Petani Responden di Kec. Cisayong dan Kec. Manonjaya Tahun 2003

No.	Uraian	Responden		Ket.
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Umur :			
	a. 30 – 46 tahun	18	30	
	b. 47 – 64 tahun	30	50	
	c. > 64 tahun	12	20	
	Total	60	100	
2.	Pendidikan :			
	a. SD atau sederajat	44	73,33	
	b. SMP atau sederajat	6	10	
	c. SMA atau sederajat	8	13,34	
	d. Perguruan Tinggi	2	3,33	
Total	60	100		
3.	Pengalaman berusaha :			
	a. 1-10 tahun	27	45	
	b. 11 – 20 tahun	11	18,33	
	c. > 20 tahun	22	36,67	
	Total	60	100	
4.	Jumlah tanggungan keluarga :			
	a. 1- 2	22	36,67	
	b. 3-4	21	35	
	c. > 4	17	28,33	
	Total	60	100	
5.	Sumber penghasilan utama:			
	a. Pertanian	51	85,00	
	b. Non-pertanian	9	15,00	
	Total	60	100	
6.	Kepemilikan lahan usaha :			
	a. Sawah :			
	◆ 0,10 – 0,25 ha	30	50,00	
	◆ 0,26 – 0,40 ha	19	31,66	
	◆ > 0,40 ha	10	16,67	
	◆ Tidak punya	1	1,67	
	Total	60	100	
	b. Lahan kering :			
	◆ 0,10 – 0,25 ha	14	23,33	
	◆ > 0,40 ha	--	--	

◆ Tidak punya	46	76,67	
Total	60	100	
c. Kolam :			
◆ 0,10 – 0,25 ha	27	45,00	
◆ Tidak punya	33	55,00	
Total	60	100	

Sumber : *Data Primer, 2003*

Sumber Penghasilan Utama

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar petani responden yaitu sebanyak 51 orang (85 persen), penghasilan utamanya berasal dari sektor pertanian dan hanya 9 orang responden (15 persen) yang sumber penghasilan utamanya dari sektor non-pertanian.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat pedesaan memang sangat tergantung kepada sektor pertanian dan sektor ini merupakan kegiatan pokok dan utama dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan.

E. Kepemilikan Lahan Usaha

Menyangkut aspek kepemilikan lahan usaha dalam bentuk sawah ternyata bahwa kepemilikan lahan usaha di wilayah studi sangat kecil. Hanya 10 orang (16,67 persen) yang memiliki lahan diatas 0,40 ha, sisanya 19 orang (31,66 persen) memiliki lahan dengan luasan antara 0,26 ha- 0,40 ha, kemudian antara 0,10 ha – 0,25 ha sebanyak 30 orang (50 persen), bahkan ada seorang petani responden yang tidak memiliki lahan garapan milik sendiri.

Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata kepemilikan lahan di wilayah studi termasuk kategori sempit, sehingga untuk melaksanakan usahatani dengan orientasi komersil sangat sulit dilaksanakan.

Sedangkan untuk jenis lahan kering hanya 14 orang (23,33 persen) responden yang memiliki lahan kering, sisanya sebanyak 46 orang (76,67 persen) tidak memiliki lahan kering.

Demikian pula keterbatasan pemilikan lahan ini dialami pada kepemilikan kolam, hanya 27 orang (45 persen) petani responden yang memiliki kolam dengan luasan antara 0,1 ha – 0,25 ha. Sisa responden menyatakan tidak memiliki lahan jenis ini.

4.2. Infrastruktur Produksi

4.2.1. Irigasi

Bertambahnya permintaan akan bahan makanan menyebabkan meningkatnya posisi penting irigasi dan drainase di daerah tropis. Pengendalian air yang lebih baik memainkan peranan yang sangat penting bagi pencapaian potensi produksi maksimum dari varietas-varietas padi modern dan merupakan alat yang paling menentukan dalam meningkatkan

produksi bahan makanan (Horning, 1970 *dalam* Effendi Pasandaran & Donald C. Taylor, 1984).

Demikian pula halnya di wilayah studi, peran infrastruktur pengairan/irigasi adalah sangat penting dalam hubungannya dengan pencapaian produksi pertanian. Kondisi penyediaan infrastruktur pengairan/irigasi dihubungkan dengan luas tanah dan unsur kelembagaan pengelolanya di wilayah studi dapat dilihat berikut ini.

Luas tanah di kedua wilayah studi terbagi atas tanah sawah dan bukan sawah, pada tahun 1999 dan 2000 luas tanah sawah tidak ada perubahan yaitu sebesar 4.275 hektar atau sekitar 7,69 persen dari luas tanah sawah di Kabupaten Tasikmalaya. Demikian pula untuk tanah bukan sawah tidak ada perubahan yakni seluas 10.118 hektar atau sekitar 4,41 persen dari luasan tanah bukan sawah di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan pada tahun 2001 terjadi penurunan luas baik pada lahan sawah maupun pada lahan bukan sawah, seperti dapat dilihat pada Tabel 2. Penurunan luas tanah ini diakibatkan oleh terbaginya wilayah Tasikmalaya menjadi Wilayah kota dan Kabupaten.

Tabel 2
Luas Tanah di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong

Macam Penggunaan	Luas Tanah (hektar)		
	1999	2000	2001
Tanah Sawah	4.275	4.275	2.768
<i>Kab. Tasikmalaya (keseluruhan)</i>	55.549	55.547	49.662
Bukan Sawah	10.118	10.118	6.132
<i>Kab. Tasikmalaya (keseluruhan)</i>	229.097	229.097	218.428

Dari luas tanah sawah yang ada di wilayah studi, maka dapat dibagi menurut sistem pengairan yang digunakan yaitu yang menggunakan Irigasi Teknis, setengah teknis, sederhana, desa/non PU dan tadah hujan seperti dapat dilihat pada Tabel 3. Secara umum tidak ada perubahan yang berarti dalam penggunaan sistem pengairan, khususnya pada tahun 1999 dan 2000. Sistem pengairan yang digunakan di wilayah studi sebagian besar menggunakan irigasi desa/non PU sebesar 2.919 hektar, diikuti irigasi sederhana seluas 269 hektar. Sedangkan irigasi teknis hanya seluas 140 hektar dan irigasi setengah teknis seluas 104 hektar. Sistem pengairan yang digunakan oleh para petani di wilayah studi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur jaringan pengairan/irigasi yang ada, pada umumnya yang cukup tersedia adalah jaringan irigasi desa/non PU. Sedangkan sebagian kecil petani saja yang telah merasakan manfaat adanya jaringan irigasi teknis dan setengah teknis.

Tabel 3
Luas Tanah Sawah menurut Sistem Pengairan di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong

Jenis	Luas Tanah (hektar)		
	1999	2000	2001
Irigasi Teknis	140	140	140
Irigasi ½ Teknis	104	104	104
Sederhana	269	269	237
Desa/Non PU	2.919	2.919	1.679

Tadah Hujan	843	843	608
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	55.549	55.547	49.662

Sumber: Monografi Kecamatan

Sistem pengairan menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 4, secara umum tidak ada perubahan yang berarti di wilayah studi, walaupun di tingkat Kabupaten terjadi perubahan luas tanah menurut penggunaannya. Perubahan tersebut diantaranya luas tanah yang menggunakan irigasi teknis dapat meningkatkan jumlah lahan yang dapat ditanami padi lebih dari 2 kali setahun dari sebelumnya seluas 8.622 hektar (1999) menjadi 8.917 hektar (2000). Demikian pula pada irigasi setengah teknis meningkat dari 3.639 hektar (1999) menjadi 4.323 hektar (2000).

Sedangkan untuk irigasi sederhana, irigasi desa/non PU dan tadah hujan terjadi penurunan luas lahan. Kemungkinan besar penurunan luas ini terjadi sebagai akibat peningkatan kualitas sistem jaringan pengairan.

Luas tanah bukan sawah sebagian besar digunakan sebagai lahan kering dengan prosentase sebesar 4,24 persen dari luas keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya (Tabel 5). Luasannya tidak ada perubahan baik pada tahun 1999 maupun tahun 2000. Hal ini terkait dengan topografi dan bentuk wilayah lokasi studi.

Tabel 4

Luas Tanah dan Sistem Pengairan menurut Penggunaannya di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong

Sistem Pengairan/Penggunaan tanah dalam setahun	Luas Tanah (hektar)		
	1999	2000	2001
Irigasi Teknis :			
Ditanami padi >2 x setahun	140	140	140
Ditanami padi 1 kali	--	--	--
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	8.622	8.917	5.108
Irigasi Setengah Teknis :			
Ditanami padi >2 x setahun	104	104	104
Ditanami padi 1 kali	--	--	--
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	3.639	4.323	3.192
Irigasi Sederhana :			
Ditanami padi >2 x setahun	188	188	156
Ditanami padi 1 kali	81	81	81
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	4.078	3.842	3.952
Irigasi Desa/ Non PU :			
Ditanami padi >2 x setahun	2.767	2.767	1.679
Ditanami padi 1 kali	152	152	--
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	25.636	24.970	23.394
Tadah Hujan :			
Ditanami padi >2 x setahun	566	566	315
Ditanami padi 1 kali	277	277	293
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	13.574	13.495	14.016

Sumber : Monografi Kecamatan

Tabel 5**Luas Tanah Bukan Sawah di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong**

Macam Penggunaan	Luas Tanah (hektar)		
	1999	2000	2001
Tanah Kering	9.725	9.725	5.899
Lainnya	393	393	233
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	229.097	229.097	218.428

Sumber : Monografi Kecamatan

Dari sejumlah 9.725 hektar lahan kering yang ada di wilayah studi, maka bagian terluas digunakan sebagai tegalan/kebun yaitu seluas 4.079 hektar, diikuti lahan untuk hutan negara seluas 2000 hektar (Tabel 6). Terdapat perubahan pada penggunaan lahan kering yang semula sebagai padang rumput pada tahun 1999 menjadi lahan yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2000 yaitu seluas 58 hektar. Hal ini kemungkinan terkait dengan keterbatasan mengelola lahan kering ybs karena lahan yang marginal.

Tabel 6**Luas Tanah Kering Menurut Penggunaannya di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong**

Macam Penggunaan	Luas Tanah (hektar)		
	1999	2000	2001
Pekarangan	1.558	1.558	866
Tegal/Kebun	4.079	4.079	2.433
Ladang Huma	116	116	75
Padang Rumput	58	--	--
Sementara Tidak digunakan	--	58	--
Hutan Rakyat	1.834	1.834	1.302
Hutan Negara	2.000	2.000	1.170
Perkebunan	--	--	--
Lain-lain	80	80	53
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	224.338	224.239	214.652

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa dari sejumlah 393 hektar lahan untuk penggunaan diluar lahan kering, keseluruhannya digunakan sebagai kolam/tebat empang dan luasan ini sebanyak 8,25 persen dari luas keseluruhan di Kab.Tasikmalaya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sudah terjadi upaya diversifikasi produk dalam kegiatan usahatani di wilayah studi.

Tabel 7**Luas Tanah Lainnya Menurut Penggunaannya di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong**

Macam Penggunaan	Luas Tanah (hektar)		
	1999	2000	2001
Rawa	--	--	--
Tambak	--	--	--
Kolam/Tebat Empang	393	393	233
Kab.Tasikmalaya (keseluruhan)	4.759	4.858	3.776

Sumber : Monografi Desa

Irigasi sebagai suatu sistem tidaklah bersifat mandiri, melainkan selalu berkaitan dengan sistem lainnya yang lebih luas. Sebagai unit produksi misalnya sistem irigasi merupakan salah satu subsistem dari suatu wilayah pertanian, dan sebagai unit hidrologis ia merupakan suatu subsistem dari Daerah Aliran Sungai.

Demikian pula dalam pengelolaan jaringan pengairan/irigasi diperlukan dukungan berbagai kelembagaan dan partisipasi dari semua pihak, agar tujuan semula pembangunan dan penyediaan jaringan pengairan/irigasi dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu unsur pendukung keberhasilan pemberdayaan jaringan pengairan/irigasi adalah adanya kelompok P3A. Di wilayah studi, jumlah P3A menurut kondisinya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Jumlah P3A Menurut Kondisinya di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong s/d Desember 2002

Uraian	J u m l a h	
	2001	Ket.
Jumlah P3A (Unit)	12	
Total Jumlah P3A (Unit) di Kab. Tasikmalaya	224	
Jumlah anggota (orang)	2.901	
Total Jumlah anggota (orang) di Kab. Tasikmalaya	34.475	

Sumber : Monografi Kecamatan

Jumlah P3A di wilayah studi pada tahun 2001 adalah sebanyak 12 buah dan merupakan 5,35 persen dari total P3A yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan jumlah anggotanya sebanyak 2.901 orang dan merupakan 8,41 persen dari total jumlah anggota P3A di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 34.475 orang. Sumberdaya manusia anggota P3A ini sangat bermanfaat dalam kegiatan pemeliharaan maupun rehabilitasi jaringan pengairan/irigasi. Tanpa pemeliharaan yang baik, jaringan sebagus apapun akan mudah rusak dan umur ekonomisnya tidak akan lama. Sehingga peranserta anggota P3A ini sangat krusial dalam upaya pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Berdasarkan hasil pendataan langsung pada responden petani di kedua wilayah studi diketahui bahwa prasarana jaringan irigasi yang ada beserta penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 9.

Sebagian besar responden yaitu 40 orang (66,67 persen) menggunakan irigasi PU, sisanya adalah irigasi tradisional. Macam jaringan irigasi yang digunakan sebagian besar sebanyak 24 orang (40 persen) adalah jaringan sekunder, lainnya menggunakan jaringan primer sebanyak 20 orang (33,33 persen) dan sisanya menggunakan jaringan tertier. Kondisi jaringan irigasi sampai saat ini sebagian besar dalam kondisi cukup baik, dan terdapat sebanyak 16 orang responden (26,66 persen) menyatakan kondisi jaringan saat ini dalam kondisi jelek dan perlu perbaikan.

Digunakannya berbagai macam jaringan irigasi di wilayah studi ternyata sebagian besar responden menyatakan bermanfaat dan dapat meningkatkan hasil dibandingkan apabila hanya mengandalkan irigasi yang berasal dari tadah hujan. Hanya 28,33 persen (17 orang) responden yang

menyatakan bahwa jaringan irigasi belum mampu untuk meningkatkan produksinya, hal ini terkait dengan pola penggunaan jaringan irigasi yang belum optimal.

Tabel 9
Prasarana Jaringan Pengairan/Irigasi beserta Penggunaannya di Wilayah Studi (Kec. Cisayong dan Kec. Manonjaya) Tahun 2003

No.	Uraian	Responden		Ket.
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Jenis Irigasi			
	a. PU	40	66,67	
	b. Tradisional	20	33,33	
	Total	60	100	
2.	Macam jaringan irigasi yang digunakan :			
	a. Primer	20	33,33	
	b. Sekunder	24	40,00	
	c. Tertier	16	26,67	
	Total	60	100	
3.	Kondisi Jaringan Irigasi :			
	a. Baik	16	26,67	
	b. Sedang	28	46,67	
	c. Jelek	16	26,66	
	Total	60	100	
4.	Perbaikan yang telah dilakukan :			
	a. Oleh Pemerintah	38	63,33	
	b. Swadaya	22	36,67	
	Total	60	100	
5.	Pengaruh thd Produksi pertanian :			
	a. Meningkatkan hasil 10-25 %	4	6,67	
	b. Meningkatkan hasil 26-50 %	21	35,00	
	c. Meningkatkan hasil 51-75 %	12	20,00	
	b. Meningkatkan hasil 76 - 100 %	6	10	
	d. Tidak meningkatkan hasil	17	28,33	
	Total	60	100	

Sumber : Data Primer, 2003

4.2.2. Tenaga Listrik

Sampai sekarang ini belum semua wilayah di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan penerangan menggunakan listrik. Dengan adanya intervensi pemerintah melalui program Listrik Masuk Desa maka diharapkan wilayah-wilayah yang sampai saat ini belum mendapatkan fasilitas listrik akan segera mendapatkannya.

Namun demikian, di wilayah studi sebagian responden sudah memperoleh fasilitas tenaga listrik yang sebagian besar diperoleh dari PLN dengan penggunaan yang beragam seperti dapat dilihat pada Tabel 10 yang merupakan hasil pengumpulan data primer pada petani di wilayah studi kasus.

Tabel 10
Prasarana Jaringan Listrik beserta Penggunaannya di Wilayah Studi (Kec. Cisayong dan Kec. Manonjaya) Tahun 2003

No.	Uraian	Responden		Ket.
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Sumber jaringan listrik :			
	a. PLN	58	96,67	
	b. Lainnya	2	3,33	
	Total	60	100	
2.	Daya Listrik :			
	a. 450 watt	54	90,00	
	b. 900 watt	4	6,67	
	c. Tidak ada	2	3,33	
Total	60	100		
3.	Penggunaan :			
	a. Penerangan & keperluan keluarga	50	83,34	
	b. Industri pengolahan hasil pertanian	8	13,33	
	c. Lainnya (tidak ada)	2	3,33	
Total	60	100		

Sumber : Data Primer, 2003

Namun demikian penggunaannya masih terbatas hanya untuk keperluan penerangan/keperluan keluarga (50 responden atau 83,34 persen) sehingga kegiatan-kegiatan agribisnis lainnya khususnya yang terkait dengan subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian belum dapat sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini juga diakibatkan karena daya listrik yang terpasang masih terbatas yaitu sebagian besar hanya berdaya 450 watt.

4.3. Infrastruktur Distribusi

4.3.1. Infrastruktur Transportasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa infrastruktur transportasi/pengangkutan adalah salah satu diantara lima syarat pokok yang harus tersedia jika bidang pertanian hendak dimajukan. Tanpa sarana pengangkutan yang efisien dan murah, keempat syarat pokok lainnya tidak dapat diadakan secara efektif. Pentingnya transportasi ini juga dihubungkan dengan karakteristik produk pertanian yang tersebar luas dan terpencar-pencar areal produksinya, sehingga untuk pengumpulan produk memerlukan jaringan transportasi yang juga tersebar untuk membawa sarana dan alat produksi ke tiap lokasi usahatani dan kemudian mengangkut produk usahatani untuk disampaikan kepada konsumen akhir.

Kondisi infrastruktur distribusi yang ada di wilayah studi beserta keragaannya dapat dilihat pada Tabel 11.

Pada umumnya untuk mengangkut produk hasil usahatani, sebagian petani responden menggunakan angkutan umum yang tersedia sepanjang waktu dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Sampai saat ini infrastruktur yang ada dirasakan sebagian besar responden sudah mendukung terhadap upaya penjualan hasil usahatani. Hal ini juga dimungkinkan karena petani responden pada umumnya menjual produk usahatani dengan jumlah yang relatif sedikit, sehingga tidak memerlukan alat angkutan yang khusus.

Tabel 11
Prasarana Angkutan beserta Penggunaannya di Wilayah Studi Kec. Cisayong dan Kec. Manonjaya Tahun 2003

No.	Uraian	Responden		Ket.
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Alat angkutan produk usahatani :			
	a. Angkutan umum	30	50,00	
	b. Gerobak (milik sendiri)	12	20,00	
	c. Kendaraan bak terbuka (milik sendiri)	15	25,00	
	d. Ojeg	1	1,67	
	e. Tidak ada	2	3,33	
	Total	60	100	
2.	Aksesibilitas :			
	a. Mudah	58	96,67	
	b. Sulit	2	3,33	
	Total	60	100	
3.	Tingkat dukungan thd usahatani :			
	a. Sudah	44	73,33	
	b. Belum	16	26,67	
	Total	60	100	

Sumber : Data Primer, 2003

4.3.2. Infrastruktur Komunikasi

Sedangkan menyangkut infrastruktur komunikasi yang ada pada petani responden dalam hal ini sambungan tilpon, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12. Hanya 10 orang (16,67 persen) petani responden yang telah memiliki sambungan tilpon, sisanya sebanyak 50 orang (83,33 persen) belum mendapatkan sambungan. Namun demikian, dari petani responden yang telah memiliki sambungan tilpon, sebagian yaitu 6 orang (60 persen) menggunakan tilpon hanya untuk keperluan keluarga dan 4 orang lainnya (40 persen) menggunakannya untuk keperluan keluarga dan untuk usaha. Sehingga sambungan tilpon ini belum dimanfaatkan dengan optimal untuk kegiatan produktif di sektor pertanian.

Sisa petani responden yang belum mendapatkan sambungan tilpon, memanfaatkan jasa Wartel untuk melaksanakan kegiatan komunikasinya, baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan usahanya.

Tabel 12.
Prasarana Komunikasi (telpon) beserta Penggunaannya di Wilayah Studi
Kec. Cisayong dan Kec. Manonjaya Tahun 2003

No.	Uraian	Responden		Ket.
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Kepemilikan sambungan tilpon :			
	a. Memiliki	10	16,67	
	b. Tidak memiliki	50	83,33	
	Total	60	100	
2.	Penggunaan sambungan tilpon :			
	a. Keperluan keluarga	6	60,00	
	b. Usaha	-	-	
	c. Kedua-duanya (a dan b)	4	40,0	
	Total	10	100	

Sumber : *Data Primer, 2003*

4.3.3. Infrastruktur Pasar

Pasar sebagai tujuan akhir dari produk juga harus mendapatkan perhatian yang khusus. Upaya peningkatan produksi yang terus digalakkan tanpa pasar yang baik, maka pendapatan petani tidak akan meningkat dan proses pembangunan pertanian kurang berjalan dengan baik. Prasarana pasar yang ada di wilayah studi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ternyata di wilayah studi sebagian besar petani responden yaitu 56 orang (93,33 persen) menyatakan tidak ada pasar didekat lokasi studi, sisanya menyatakan ada berupa pasar tradisional. Sehingga mereka harus menjual hasil-hasil pertanian ke pasar Kecamatan yang berjarak antara 1-5 km dengan kondisi pasar yang dirasakan cukup baik, demikian pula untuk memperoleh input yang diperlukan untuk melaksanakan usahataniannya selain dari KUD setempat juga harus ke pasar Kecamatan.

Pada umumnya, petani responden menjual produk pertaniannya kepada tengkulak/bandar, sisanya ke Koperasi, ke Pasar Kecamatan dan ada seorang responden yang tidak menjual produk pertaniannya. Perbedaan harga yang ada antara di lokasi petani responden dengan di pasar terdekat berkisar lebih dari 50 persen, sehingga cukup signifikan apabila produk yang dihasilkannya dijual langsung ke pasar terdekat.

Perbandingan harga yang menguntungkan inilah yang dapat menjadi perangsang agar secara efektif dapat mendorong petani meningkatkan produksinya.

Adanya seorang petani yang tidak menjual produk usahataniannya adalah salah satu indikator bahwa masih adanya golongan petani kategori subsisten, dimana hasil produksinya dimanfaatkan untuk keperluan sendiri.

Tabel 13
Prasarana Pasar di Wilayah Studi Kec. Cisayong dan Kec. Manonjaya Tahun 2003

No.	Uraian	Responden		Ket.
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Keberadaan pasar :			
	a. Ada (Pasar tradisional)	4	6,67	
	b. Tidak ada	56	93,33	
	Total	60	100	
2.	Jarak ke pasar terdekat :			
	a. 0 - 5 km	58	96,67	
	b. 6 - 10 km	2	3,33	
	Total	60	100	
3.	Kondisi pasar yang ada :			
	a. Baik	24	40,00	
	b. Cukup	33	55,00	
	c. Kurang	3	5,00	
	Total	60	100	
4.	% Perbedaan harga :			
	a. 0 - 25 %	-	-	
	b. 26 - 50 %	1	1,67	
	c. > 50 %	20	33,33	
	d. Tidak tahu	39	65,00	
	Total	60	100	
5.	Penjualan produk pertanian :			
	a. Ke Koperasi	6	10,00	
	b. Ke Tengkulak/Bandar	36	60,00	
	c. Ke Pasar Kecamatan	17	28,33	
	d. Tidak dijual	1	1,67	
	Total	60	100	

Sumber : Data Primer, 2003

4.4. Kelembagaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Petani

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan pertanian, diperlukan juga faktor-faktor lain yang merupakan faktor pelancar yang dapat mempercepat proses pembangunan pertanian. Faktor-faktor pelancar tersebut diantaranya adalah kelembagaan sumberdaya manusia dan kelembagaan di tingkat petani.

Keberhasilan atau kegagalan usaha transformasi pertanian tradisional bukan hanya tergantung pada kemampuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya saja, tapi yang lebih penting tergantung pada kondisi sosial, komersial dan kelembagaan dimana ia harus berfungsi.

Kondisi kelembagaan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan di Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong secara umum dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Kelembagaan Sumberdaya Manusia Pertanian Tanaman Pangan di
Kecamatan Manonjaya dan Kec. Cisayong s/d Desember 2002

No.	Uraian Kelembagaan	Jumlah	Jumlah Total se Kab.Tasikmalaya
1.	Kantor BPP	2	26
2.	Petugas :		
	a. Penyuluh	6	106
	b. KCD	2	27
	c. PHP	2	26
	d. Peng. Benih	-	3

Sumber : Monografi Kecamatan

Berdasarkan Tabel 14 ini dapat dilihat bahwa masing-masing Kecamatan telah memiliki BPP dengan komposisi petugas lapangan yang sangat terbatas apabila dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja dan luasan daerah yang harus dibina, sehingga optimalisasi pembinaan dilakukan dengan sangat terbatas.

Hal inilah yang sedikit banyak membawa pengaruh terhadap kelambanan upaya transformasi pertanian yang diharapkan. Padahal semua manfaat dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak akan dapat direalisasikan kecuali kalau suatu sistem dukungan pemerintah diciptakan untuk memberikan rangsangan yang diperlukan, termasuk adanya pembinaan dari pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar memungkinkan para petani kecil meningkatkan output dan produktivitas mereka.

Di tingkat petani kelembagaan lainnya yang harus dikembangkan adalah Koperasi. Di wilayah studi masing-masing Kecamatan telah memiliki Koperasi Unit Desa (Tabel 15) yang berfungsi sebagai pasar input maupun output.

Tabel 15
Kelembagaan KUD di Kecamatan Manonjaya dan Kec. Cisayong s/d
Desember 2002

No.	Uraian Kelembagaan	Jumlah	Jumlah Total Kab.Tasikmalaya
	Koperasi Unit Desa (Cisayong : Mitra Tani dan Manonjaya : KUD Manonjaya)	2	34

Namun demikian, di wilayah studi masih belum terdapat kelembagaan usaha pelayanan jasa ALSINTAN yang sesungguhnya dapat membantu para petani untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan alat mesin pertanian. Di Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan terdapat sebanyak 7 Unit (Tabel 16), jadi dengan demikian belum semua Kecamatan yang ada memiliki masing-masing Usaha pelayanan jasa ALSINTAN.

Tabel 16
Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa ALSINTAN (UPJA) di Kecamatan Manonjaya dan Kec. Cisayong s/d Desember 2002

No.	Uraian Kelembagaan	Jumlah	Jumlah Total se Kab.Tasikmalaya
	Usaha Pelayanan Jasa ALSINTAN	Tidak ada (belum berdiri)	7

Pada kelembagaan petani terdapat tingkatan kelompok tani beserta jumlah kelembagaan kelompoknya, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Dengan kelengkapan kelembagaan petani dan kelompok tani ini diharapkan akan terbentuk pemahaman yang sama tentang hakekat pembangunan di sektor pertanian, karena tingkatan petani dan tingkatan kelembagaan kelompok tani akan sangat membantu terhadap upaya-upaya introduksi teknologi dan membantu dalam proses adopsi inovasi yang ditawarkan.

Tabel 17
Kelembagaan Petani di Kecamatan Manonjaya dan Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya s/d Desember 2002

No.	Uraian Kelembagaan	Jumlah	Jumlah Total Kab.Tasikmalaya
1.	Tingkat Kelompok Tani :		
	a. Pemula	35	931
	b. Lanjut	37	732
	c. Madya	11	145
	d. Utama (<i>tanpa Cisayong</i>)	4	16
2.	Jumlah Kelembagaan Kelompok :		
	a. Gapoktan	2	103
	b. Koptan	2	33
	c. KTNA	2	39
	d. KWT	5	123
	e. Taruna Tani (<i>tanpa Manonjaya</i>)	2	60

4.4. Perkembangan Sektor Pertanian di wilayah Studi

Perkembangan sektor pertanian di wilayah studi akan dilihat hanya di tingkat Kecamatan berdasarkan beberapa indikator meliputi luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas pada tahun-tahun tertentu, dalam hal ini tahun 1999, 2000 dan 2001. Untuk kondisi tahun 2001 perbandingan luas tanam, luas panen dan produksi tidak dilakukan karena pada tahun ini pendataan telah dipisahkan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Sedangkan komoditas yang dilihat adalah padi sawah, padi gogo dan beberapa komoditas palawija. Pembatasan ini hanya diakibatkan oleh keterbatasan data yang dimiliki.

a. Padi sawah

Perkembangan komoditas padi sawah di dua Kecamatan dimaksud selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di Kec. Manonjaya dan Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Uraian	Tahun		
	1999	2000	2001
Luas Tanam (ha)	8.943	7.261	5.519
Luas Panen (ha)	8.665	8.392	5.281
Produksi (Ton)	41.344	44.766	25.230
Produktivitas (kui/ha)	48,19	53,44	48,96

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat bahwa luas tanam dan luas panen pada tahun 1999 dan 2000 menurun walaupun tidak terlalu signifikan. Namun demikian produksinya meningkat dari 41.344 ton pada tahun 1999 menjadi 44.766 ton pada tahun 2000. Hal ini diantaranya diakibatkan oleh peningkatan produktivitas yang semula sebesar 48,19 kuintal/hektar meningkat menjadi 53,44 kuintal/hektar atau meningkat sebesar 10,89 persen. Namun selanjutnya pada tahun 2001 produktivitas ini menurun lagi menjadi 48,96 kuintal/hektar.

b. Padi gogo

Sedangkan untuk komoditas padi gogo selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 19. Pada tahun 1999 produksi padi gogo di kedua wilayah adalah sebesar 181 ton (tanpa kec. Cisayong), pada tahun 2000 meningkat tajam menjadi 647 ton. Hal ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari 12,51 kuintal/hektar menjadi 24,46 kuintal/hektar. Namun pada tahun 2001 produktivitasnya menurun kembali menjadi 21,02 kuintal/hektar.

Tabel 19. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi gogo di Kec. Manonjaya dan Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Uraian	Tahun		
	1999	2000	2001
Luas Tanam (ha)	262*)	170	80*)
Luas Panen (ha)	145*)	262	135*)
Produksi (Ton)	181*)	647	285
Produktivitas (kui/ha)	12,51*)	24,46	21,02

Catatan : *) tanpa Kec. Cisayong

c. Palawija

Kondisi beberapa komoditas palawija yang terdiri dari Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubikayu dan Ubi Jalar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 20.

Komoditas Jagung menunjukkan angka fluktuatif, angka luas tanam dengan luas panen tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Namun produktivitas per hektarnya menunjukkan peningkatan dari semula 44,08

kuintal/hektar menjadi 46,48 kuintal/hektar atau meningkat sekitar 5,44 persen. Namun tahun 2001 menurun sekitar 11,98 persen menjadi 40,91 kuintal/hektar.

Penurunan produktivitas per hektar terjadi pada komoditas kedelai, semula sebanyak 11,76 kuintal/hektar (tahun 1999) turun menjadi 8,47 kuintal per hektar (tahun 2000) atau turun sekitar 27,97 persen. Walaupun pada tahun 2001 naik kembali menjadi 9,24 kuintal/hektar atau sekitar 9 persen.

Sedangkan produksi Kacang tanah menunjukkan produksi yang meningkat tajam, semula pada tahun 1999 sebesar 91 ton naik pada tahun 2000 menjadi 227 ton atau sekitar 150 persen, hal ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya luas panen seperti ditunjukkan pada Tabel 20. Produktivitasnya meningkat dari 12,45 kuintal/hektar pada tahun 1999 menjadi 12,98 kuintal/hektar pada tahun 2000, bahkan pada tahun 2001 mencapai angka 14,77 kuintal/hektar.

Komoditas ubi kayu menunjukkan penurunan produktivitas dari semula pada tahun 1999 sebesar 208,64 kuintal/hektar menjadi 153,25 kuintal/hektar pada tahun 2000 dan meningkat pada tahun 2001 menjadi 157,49 kuintal/hektar. Walaupun angka produktivitas menurun, namun produksinya meningkat dari semula 5.186 ton pada tahun 1999 menjadi 9.418 ton pada tahun 2000, hal ini kemungkinan terkait dengan meningkatnya luas panen dari 245 ha pada tahun 1999 menjadi 573 ha pada tahun 2000.

Kondisi perkembangan komoditas ubikayu hampir sama dengan kondisi ubi jalar. Walaupun produktivitasnya menurun dari 108,99 kuintal/hektar pada tahun 1999 menjadi 69,31 kuintal/hektar pada tahun 2000. Namun produksinya meningkat dari 369 ton (1999) menjadi 761 ton (2000), hal ini kemungkinan diakibatkan oleh perluasan areal panen dari semula 34 ha (1999) menjadi 111 ha pada tahun 2000.

Secara umum pertumbuhan produksi beberapa produk palawija berfluktuasi, fluktuasi ini kemungkinan dapat disebabkan oleh fluktuasi produktivitas maupun oleh karena turun naiknya luas areal tanam atau panen.

Tabel 20
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Beberapa Tanaman Palawija di
Kec. Manonjaya dan Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

U r a i a n	T a h u n		
	1999	2000	2001
1. Jagung			
Luas Tanam (ha)	279	197	151
Luas Panen (ha)	264	261	130
Produksi (Ton)	1.162	1.168	516
Produktivitas (kui/ha)	44,08	46,48	40,91
2. Kedelai			
Luas Tanam (ha)	43	84	46
Luas Panen (ha)	39	56	57
Produksi (Ton)	51	46	52
Produktivitas (kui/ha)	11,76	8,47	9,24
3. Kacang Tanah			

Luas Tanam (ha)	147	118	153
Luas Panen (ha)	73	176	147
Produksi (Ton)	91	227	215
Produktivitas (kui/ha)	12,45	12,98	14,77
4. Kacang Hijau	---	---	---
5. Ubi Kayu			
Luas Tanam (ha)	479	492	360
Luas Panen (ha)	245	573	290
Produksi (Ton)	5.186	9.418	5.848
Produktivitas (kui/ha)	208,64	153,25	157,49
6. Ubi Jalar			
Luas Tanam (ha)	54	97	75
Luas Panen (ha)	34	111	95
Produksi (Ton)	369	761	627
Produktivitas (kui/ha)	108,99	69,31	66,54

Secara umum perspektif penyediaan infrastruktur yang menunjang sektor pertanian pada tahun 1999-2001 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Pada umumnya yang dilakukan adalah pemeliharaan atas infrastruktur yang ada selama ini, walaupun ada penambahan jumlahnya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan kondisi krisis perekonomian yang terus berlanjut sehingga anggaran untuk penambahan infrastruktur sangat terbatas. Selain itu pula, pemisahan dan pembagian asset yang dimiliki antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya juga memberikan kontribusi atas kelambanan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Dari sisi petani sebagai pelaku usahatani di wilayah studi memberikan gambaran bahwa pada umumnya petani masih berada pada tahap subsisten dan sedang menuju transisi pertanian campuran/diversifikasi dan belum ada tanda-tanda peningkatan jumlah petani yang melaksanakan usahatani terspesialisasi/komersil seperti teori yang diungkapkan oleh Michael Todaro yang digunakan sebagai Teori dasar yang digunakan dalam kajian ini.

Sedangkan menyangkut produktivitas di sektor pertanian dan berdasarkan data-data yang ada menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka-angka yang fluktuatif ini tidak dapat secara otomatis diklaim sebagai sebab akibat dari aspek penyediaan infrastruktur sektor pertanian. Karena dalam kenyataannya dengan infrastruktur yang sama atau hampir sama kadangkala terjadi fluktuasi baik produksi maupun produktivitas hasil pertanian. Hal inilah yang perlu dikaji dengan lebih teliti lagi agar ditemukan hubungan sebab akibat antara penyediaan infrastruktur terhadap pertumbuhan di sektor pertanian.

BAB 5

KESIMPULAN, KELEMAHAN STUDI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kondisi penyediaan infrastruktur pertanian dalam menunjang pembangunan sektor pertanian di wilayah studi yang terdiri dari Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cisayong sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Namun demikian kualitas maupun kuantitas penyediaan infrastruktur tersebut masih sangat terbatas.
2. Intervensi penyediaan infrastruktur yang telah dilakukan masih belum mampu untuk mendongkrak pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian yang lebih baik di wilayah studi, khususnya yang berhubungan dengan proses transformasi pertanian. Sampai saat ini dengan melihat karakteristik responden dan beberapa indikator lainnya, dapat dikatakan bahwa para petani di wilayah studi masih dikategorikan pada tahap pertama dan tahap kedua dari proses transformasi pertanian, yaitu pertanian subsisten sedang transisi menuju Usaha Tani Campuran dan Diversifikasi.

5.2. Kelemahan Studi

Beberapa kelemahan studi yang dilakukan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan data dan akurasi data yang sangat terbatas
- 2) Sampel yang masih belum mencukupi untuk pembahasan tingkat kabupaten, baik sampel petani, Desa maupun sampel Kecamatan
- 3) Sebagai konsekwensinya bahwa kajian ini hanya berupa contoh kasus dan tidak dapat generalisasi untuk tingkat Kabupaten

5.3. Saran

1. Penyediaan infrastruktur yang mencukupi sangat diperlukan untuk keberhasilan transformasi pertanian, sehingga apabila tujuan ingin meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian maka penyediaan infrastruktur ini harus menjadi prioritas utama.
2. Dari sisi pembinaan, maka jumlah petugas lapangan yang membantu para petani dalam transfer teknologi harus ditambah dan disesuaikan dengan cakupan wilayah kerja dengan perbandingan yang proporsional.
3. Perlu dilakukan studi lanjutan dengan analisis yang lebih lengkap, akurasi data dan kelengkapan data penunjang sehingga sebab akibat dari penyediaan infrastruktur terhadap pertumbuhan sektor pertanian dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- AT. Mosher. 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. CV. Yasaguna. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kab.Tasikmalaya dengan BAPPEDA Kab.Tasikmalaya. 2000. Tasikmalaya Dalam Angka 1999.BPS Kab.Tasikmalaya.Tasikmalaya.
- , 2001.
Tasikmalaya Dalam Angka 2000.BPS Kab.Tasikmalaya.Tasikmalaya.
- , 2002.
Tasikmalaya Dalam Angka 2001.BPS Kab.Tasikmalaya.Tasikmalaya.
- Bungaran Saragih. 2001. AGRIBISNIS. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.
- Bungaran Saragih. 2001. SUARA DARI BOGOR. Membangun Sistem Agribisnis. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.
- Dinas Pertanian Tan.Pangan dan Hortikultura Kab.Tasikmalaya. 2001. Laporan Tahunan. Diperta Kab.Tasikmalaya.
- Effendi Pasandaran & Donald C. Taylor. 1984. IRIGASI. Perencanaan dan Pengelolaan. PT. Gramedia. Jakarta.
- Everett M. Rogers. 1976. Komunikasi dan Pembangunan. Perspektif Kritis. LP3ES. Jakarta
- Michael P. Todaro. 1994. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Pantjar Simatupang, Effendi Pasandaran, Faisal Kasryno dan Armen Zulham. 1990. Agroindustri Faktor Penunjang Pembangunan Pertanian di Indonesia. Puslit Agro Ekonomi Balitbang Pertanian. Jakarta.
- Sadono Sukirno. 1985. Ekonomi Pembangunan. Bima BG. Grafika. Jakarta.
- Said Rusli. 1984. Pengantar Ilmu Kependudukan. LP3ES. Jakarta.

LAMPIRAN 2

STUDI DESKRIPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN BAYONGBONG DAN KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yasa Anggana - Garut
April 2003

Tinjauan Literatur Pembangunan Sektor Pertanian

Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional

Sejalan dengan rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), arah pembangunan nasional sektor pertanian jangka panjang adalah pengembangan sistim dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Pada jangka menengah pembangunan pertanian diarahkan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan sistim agribisnis melalui pengembangan hubungan yang sinergi antar sub sistem agribisnis. Dalam jangka pendek, pembangunan pertanian diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tujuan utama dari pembangunan pertanian ini adalah pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan, sehingga dengan memampukan daerah dalam membangun pertanian serta didukung oleh kebijakan ekonomi yang kondusif, diharapkan akan menumbuh kembangkan agribisnis daerah yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah, berkelanjutan, berkeadilan dan berdemokrasi.

Berdasarkan pada fokus pembangunan tersebut maka tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan adalah: Pertama, menggerakkan sistem agribisnis guna meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; Kedua, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pelaku agribisnis/petani; Ketiga, Meningkatkan produksi bahan pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional, menyediakan bahan baku industri pengolahan dan ekspor; Keempat, Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha yang efisien; dan Kelima, mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem agribisnis yang berwawasan lingkungan

Permasalahan utama dalam membangun dan melengkapi infrastruktur pertanian adalah dukungan yang belum memadai untuk peningkatan produksi melalui sistem agribisnis menunjang ketahanan pangan. Di samping itu, dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan sarana pertanian juga masih perlu diupayakan. Permasalahan lebih rinci yang dihadapi dari berbagai aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Sarana Usaha

- Terbatasnya dukungan sarana usaha pada perkebunan rakyat, khususnya jalan dan bangunan pengembangan kawasan industri

perkebunan dan pewilayahan komoditas perkebunan. Demikian juga jalan untuk usaha tani pada areal tanaman pangan.

- Terbatasnya sarana usaha sub sector peternakan antara lain rumah potong hewan (RPH), padang penggembalaan, klinik hewan dan kandang higienis, inseminasi buatan (IB), industri pakan ternak, industri pengolahan susu yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi peternakan.
- Kurang memadainya jumlah dan kualitas sarana pasca panen seperti lantai jemur.
- Hilangnya budaya penyimpanan hasil panen pada lumbung pangan yang mengakibatkan besarnya fluktuasi harga komoditas pertanian pada saat panen raya dan pada saat paceklik.
- Masih terbatasnya bangunan usaha tani konservasi lahan dan sarana lainnya.
- Masih terbatasnya sarana distribusi pupuk dan pestisida (kios).

2. Aspek Air Irigasi

- Permasalahan dalam pemanfaatan air irigasi antara lain adalah:
- Kehandalan sumber daya air semakin menurun akibat dari kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA).
- Jaringan irigasi yang telah ada belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan banyak mengalami kerusakan akibat operasional dan pemeliharaan (OP) yang belum memadai.
- Terbatasnya pompa air dan sarana penampungan air hujan sehingga sumber air yang telah ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Kualitas air untuk pertanian semakin menurun akibat adanya pencemaran dari limbah industri, rumah tangga dan perkotaan maupun pencemaran air asin akibat intrusi air laut.
- Meningkatnya kebutuhan air untuk kegiatan non pertanian sebagai akibat adanya pembangunan dan penambahan penduduk yaitu untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
- Efisiensi pemanfaatan air irigasi baik di tingkat jaringan utama maupun di tingkat usaha tani masih rendah, dan dalam berusaha tani sarana air belum diperhitungkan sebagai biaya.
- Penerapan teknologi pengelolaan air untuk usaha tani masih sangat terbatas sebagai akibat dari penyebarluasan teknologi yang telah ada dan sarana penyebaran teknologi sangat terbatas dan belum memadai.
- Belum terbentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) sedangkan P3A dan P3AT yang telah ada belum berfungsi dengan baik oleh karena kesadaran petani untuk berorganisasi masih sangat rendah.
- Tingkat pengetahuan dan ketrampilan petugas daerah maupun di tingkat lapangan serta petani sendiri sebagai pemakai air di bidang pengelolaan air masih sangat rendah.
- Kurangnya minat pemilik modal (investor) menanamkan modalnya di bidang pengelolaan air untuk usaha tani.
- Data dasar bidang pengelolaan air di tingkat lapangan, daerah (kabupaten / kota dan propinsi) maupun di tingkat pusat belum sempurna.

- Bimbingan dan penyuluhan bidang pengelolaan air di tingkat lapangan masih sangat kurang dan tidak berkelanjutan.
- Peraturan dan perundangan serta kebijakan pengelolaan air belum sesuai dengan kebutuhan lapangan.

3. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

Permasalahan dari aspek alat dan mesin pertanian antara lain adalah:

- Sistem Standardisasi dan Pengujian Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil masih lemah. Sistem Standardisasi dan Pengujian Alsintan merupakan upaya melindungi petani sebagai pemakai terhadap produksi alsintan dalam negeri maupun luar negeri. Alsintan yang beredar dan digunakan di tingkat petani masih banyak yang belum memenuhi standar kelayakan teknis dan sebagian belum teruji kemampuannya.
- Pemanfaatan belum optimal dan ketersediaan alsintan masih kurang. Dengan adanya kompetisi di bidang ketenagakerjaan antara sektor pertanian dan sektor sektor yang lain (industri, pariwisata, perikanan) mengakibatkan terjadi kelangkaan tenaga kerja di sector pertanian. Keadaan ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan alsintan di semua sub sektor.
- Belum mantapnya kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Kelembagaan Usaha Penggunaan Jasa Alsintan merupakan salah satu mata rantai dalam pemakaian alat dan mesin pertanian. Kondisi kelembagaan UPJA saat ini masih perlu ditingkatkan agar semakin mandiri dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan alsintan.
- Peraturan tentang mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) pada pemanfaatan alsintan menghambat perkembangan dan penambahan investasi dibidang alsintan.
- Belum berkembangnya perbengkelan yang mendukung pengembangan alsintan di daerah.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan alsintan.

4. Aspek Pembiayaan

Permasalahan dari aspek pembiayaan baik untuk peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil antara lain adalah:

- Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio budaya pedesaan sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya.
- Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan formal petani, disamping itu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition) dalam menilai usaha

pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani.

- Usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh pihak investor, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian.
- Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi, belum menyentuh kegiatan praproduksi, pasca produksi, dan pascapanen. Padahal kegiatan off farm ini memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan kegiatan on farm.
- Belum adanya lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian (Asuransi Pertanian) yang mengakibatkan lembaga keuangan maupun investor enggan untuk menyalurkan dananya pada kegiatan agribisnis, disamping itu petani juga belum merasakan pentingnya jaminan untuk berusaha.
- Belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian tidak berkembang sesuai tuntutan pembangunan nasional yang memprioritaskan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
- Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Pedesaan/Lembaga Kredit Mikro di pedesaan sehingga terjadi ketidakeimbangan antara kemampuan masyarakat untuk menabung dengan jumlah modal yang keluar pedesaan (capital outflow).

Pengembangan sektor pertanian di suatu wilayah tidak terlepas dari pembangunan wilayah secara keseluruhan. Demikian juga untuk pengembangan pertanian di Jawa Barat, merupakan rangkaian sistem yang satu sama lain saling terkait. Dukungan sistem lain yang terkait sangat besar artinya dalam mempercepat peningkatan pembangunan sektor pertanian ataupun pengembangan wilayah secara umum. Peranan sektor pertanian tidak saja terbatas pada bagaimana komoditas pertanian dihasilkan tapi yang terpenting adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani produsen itu sendiri sehingga dapat memacu peningkatan produksi pertanian secara jangka panjang.

Pembangunan pertanian di Indonesia secara terencana dimulai sejak dicanangkannya program BIMAS pada tahun 1968. Titik berat pembangunan pertanian pada saat itu berada pada komoditas pangan terutama beras dengan tujuan agar mencukupi kebutuhan beras nasional. Bukti keberhasilan program tersebut adalah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Walaupun demikian sumber pertumbuhan pada subsektor tanaman pangan pada masa mendatang tidak lagi pada komoditas beras semata tapi tersebar pada tanaman pangan lainnya terutama hortikultura.

A.T. Mosher membagi syarat atau faktor keberhasilan pembangunan sektor pertanian dalam dua kelompok; yang pertama dikelompokkan sebagai syarat pokok pembangunan pertanian (essential) dan yang kedua dikelompokkan sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian.

Syarat pokok pembangunan pertanian adalah; pemasaran (permintaan), teknologi pertanian yang terus berkembang, sarana produksi pertanian

(saprota), perangsang produksi bagi petani, dan pengangkutan (transportasi) yang efisien.

Adapun faktor-faktor pelancar bagi pembangunan sektor pertanian adalah; pendidikan pembangunan, kredit produksi, kerjasama kelompok petani, perbaikan dan perluasan areal pertanian, dan perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian, (1985).

Dari Pertanian berorientasi produksi menuju Agribisnis.

Konsep BIMAS yang selama ini dipakai dalam pembangunan pertanian, khususnya pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, telah berhasil mengantarkan Indonesia pada pencapaian swasembada pangan. Walaupun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut belum berdampak nyata pada peningkatan ekonomi pedesaan dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Indikator kesenjangan pendapatan di pedesaan dan perkotaan ditunjukkan oleh perbedaan upah, produktivitas tenaga kerja, dan arus urbanisasi yang besar.

Secara teoritis model pembangunan pertanian di Indonesia merupakan aplikasi dari teori A.T Mosher tentang struktur pedesaan progresif. Aplikasi teori ini banyak berperan dalam pencapaian berbagai target pembangunan pertanian. Teori ini pada intinya menyatakan bahwa pembangunan pertanian dapat berjalan jika struktur pedesaan itu progresif, dunia pertanian perlu dilayani oleh input-input dari pabrik, nilai tambah yang diperoleh dari usaha tani dan produknya harus dijual ke pasar. Untuk itu harus dibangun kelembagaan yang mencakup dua hal, yaitu dalam arti fisik (organisasi) dan dalam arti non fisik yakni perilaku, kaidah, norma, dan lain-lain. Suatu struktur pedesaan yang progresif ditandai oleh adanya; lembaga penyalur kredit, adanya sarana penyaluran input-input pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, kegiatan penyuluhan dan infrastruktur yang efisien. Faktor kelengkapan infrastruktur inilah yang menunda pencapaian swasembada pangan, karena begitu infrastruktur selesai, pada saat itu juga swasembada tercapai.

Pengertian Agrobisnis

Konsep pengembangan agrobisnis yang dikaitkan dengan usaha peningkatan pendapatan petani tidak terlepas dari usaha mencari alternatif, kesempatan kerja, dan nilai tambah dari kegiatan agrobisnis yang dapat dilaksanakan oleh petani (kecil) itu sendiri, sehingga konsep pengembangan agrobisnis diharapkan dapat meningkatkan semangat (motivasi) petani, melatih diri untuk berinovasi, meningkatkan aspirasi untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keberanian untuk mengambil resiko, meningkatkan kesediaan untuk berkelompok, dan meningkatkan kesadaran untuk mandiri (Sendjaja, 1992).

Pengertian agrobisnis menurut Ar-syad, 1985 (dalam Soekartawi, 1991) adalah suatu kesatuan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas, atau kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Kegiatan agrobisnis merupakan perekat antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya. Tatanan dan rangkaian usaha pertanian yang satu dengan yang lain saling terkait, mulai dari penyediaan atau pemilihan lokasi potensial, teknologi, penyediaan sarana prasarana produksi, kegiatan penanganan pasca panen hingga pemasaran hasil, satu sama lain biasanya berada dalam suatu rangkaian agrobisnis.

Sudiryanto, T. (1993), mengemukakan bahwa agrobisnis secara umum mencakup bidang-bidang usaha yang sangat luas yang dikelompokkan dalam lima komponen, yaitu (1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi, (2) bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian, (3) bidang usaha pengolahan hasil pertanian, (4) bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian, dan (5) bidang usaha pelayanan, seperti perbankan, angkutan, asuransi, penyimpanan. Usaha agrobisnis juga terkait pada jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam penyediaan prasarana (transportasi, pelabuhan, pasar, telekomunikasi, irigasi, energi, dll), kegiatan penyuluhan, penelitian serta peraturan dan kebijakan pertanian secara umum.

Syarat Keberhasilan Agrobisnis

Secara substantif tidak ada perubahan atau perbedaan yang berarti dari pola BIMAS yang berorientasi produksi menuju pada sistem agrobisnis, agrobisnis merupakan suatu tingkatan. Yang diperlukan dalam perubahan ini adalah suatu kelembagaan yang mampu melayani kebutuhan agrobisnis. Jika dilihat dari akar budaya, kelembagaan dalam agrobisnis dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang penting adalah sumberdaya manusia, yaitu petaninya itu sendiri. Mosher membagi karakteristik petani di Indonesia dalam tiga katagori;

- (1) Petani tradisional, biasanya mereka mengikuti metode yang berasal dari orang tua mereka dan kadang-kadang meniru sesuatu yang baru dari tetangganya, yang mereka harapkan dari hidup ini mungkin hanyalah sedikit perbaikan dari masa lampau, atau hanya mengharapkan terhindar dari kelaparan, penyakit, dan kematian anak-anak mereka. Mereka berharap dapat mempertahankan tanah yang mereka miliki saat ini atau mengharapkan sedikit perluasan. Petani katagori ini merupakan karakteristik terbesar petani di Indonesia.
- (2) Petani modern (progresif), mereka aktif mencari metode-metode baru, pengetahuan mereka bertambah dari tahun ke tahun dan mereka menghaparkan masa depan yang lebih baik, mereka berani untuk mengambil resiko usaha dan mencoba berbagai alternatif. Kelompok ini jumlahnya sedikit di Indonesia.
- (3) Ada juga di antara petani yang tampaknya tidak dapat bertahan sama sekali, mereka membiarkan rumput tumbuh merajalela di lahan mereka dan ternak lepas berkeliaran. Hutang mereka bertambah banyak, mereka telah kehilangan harapan dan mungkin pula akan kehilangan tanahnya.

Umumnya para petani berusaha di bawah kemampuan mereka sesungguhnya. Mereka sesungguhnya dapat belajar jauh lebih banyak asal mereka mendapat kesempatan dan dorongan. Mereka dapat mencoba metode-metode baru akan tetapi mereka hampir semua terkungkung oleh kebiasaan-kebiasaan. Mereka belajar melakukan suatu cara bertani tertentu lalu terus terpaku pada cara itu dari tahun ke tahun.

Untuk melakukan perubahan pola kegiatan petani yang bersifat konvensional dan subsisten kearah agrobisnis diperlukan kebiasaan mental yang positif, antara lain;

- a. Kebiasaan melakukan pengukuran, berfikir dengan menghitung jumlah (kuantitatif). Pada umumnya petani kurang memperhitungkan hasil usahanya, mereka menyatakan bahwa hasil pertanian mereka "cukup / baik". Dengan kebiasaan menghitung tersebut diharapkan dapat mengukur seberapa jauh hasil usaha mereka.
- b. Selalu bertanya mengapa dan bagaimana. Sebagai contoh; mengapa tanaman ini lebih baik dari yang itu, mengapa lahan itu lebih subur dari yang ini, dan sebagainya.
- c. Kebiasaan untuk selalu mencari alternatif (kemungkinan) lain. Dalam kerangka membangun faktor-faktor internal diperlukan peningkatan motivasi melalui penyadaran dan pemberdayaan, proses penyadaran dan pemberdayaan ini banyak ditentukan oleh masyarakat pertanian itu sendiri.
Faktor eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan kelembagaan agrobisnis adalah struktur pasar dengan berbagai modifikasinya, kebijakan pemerintah, peranan organisasi non pemerintah dan lembaga pendidikan, aspek struktural dan kultural.

Peluang Pengembangan Agrobisnis

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi, dan berkembangnya sektor pariwisata, hal ini memberikan peluang terhadap komoditi pertanian. Sejalan dengan berlakunya pasar bebas, peluang pasar sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada pasar dalam negeri, tapi juga berpeluang bagi pasaran internasional.

Peluang-peluang di atas pada saat yang sama juga merupakan tantangan, karena produk-produk pertanian dari negara-negara lain juga memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk masuk ke dalam pasaran dalam negeri. Oleh karenanya kemampuan kita dalam memanfaatkan peluang-peluang menjadi kunci keberhasilan pengembangan agrobisnis di masa yang akan datang.

Menurut Erwidodo (1994), kemampuan untuk memanfaatkan peluang di sektor pertanian ditentukan oleh banyak faktor, antara lain;

- (1) kondisi sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya alam, manusia maupun modal,
- (2) kondisi sarana prasarana,
- (3) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

- (4) Perangkat peraturan dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain kemampuan Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan peluang sangat ditentukan oleh kesiapan atau kemampuan kita dalam memecahkan kendala yang terkait dengan faktor-faktor tersebut di atas.

Peran Pembangunan Infrastruktur Bagi Pengembangan Pertanian

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa infrastruktur terutama jalan merupakan salah satu faktor utama (essential) dalam pembangunan sektor pertanian. Demikian pula kondisi infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memanfaatkan peluang sektor pertanian.

Tersedianya infrastruktur dalam kondisi yang baik dapat meningkatkan efisiensi usaha dan efisiensi serta efektifitas pemasaran. Tanpa adanya infrastruktur yang efisien dan murah, empat syarat pokok lain (pasar, saprotan, teknologi, dan perangsang produksi) tidak mungkin dapat dimanfaatkan secara optimal.

Secara alamiah areal pertanian harus tersebar secara luas agar dapat memanfaatkan sinar matahari secara optimal, mengikuti kesesuaian tanah, dan kondisi iklim yang kondusif. Oleh karena itu diperlukan jaringan infrastruktur terutama transportasi yang menyebar untuk membawa sarana dan alat produksi ke setiap areal pertanian dan membawa hasil produksi pertanian kepada konsumen. Bagi petani, harga suatu input misalkan pupuk adalah harga pabrik ditambah biaya pengangkutan ke lahannya, demikian juga sebaliknya, uang yang mereka terima dari hasil penjualan produk pertaniannya adalah harga pasar dikurangi biaya pengangkutan dan biasanya dikurangi lagi oleh keuntungan bandar/perantara.

Secara logis jika biaya angkut terlalu tinggi maka saprotan yang dibeli petani akan semakin mahal dan uang yang diterimanya dari penjualan padi misalnya akan semakin sedikit, oleh karenanya diperlukan infrastruktur (khususnya) jalan yang efisien dan murah sehingga dapat memberikan dorongan bagi petani untuk berproduksi yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Telah banyak penelitian mengenai pengaruh jalan lokal terhadap pengembangan sektor pertanian. Penelitian tersebut umumnya menghasilkan kesimpulan bahwa terjadi tingkat penjualan yang signifikan, naiknya harga produk pertanian di areal setempat, meningkatnya pendapatan kotor masyarakat petani, disamping itu meningkatnya interaksi masyarakat melalui bertambahnya kunjungan pejabat, petugas kesehatan, petugas bank dan para penyuluh pertanian. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan jalan lokal dapat meningkatkan tingkat harga komoditas, meningkatkan volume produksi, dan meningkatkan interaksi petani yang dapat meningkatkan produktivitas.

Profesor A.W. Ashby, seorang ahli ekonomi pertanian Inggris yang kenamaan, seringkali mengatakan "jika saya hanya dapat melakukan satu hal di suatu daerah untuk mempercepat pembangunan pertanian, saya akan membuat jalan. Jika saya boleh melakukan hal kedua, saya akan

membuat jalan lagi, dan jika saya masih boleh melakukan hal ketiga, saya akan membuat jalan lebih banyak lagi”

Analisis Mikro

Kajian yang dilakukan di Kabupaten Garut berlokasi di dua desa yaitu Desa Sirna Galih Kecamatan Bayongbong dan Desa Sagara Kecamatan Cibalong. Pemilihan lokasi didasarkan pada kerangka *before and after dan with and without*. Desa sirna galih mewakili desa yang memiliki infrastruktur pertanian yang lengkap dengan sistem agribisnis yang modern, sedangkan desa Sagara mewakili desa dengan kondisi infrastruktur yang sangat minim.

Desa Sirna Galih

Desa Sirnagalih berada di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Jawa Barat. Jarak desa ke Ibukota Kecamatan Bayongbong sejauh 5 Km, jarak ke Ibukota Kabupaten Garut sejauh 7 Km dan jarak ke ibukota Propinsi adalah sejauh 67 km. Ketinggian rata-rata 700 m dpl dengan suhu rata-rata 32 C dan curah hujan rata-rata 800 mm / th. Kondisi topografi desa adalah berbukit dengan kondisi sebelah utara merupakan daerah landai (180,694 ha) dan sebelah selatan merupakan daerah berbukit / pegunungan (213,396). Luas keseluruhan desa adalah 494,090 ha atau 0,16 % dari wilayah Kabupaten Garut.

Secara administrative Desa Sirnagalih berbatasan dengan :

- Sebelah utara Desa Salakuray
- Sebelah selatan Gunung Cikuray
- Sebelah barat Desa Hegarmanah
- Sebelah Timur Desa Sukahati

Komposisi Penduduk Desa Sirnagalih

Jumlah Penduduk Desa adalah 5623 orang, 2773 orang laki-laki dan 2850 orang perempuan.

Mata pencaharian Penduduk Desa

- Pemilik tanah sawah sejumlah 517 orang
- Pemilik tanah tegal / ladang sejumlah 1013 orang
- Penyewa atau penggarap sejumlah 474 orang
- Buruh tani sejumlah 2465 orang
- Pegawai kelurahan sejumlah 9 orang
- Guru sejumlah 20 orang
- PNS / ABRI sejumlah 14 orang
- Pensiunan ABRI sejumlah 48 orang
- Pegawai swasta sejumlah 48 orang
- Pemilik warung / kios sejumlah 57 orang
- Tukang batu 36 orang
- Tukang kayu 31 orang
- Tukang jahit 6 orang
- Tukang cukur 4 orang

Luas kepemilikan lahan

- Kurang dari 0,1 ha 903 orang
- 0,1 – 0,5 ha 120 orang
- 0,6 – 1,0 ha 74 orang
- 1,1 – 1,5 ha 59 orang
- 1,6 – 2,0 ha 4 orang
- > 2,0 ha 2 orang

Kondisi Infrastruktur yang diamati

Jalan

Panjang jalan di wilayah Desa Sirnagalih adalah 6,3 Km dengan komposisi jalan aspal 2,6 Km dan non aspal 3,7 Km. Kondisi jalan untuk jalan aspal adalah sedang, sedangkan jalan untuk non aspal adalah buruk. Hal yang menjadi hambatan pada jalan beraspal di Desa Sirnagalih adalah lebar jalan yang sempit sehingga menyulitkan lalu lintas jalan ketika ada dua kendaraan berpapasan sedangkan untuk jalan non aspal sebagian kondisinya telah diperbaiki dengan menggunakan semen dan dapat dilalui kendaraan roda dua dengan cukup baik, namun tetap menyulitkan jika dilalui dengan kendaraan roda empat.

Irigasi

Irigasi di Desa Sirnagalih adalah irigasi teknis Primer dengan kondisi saluran irigasi cukup baik. Irigasi tersebut dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Air dapat mengalir sepanjang tahun selama tidak adanya gangguan di hulu sungai Cimanuk. Irigasi dimanfaatkan penduduk untuk mengairi sawah yang mengalir sebelah utara jaringan irigasi tersebut. Jumlah sawah yang diairi irigasi teknis sejumlah 109,254 ha sedangkan pengairan setengah teknis sejumlah 21,440 ha.

Telpon

Sebagian kecil wilayah Desa Sirnagalih telah memperoleh jaringan telpon yang masuk ke desa sejak tahun 1995. Sampai saat ini terdapat satu buah kios telpon di Desa Sirnagalih, adapun jumlah pengguna jasa telpon rumah tidak diketahui secara pasti, namun domisili pemilik telpon rumah semuanya berada di sekitar jalan Kabupaten.

Sebagian besar responden sangat mengharapkan adanya penambahan jumlah jaringan telpon yang masuk ke wilayah mereka. Kebutuhan penggunaan telpon tersebut untuk menghubungi kerabat keluarga dan hanya sebagian kecil yang menggunakannya untuk keperluan bisnis. Sebagian kecil responden yang mampu, membeli handphone sebagai alternatif mengatasi keperluan komunikasi.

Listrik

Listrik masuk ke Desa Sirnagalih secara bertahap sejak tahun 1982. Sampai sekarang jaringan listrik telah mencakup 100 % wilayah Desa,

namun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang memperoleh listriknya dengan cara mengambil listrik dari rumah tetangga. Sebagian besar responden menggunakan listrik sejumlah 450 watt dan hanya sebagian kecil saja responden yang menggunakan listrik dengan daya 900 Watt. Ada juga responden yang mengharapkan dapat menurunkan daya listrik dirumahnya dari 900 Watt menjadi 450 Watt dengan alasan beban abodemen.

Sebagian besar responden menggunakan listrik untuk keperluan keluarga dan hanya sebagian kecil yang menggunakan listrik dilaus kebutuhan rumah tangga misal untuk keperluan menjahit.

Pasar

Di Desa Sirnagalih tidak terdapat pasar. Pasar terdekat adalah pasar di wilayah Desa Sukarame dengan jarak antara 500 – 1 Km dari wilayah rumah / tempat bertani responden. Jarak ini cukup dekat dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat karena adanya jalan yang menghubungkan kedua desa dengan kondisi jalan cukup baik.

Responden menjual hasil taninya melalui Bandar / tengkulak yang datang langsung ke lokasi usaha tani responden. Kondisi ini dimungkinkan karena sebagian besar responden mengaku lebih senang menjual hasil taninya kepada tengkulak dengan alasan tidak mau susah, ataupun karena keterbatasan sarana pengangkutan yang dimiliki.

Sebagian besar responden mengaku tidak terlalu tahu persis berapa perbedaan harga jual hasil taninya ke tengkulak dengan harga tengkulak menjual ke pasar. Selanjutnya Bandar akan menjual hasil tani tersebut ke Ibukota Kabupaten Garut ataupun Ke Kota Bandung.

Kendaraan Umum

Karena lokasi Desa sirnagalih adalah tepat di pinggir jalan Kabupaten sehingga kendaraan umum (angkutan kota) yang melintasi desa beroperasi dari pagi sampai malam jam 21.00. Terdapat banyak sewa kendaraan umum (truk/coll bak) pengangkut input maupun hasil pertanian yang dibutuhkan petani. Adapun kendaraan yang masuk ke desa adalah ojek.

Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Infrastruktur yang diamati.

Tanggapan responden terhadap pentingnya infrastruktur yang diamati beragam dan terbagi atas besar kecilnya kepemilikan lahan yang menggambarkan besaran produksi pertanian yang diusahakan. Secara umum apabila diurutkan dari infrastruktur yang paling bermanfaat berturut-turut adalah irigasi, jalan, kendaraan umum, pasar, telpon.

Desa Sagara

Gambaran Umum Desa Sagara Kecamatan Cibalong

- Desa Sagara berada di Kecamatan Cibalong terletak sebelah selatan Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat. Jarak desa ke ibu kota kecamatan 33 Km, ke ibu kota kabupaten 119 Km dan ke ibu kota propinsi 179 Km. Desa sagara merupakan daerah pegunungan, berbukit dan berpatai.
- Kondisi daerah yang teriloir baik dalam aspek pembangunan sosial ekonomi masyarakat, politik, dan pembangunan infrastruktur. Daerah yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten sehingga pembangunannya terabaikan.
- Mata pencaharian masyarakat adalah pertanian sebanyak 1454 orang, pedagang 23 orang, karyawan BUMN 23 orang dan Pegawai negeri sipil 10 orang. Dengan jumlah usia kerja sebanyak 3057 orang yang tidak bekerja 1543 orang.
- Pola pertanian yang di lakukan petani di daerah tersebut adalah jenis pertanian buah dan padi, yang paling dominan adalah tanaman buah-buahan mengingat kondisi lahan yang paling besar adalah lahan kering, adapun sawah adalah jenis sawa tadah hujan. Jenis tanaman yang di tanam mayoritas adalah mangga, jeruk, dan pisang.

Kondisi Infrastuktur yang diamati

Jalan

Panjang jalan di wilayah Desa Sagara adalah 40,5 Km dengan komposisi jalan Batu 19 Km dan jalan tanah 21,5 Km. Kondisi jalan untuk jalan buruk. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Jenis Jalan	Lokasi	Panjang Jalan
Batu	Desa - Cibalong	19 Km
Tanah	Kp. Gunung Peer	6 Km
	Kp. Cipetir	5 Km
	Kp. Lengkong	4 Km
	Kp. Cimerak	1,5 Km
	Kp. Walahar	2 Km
	Kp. Ciwareng	3 Km

Irigasi

Irigasi yang ada di wilayah Desa tersebut adalah jenis irigasi non teknis, dan kondisinya sangat parah. Saluran irigasi dapat digunakan apabila musim hujan, dan petani terlebih dahulu harus membenahi saluran tersebut apabila musim hujan tiba sehingga sebagai konsekwensinya petani mengalami keterlambatan penanaman. Limit waktu kwtwrlambatan penenaman padi tergantung waktu untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut.

Telpon

Jaringan telpon belum masuk ke daerah sekitar Desa, apa bila ada warga Desa yang memerlukan telepon untuk menghubungi keluarganya diluar kota menggunakan layanan Wartel di sekitar daerah Kecamatan atau ke Pameungpeuk.

Listrik

Jaringan instalasi listrik masuk ke Desa Sagara sejak tahun 1994 untuk Kampung Karees dan 1999 untuk Kampung Leuwi pari, dan bendungan. jaringan tersebut berasal dari PLN dan baru menjangkau 30 % dari wilayah perumahan Desa. Sebagian besar masyarakat menggunakan listrik untuk kebutuhan keluarga tidak untuk penggunaan proses pertanian.

Pasar

Tidak terdapat pasar di wilayah desa, bahkan diwilayah Kecamatan Cibalong, terdapat pasar tradisional di wilayah tetangga Kecamatan Pameungpeuk dengan jarak dari Desa Sagara kepasar terdekat 10 Km sampai 19 Km.

Kendaraan Umum

Kendaraan umum (angkutan pedesaan dan ojek) yang melintasi desa beroperasi dari pagi sampai malam jam 12.00 siang. Terdapat banyak sewa kendaraan umum (truk/coll bak) pengangkut input maupun hasil pertanian yang dibutuhkan petani.

Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Infrastruktur yang diamati.

Tanggapan responden terhadap pentingnya infrastruktur yang diamati dengan infarastruktur yang terbatas dan buruk berdampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya petani, dimana usah pada bidang pertanian mengalami keterpurukan mengingat biaya produksi dan hasil produksi tidak berimbang. Karena petani harus membeli sarana pertanian ke Kecamatan Pameungpeuk yang jaraknya cukup jauh sehingga biaya yang dikeluarkan terhitung cukup mahal, sedangkan penjualan hasil penennya sangat murah mengingat sarana prasatana transportasi yang buruk dijadikan alasan oleh tengkulak untuk untuk menjatuhkan harga beli mereka akan produk yang dijual para petani.

Misalnya pada musim panen mangga kemarin petani menjual mangga jenis cengkir dan aromanis berkisar antara harga Rp. 200,- sampai Rp. 500,- /Kg. Sementara pola pertanian di daerah tersebut sangat tradisional sehingga mangga masa paen mangga 1 tahun sekali. Dari satu kasus diatas sudah menjadi pemahaman bersama apabila infrasruktur terbatas dan buruk akan membawa eksees negatif sebagai konsekwensi terhadap pembangunan masyarakat didaerah tersebut.

Melihat kondisi tersebut sehingga banyak masyarakat yang usianya relatif masi muda mencari pekerjaan lain keluar kota, karena mereka menganggap dari usaha pertanian sudah tidak dapat diandalkan lagi untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya. Sementara yang masih bertahan menggarap pertanian yaitu masyarakat yang usianya relatif tua, karena beranggapan dengan usia yang tua tidak ada lagi pilihan lain.

Harapan para responden yang ditemui mengharapkan adanya pembangunan infrastruktur terutama jalan sebagai sarana transportasi yang sangat berpengaruh langsung terhadap usaha pertanian mereka. Sehingga untuk biaya transportasi tidak terlalu besar, dan tidak dijadikan peluang oleh tengkulak untuk menjatuhkan harga jual hasil panen petani.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong peningkatan sektor pertanian serta memberikan akses kepada para petani secara lebih mudah.
2. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut, khususnya pada sektor irigasi, jalan, pasar, listrik dan jaringan telepon, menunjukkan perkembangan yang cukup besar terutama pada sepuluh tahun terakhir. Namun demikian perkembangan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di perdesaan.
3. Pembangunan sektor pertanian sasaran utamanya adalah kesejahteraan petani, oleh karenanya orientasi pembangunan pertanian harus secara tegas dalam menempatkan kesejahteraan petani sebagai sasaran utama.
4. Pengembangan sektor pertanian seharusnya menjadi bagian dari pengembangan ekonomi dan wilayah yang lebih luas sehingga dapat dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk faktor sosial.
5. Pembangunan infrastruktur perlu direncanakan secara matang dan partisipatif dengan melibatkan para petani secara langsung sehingga pembangunan tersebut lebih tepat guna serta menimbulkan rasa memiliki dari para petani dan masyarakat terhadap sarana infrastruktur tersebut yang pada akhirnya dapat dikelola dan dipelihara oleh para petani itu sendiri tanpa harus terus menerus bergantung pada pemerintah.

Rekomendasi

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam hal registrasi/administrasi menyangkut sarana publik sehingga data-data mengenai inventarisasi infrastruktur di Kabupaten Garut memiliki akurasi yang tinggi.
2. Perlu ada pengkajian yang matang dalam bentuk studi kelayakan bila mana akan melakukan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Adji, Teguh Kismantoro. 1996, Mengembangkan Agrobisnis Holtikultura Melalui Kemitraan,
Prakarsa Edisi November 1996, Pusat Dinamika Pembangunan UNPAD;
Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut. 2002, Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001; Garut
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, Garut Dalam Angka Tahun 1991-2001; Garut
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. 2001, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Tahun 1996-2000; Garut
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. 2001, Karakteristik Penduduk Kabupaten Garut; Bandung
- Daniel, Moehtar, M.S. Ir., 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta
- Erwidodo, dkk. 1994. Potensi, Peluang, dan Kendala Produksi dan Ekspor Beberapa Komoditas Pertanian. Monograph Series No. 16. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian; Bogor.
- Mubyarto, Prof. 1994. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Sinar Harapan. Jakarta.
- Setiajie, Iwan dan Adiyoga, Witono, 1997. Pengembangan Agrobisnis Holtikultura Dalam Kontek Pembangunan Wilayah dan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan, Indonesia,
- Malaysia, dan Thailand. Jurnal Prakarsa, Edisi November Tahun 1997. Pusat Dinamika Pembangunan UNPAD; Bandung.
- Mosher, A.T., 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian, Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi, Cetakan ke - 11, disadur oleh Ir. S. Krisnandhi dan Bahrin
- Samad. Dinas Pendidikan Pertanian, Departemen Pertanian; Jakarta.
- Soekartawi. 1991. Agrobisnis, Teori dan Aplikasinya. Penerbit Rajawali; Jakarta.